

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
NOMOR 30 TAHUN 2002
TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPERDA)
KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2001- 2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang demokratis, desentralistik, transparan serta berorientasi pada pemberdayaan masyarakat perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang bersifat komprehensif dan terpadu;
 - b. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001-2005 yang merupakan konsepsi penyelenggaraan pembangunan daerah sebagai pedoman pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 02 Tahun 2002);
 - c. bahwa sesuai dengan proses dan mekanisme Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 30 Tahun 2001-2005, Untuk menjaga Konsistensi Perencanaan dan berkelanjutan pembangunan dalam jangka waktu lima tahun perlu disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005 yang merupakan dokumen perencanaan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005;
 - d. bahwa dengan berpedoman pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/1240/II/Bangda Tanggal 21 Juni 2001, Perihal Pedoman

Penyusunan Dokumentasi Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005;

- e. bahwa sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Pemerintah Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005 dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantanang Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 181 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902);
 - 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 206);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan bentuk rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2002 Nomor 02).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ROKAN
HILIR TAHUN 2001-2005.**

Pasal 1

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005 adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir, merupakan dokumen manajerial komprehensif sebagai penjabaran dari Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005 yang memuat indikasi Program dan Kegiatan Prioritas yang akan dilaksanakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah sesuai dengan kewenangannya guna mewujudkan keserasian pembangunan, pertumbuhan dan kemajuan daerah diberbagai bidang.

Pasal 2

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir 2001- 2005 disesuaikan dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : PROYEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI;
- BAB III : VISI, MISI DAN KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN;
- BAB IV : PROGRAM PRIORITAS TIGA TAHUN;
- BAB V : PENGUKURAN DAN EVALUASI;
- BAB VI : MATRIK DAFTAR INDIKASI PROGRAM DAN KEGIATAN DAERAH;
- BAB VII : PENUTUP.

Pasal 3

Isi beserta uraian terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001 – 2005 yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 2001-2005 dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir melalui Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kabupaten Rokan Hilir setiap tahunnya.

Pasal 5

Pembiayaan pelaksanaan program Pembangunan Daerah Propinsi Riau Tahun 200-2005 yang dilaksanakan melalui (REPETADA) untuk setiap tahunnya diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Dana dari partisipasi masyarakat, Investasi Swasta dan Sumber dana lainnya.

Pasal 6

Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir tahun 2001-2005 ini ditinjau kembali sekali lima tahun ditetapkan garis saris Besar Haluan Negara (GBHN) Program Pembangunan Nasional (Propenas) dan Pola Dasar (POLDAS) Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir atau sesuai dengan ketentuan lainnya yang ditetapkan.

Pasal 7

- (1) Program Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001-2005 ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Program pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001-2005, dapat dilakukan Perubahan sesuai dengan tuntutan dinamika masyarakat dan pelaksanaan APBD Kabupate Rokan Hilir.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

**Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 26 Desember 2002
BUPATI ROKAN HILIR,**

dto

H. THAMRIN HASYIM

**Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 September 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR,**

dto

**Drs. H. ASRUL M. NOOR
Pembina Utama Muda
NIP. 010086333**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR
TAHUN 2002 SERI F NOMOR 4**

PENDAHULUAN

1.1 Umum

Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir di masa depan akan dihadapkan pada berbagai kompleksitas, dinamika dan keanekaragaman persoalan sosial –ekonomi , dan politik yang memerlukan perhatian dari Pemerintah , beserta seluruh potensi masyarakat. Kegiatan Pembangunan harus dilaksanakan oleh segenap komponen dan aktor-aktor daerah dalam rangka mempecepat dan merubah dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada dan sepenuhnya dilaksanakan oleh komponen masyarakat.

Melihat pada perkembangan kondisi saat ini, pemerintah dituntut untuk mewujudkan prinsip-prinsip good goverament, apabila pengaruh globalisasi Iyang begitu cepat telah merubah dinamika masyarakat daerah menjadi masyarakat yang terbuka terhadap informasi dan pengaruh dari luar. Perubahan yang cepat ini harus diikuti dan direspon oleh Pemerintah Daerah yang mampu dan propesional, dilengkapi dengan integritas yang tinggi . Oleh karena itu, orientasi pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir adalah bagaimana sama pembangunan itu mampu memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk bisa terlibat dalam pembangunan daerah. Iklim keterlibatan masyarakat akan tercipta, apabila masyarakat memiliki kemauan untuk akses dalam kegiatan pembangunan.

Paradigma pembangunan daerah yang terpusat kepada kekuatan masyarakat harus memberikan kedaulatan yang setinggi-tingginya kepada masyarakat untuk memilih, memilah dan menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi daerah. Sedangkan Pemerintah daerah hanya bertindak sebagai pengarah, pembimbing dan sekaligus pemberi tauladan.

Untuk mewujudkan pembangunan sebagaimana yang diharapkan , maka Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat harus melaksanakan pembangunan daerah secara terencana, bertahap dan berkelanjutan, serta dapat menunjukkan hasil yang dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat . Dengan demikian , untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dan sekaligus mengatasi permasalahan yang ada serta menghadapi tantangan yang mungkin menghadang perjalanan pembangunan, diperlukan strategi kebijaksanaan yang tepat, kebijaksanaan pembangunan memungkinkan diambilnya tindakan tertentu baik yang bersifat eksternal maupun internal dan dapat menimbulkan perubahan tertentu pada pembuat kebijaksanaan pembangunan mempunyai variable strategi dalam mencari pemecahan masalah yang terbaik dari berbagai alternatif. Strategi pemecahan masalah merupakan pengambilan keputusan yang menyangkut masalah kemasyarakatan yang sangat penting. Pemecahan

masalah yang terbaik sangat dibutuhkan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat.

Kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka menanggulangi dampak krisis yang terjadi saat ini, sangat diharapkan dapat mengatasi beberapa kelemahan penyelenggaraan kegiatan perekonomian kepermukaan, karena beberapa distorsi yang terjadi dimasa lalu telah melemah kan ketahanan ekonomi dan menimbulkan kesenjangan sosial . Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan , telah menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah, antar perkotaan dan pedesaan, maupun antar golongan masyarakat, sehingga gejolak sosial menjadi sangat mudah terjadi. Seiring dengan krisis yang sedang kita hadapi, secara nyata proses globalisasi terus berlangsung dengan cepat, tidak dapat dihentikan dan tidak terhindarkan. Dalam upaya untuk mewujudkan Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang maju, mandiri dan handal, tampaknya harus menyiapkan diri sebaik mungkin menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan daerah lain. Rokan Hilir harus menghadapinya dengan persiapan – persiapan yang selaras dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sumber daya manusia, manajemen dan sistem kelembagaan yang diarahkan pada peningkatan daya saing perekonomian.

Berbagai upaya pembangunan telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan pembangunan. Kemajuan pembangunan diberbagai bidang telah dicapai dan manfaatnya dinikmati oleh seluruh masyarakat. Namun dalam mencermati kondisi, potensi, permasalahan dan peluang yang dimiliki mengharuskan seluruh masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengambil langkah-langkah untuk terus berupaya menata ulang berbagai bentuk kebijaksanaan agar lebih diarahkan pada upaya pemulihan situasi dan kondisi atas dasar rujukan yang disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat itu sendiri.

Kebijaksanaan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum dan masa depan bermaksud untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Hal ini merupakan sasaran yang harus dicapai dan menjangkau semua orang dalam masyarakat. Istilah kepentingan umum dan masa depan berimplikasi penting dalam membuat kebijaksanaan pembangunan. Gambaran tentang kepentingan umum dan masa depan diyakini oleh perancang kebijaksanaan pembangunan, sehingga kemungkinan berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijaksanaan. Variable masa depan pada umumnya terlalu abstrak, karena itu kebijaksanaan cenderung dirumuskan dalam istilah yang sifatnya elastis. Supaya dapat berlangsung maka selalu disesuaikan dengan kenyataan yang dihadapi.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang aspiratif, akomodatif dan responsive terhadap perkembangan lingkungan strategis, diperlukan masukan dan dukungan masyarakat secara keseluruhan yang dapat dijadikan sebagai acuan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang bersifat strategis untuk mengantisipasi berbagai permasalahan pembangunan daerah. Program Rencana Pembangunan Daerah sebagai salah bentuk gambaran dari kehendak, cita-cita dan arah pembangunan daerah yang dikehendaki selama kurun waktu lima tahun, sangat diperlukan keberadaannya guna dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penyelenggara pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam menyusun rencana pembangunan daerah.

Dengan demikian maka untuk mengetahui seberapa jauh tingkat perkembangan yang telah dicapai, diperlukan adanya suatu sistem pemantauan pembangunan yang dilakukan secara terus menerus. Sebagai parameter maka dirancanglah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2001- 2005 yang disusun secara simultan dengan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) dan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Riau Tahun 2001- 2005.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Tujuan

1. Menyusun arah, strategi dan program-program pembangunan yang relevan dengan situasi, kondisi dan potensi yang ada di daerah tersebut mencakup aspek-aspek makro, sektoral dan kewilayahan.
2. Memberikan gambaran kondisi umum Kabupaten Rokan Hilir saat ini serta visi, misi dan arah kebijakan pembangunan sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan.
3. Sebagai dokumen dasar perencanaan pembangunan yang dapat dijadikan acuan utama bagi dinas/instansi di Kabupaten Rokan Hilir dalam menyusun program-program pembangunan selama 5 (lima) tahun

1.2.2. Sasaran

1. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang berencana menyeluruh terpadu terhadap dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan daerah.
2. Terlihatnya gambaran tentang besaran-besaran ekonomi makro yang akan dicapai bila seluruh prioritas pembangunan tercapai.

3. Terwujudnya satuan pandangan dan derap langkah antara masyarakat dan pemerintah dalam melaksanakan prioritas pembangunan selama lima tahun kedepan.
4. Tersusunnya rencana program dan kegiatan yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja yang bersumber dari APBN dan APBD serta gambaran tentang program dan kegiatan investasi masyarakat dan sector swasta.

1.3. Landasan

Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kabupaten Rokan Hilir disusun berlandaskan pada pancasila sebagai landasan Idiil, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Landasan Konstitusional, Garis-Garis Besar Haluan Negara, Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 dan Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Landasan Operasionil.

BAB 2

PROVEKSI PERTUMBUHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI

2.1. Proyeksi Pertumbuhan dan PDRB

2.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Tahun 1993-1999

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Rokan Hilir selama lima tahun terakhir (1993-1999) rata-rata sebesar 5,20 persen pertahunnya pertumbuhan tersebut tampaknya mengalami penurunan selama masa krisis, namun tetap berada diatas pertumbuhan nasional. Jika perekonomian nasional negative sekitar 3 persen, namun Kabupaten Rokan Hilir justru positif sebesar 5,20 persen. Perkembangan PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku tahun 1993-1999 mengalami peningkatan yaitu dari sebesar Rp 360,88 miliar tahun 1993 menjadi sebesar Rp 1.004,22 miliar tahun 1999. sedangkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan 1993 meningkatkan dari Rp 360,88 miliar menjadi Rp 489,18 miliar tahun 1999.

Table 2.1: Produk Domestik Regional Bruto atas dasar Harga berlaku Tahun 1993-1999
Kabupaten Rokan Hilir (miliar Rupiah)

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.	Pertanian	185,27	209,82	240,26	263,69	289,94	439,02	545,50

2.	Pertambangan	0,81	1,13	1,62	2,06	2,71	3,12	3,46
3.	Industri	29,06	34,87	42,06	49,43	57,51	65,05	70,37
4.	Listrik	1,74	2,16	2,63	3,29	4,10	4,59	5,27
5.	Bangunan	1,87	3,82	4,50	5,40	6,23	7,27	8,91
6.	Perdagangan	83,95	98,89	112,22	128,81	143,34	150,68	244,48
7.	Pengangkutan	12,77	14,84	17,11	19,31	21,62	24,93	28,14
8.	Keuangan	24,62	27,02	80,38	35,40	36,64	34,05	30,93
9.	Jasa	20,77	22,72	24,70	27,23	35,87	48,80	67,16
	PDRB	360,88	415,27	475,40	534,62	597,95	777,51	1.004,22

Sumber : PPSE-UNRI

Sector yang masih dominant dalam meningkatkan PDRB Kabupaten Rokan Hilir adalah sector pertanian. Jika pada tahun 1993 PDRB Kabupaten Rokan Hilir atas dasar harga berlaku hanya sebesar Rp 185,27 miliar namun pada tahun 1999 meningkat menjadi sebesar Rp 545,50 miliar. Sedangkan perkembangan PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan yaitu dari Rp 185,27 miliar tahun 1993 menjadi Rp 240,44 tahun 1999.

Table 2.2 : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 1993 tahun 1993-1999 Kabupaten Rokan Hilir (Miliar Rupiah).

No	Sektor	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999
1.	Pertanian	185,27	190,99	201,28	207,97	209,14	224,06	240,14
2.	Pertambangan	0,81	1,00	1,20	1,40	1,52	1,54	1,64
3.	Industri	29,06	32,26	35,46	38,63	40,94	41,62	41,13
4.	Listrik	1,74	1,98	2,21	2,45	2,60	2,66	2,76
5.	Bangunan	1,87	3,64	4,00	4,40	4,91	2,89	2,99
6.	Perdagangan	83,95	97,51	106,95	116,33	127,97	129,85	131,96
7.	Pengangkutan	12,77	14,13	15,56	16,39	17,22	17,35	17,64
8.	Keuangan	24,62	26,24	27,57	28,57	28,30	24,77	23,95
9.	Jasa	20,77	21,39	21,99	22,92	25,37	25,69	26,67
	PDRB	360,88	389,14	416,22	441,06	457,31	470,45	489,18

Sumber : PPSE-UNRI

Pertumbuhan sector pertanian (1993-1999) adalah sebesar 4,44 persen, peranannya turun dari sebesar 51,33 persen tahun 1993 menjadi sebesar 49,15 persen tahun 1999. walaupun demikian sector pertanian masih memegang peranan penting karena laju pertumbuhan masih tetap berada diatas sektor-sektor yang lainnya.

Table 2.3 : Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga konstan 1993 dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Rokan Hilir tahun 1993-1999 (persen)

No	Sector	1993	Pertumbuhan	1999
1.	Pertanian	51,33	4,44	49,15
2.	Pertambangan	0,22	12,48	0,34
3.	Industri	8,06	5,95	8,41
4.	Listrik	0,48	7,99	0,56
5.	Bangunan	0,52	8,14	0,61
6.	Perdagangan	23,27	7,83	26,98
7.	Pengangkutan	3,54	5,53	3,61
8.	Keuangan	6,82	- 0,50	4,90
9.	Jasa	5,76	4,26	5,44
	PDRB	100,00	5,20	100,00

Sumber : PPSE-UNRI

Keberhasilan Kabupaten Rokan Hilir mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut tidak terlepas dari kemampuan dalam menarik investasi baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri (asing). Selama 5 tahun terakhir (1994-1998) jumlah investasi yang berhasil ditarik masuk ke Rokan Hilir mencapai Rp 832,39 miliar.

Table 2.4 : Perkiraan Investasi Kabupaten Rokan Hilir Tahun 1994-1998 (Miliar Rupiah)

No	Sektor	Investasi
1.	Pertanian	230,34
2.	Pertambangan	14,96
3.	Industri	435,60
4.	Listrik	5,48
5.	Bangunan	21,21
6.	Perdagangan	66,51
7.	Pengangkutan	27,72

8.	Keuangan	2,60
9.	Jasa	28,54
	Jumlah	832,96

Sumber : PPSE-UNRI

Prosentase investasi 26,57% terhadap PDRB harga berlaku

Pertumbuhan ekonomi 5,20 %

ICOR 4,53

2.1.2 Proyeksi Pertumbuhan Tahun 2001- 2005

Berdasarkan perkembangan tersebut diatas maka dalam menghadapi perkembangan ekonomi untuk masa 5 tahun kedepan (2001-2005) pertumbuhan ekonomi tidak akan jauh berbeda dengan perkembangan ekonomi di daerah lainnya walaupun masih akan lebih baik, yakni berada diatas pertumbuhan ekonomi nasional. Hal tersebut dikarenakan sifat dan karakter perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dicirikan pada pola kegiatan investasi yang lebih terfokus pada sector pertanian. Namun demikian tanpa mengabaikan potensi ekonomi lainnya, maka pada masa mendatang sector-sektor ekonomi lainnya selain sector pertanian tersebut diperkirakan masih akan mampu meningkatkan PDRBnya sekalipun dalam jumlah yang kurang signifikan terhadap perkembangan ekonomi secara makro.

Perkiraan PDRB Rokan Hilir atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan dari Rp 1.222,37 miliar, meningkat menjadi Rp 3.009,81 miliar tahun 2005. sedangkan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan juga mengalami peningkatan dari sebesar Rp 520,13 miliar tahun 2001 meningkat menjadi sebesar Rp 707,90 miliar tahun 2005.

Table 2.5 : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga berlaku tahun 2000-2005
Kabupaten Rokan Hilir (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian	654,60	785,62	942,62	1.131,15	1.357,38	1.628,86
2.	Pertambangan	4,33	5,41	6,76	8,45	10,55	13,20
3.	Industri	81,63	94,99	109,84	127,41	147,80	171,45
4.	Listrik	27,26	32,99	39,91	48,30	58,44	70,72
5.	Bangunan	11,58	15,06	19,58	25,48	33,08	43,01
6.	Perdagangan	292,40	349,71	418,25	500,22	598,27	715,53

7.	Pengangkutan	33,06	38,85	45,65	53,64	63,03	74,05
8.	Keuangan	35,57	40,91	47,04	54,10	62,21	71,54
9.	Jasa	81,94	99,96	121,95	148,78	181,51	221,45
	PDRB	1.222,37	1.463,10	1.751,60	2.097,50	2.512,28	3.009,81

Sumber : PPSE-UNRI

Table 2.6 : Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga Konstan 1993 tahun 2000-2005 untuk Kabupaten Rokan Hilir (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005
1.	Pertanian	254,87	270,16	286,37	303,55	321,76	341,07
2.	Pertambangan	1,77	1,95	2,14	2,36	2,59	2,85
3.	Industri	49,80	46,65	49,68	52,91	58,35	60,01
4.	Listrik	2,98	3,22	3,48	3,75	4,06	4,38
5.	Bangunan	3,24	3,52	3,82	4,14	4,50	4,88
6.	Perdagangan	141,86	152,50	163,93	176,23	189,45	203,65
7.	Pengangkutan	18,70	19,82	21,01	22,27	23,61	25,02
8.	Keuangan	24,91	25,90	26,94	28,02	29,14	30,30
9.	Jasa	28,00	29,40	30,87	32,42	34,04	35,74
	PDRB	520,13	553,12	588,24	625,65	665,50	707,90

Sumber : PPSE-UNRI

Selama tahun 2001-2005 perekonomian Kabupaten Rokan Hilir diperkirakan akan tumbuh sekitar 6,50 persen rata-rata pertahunnya. Pertumbuhan Sektor pertanian diperkirakan menurun dari 49,15 persen tahun 1999 menjadi sebesar 48,18 persen tahun 2005.

Table 2.7 : Distribusi Prosentase PDRB atas dasar harga Konstan 1993 dan Laju Pertumbuhan Kabupaten Rokan Hilir tahun 1999-2005 (persen)

No	Sektor	1999	Pertumbuhan	2005
1.	Pertanian	49,15	6,00	48,18
2.	Pertambangan	0,34	10,00	0,40
3.	Industri	8,41	6,50	8,48
4.	Listrik	0,56	8,00	0,62

5.	Bangunan	0,61	8,50	0,69
6.	Perdagangan	26,98	7,50	28,77
7.	Pengangkutan	3,61	6,00	3,53
8.	Keuangan	4,90	4,00	4,28
9.	Jasa	5,44	5,00	5,05
	PDRB	100,00	6,50	100,00

Sumber : PPSE-UNRI

Kenaikan terhadap beberapa sector pembangunan diperkirakan akan memberikan tanda-tanda bahwa upaya pemulihan ekonomi akan mencapai pada kondisi yang memuaskan dalam arti bahwa aktifitas perekonomian kembali pada posisi normal seperti sediakala dimana sector industri dan perdagangan adalah merupakan sector yang paling responsive dalam menyambut situasi yang diperkirakan akan jauh lebih baik.

Keberhasilan dalam pencapaian apa yang diinginkan tersebut di atas, maka sangat tergantung pada kemampuan semua pihak dalam menarik investasi ke Kabupaten Rokan Hilir.

Table 2.8 : Perkiraan Investasi tahun 2001-2005 Kabupaten Rokan Hilir (Miliar Rupiah)

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	Jumlah
1.	Pertanian	188,54	226,23	271,48	325,77	390,93	1.402,95
2.	Pertambangan	2,71	3,38	4,23	5,28	6,60	22,20
3.	Industri	27,70	32,13	37,27	43,23	50,15	190,48
4.	Listrik	14,52	32,13	21,25	25,71	31,12	110,16
5.	Bangunan	5,76	17,57,49	9,75	12,65	16,45	52,10
6.	Perdagangan	91,80	109,79	131,31	157,05	187,83	677,78
7.	Pengangkutan	10,45	12,33	14,48	17,02	19,99	74,27
8.	Keuangan	6,55	7,53	8,66	9,95	11,45	44,14
9.	Jasa	17,49	21,34	26,04	31,76	38,75	135,38
	PDRB	365,52	437,78	524,47	528,42	753,27	2.709,46

Sumber : PPSE-UNRI

Catatan :

1. Investasi 22,47%
2. Inflasi 19,74%
3. Pertumbuhan 6,50%

4. ICOR	3,46%
5. Tabungan	14,61% dari Jumlah PDB
6. Investasi Swasta	7,86%

2.2. Kendala Yang Dihadapi

2.2.1. Konflik Sosial dan Kerusuhan Massa

Sejak munculnya reformasi berbagai perubahan telah terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuknya adalah berupa telah bergesernya nilai-nilai dari yang selama ini bersifat tertutup transparan, dari sentralistik menjadi desentralistik, dari system ekonomi yang berpusat pada konglomerasi kepada system ekonomi yang berpusat pada ekonomi rakyat dan berbagai perubahan lainnya yang telah berimplikasi terhadap aspek politik, ekonomi, social, budaya dan keamanan serta ketertiban masyarakat. Kondisi tersebut bukan saja telah menimbulkan ketegangan dan kerusuhan tetapi juga telah menimbulkan krisis kepercayaan dan krisis kepemimpinan mulai dari tingkat nasional hingga ketingkat local serta terganggunya stabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat tersebut sebagai akibat adanya tindakan-tindakan pada masa lalu yang kurang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, adat istiadat dan budaya setempat, aturan-aturan hukum yang sesungguhnya dan lebih mementingkan pencapaian target pertumbuhan dari upaya pendistribusian pendapatan secara merata untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar dan belum banyak diolah telah menjadi daya tarik bagi pihak luar untuk menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan wilayah tersebut , sehingga pada masa lalu arus investasi yang masuk ke Kabupaten Rokan Hilir sangat tinggi terutama di sector pertanian dan sector kehutanan. Sebagai dampak dari masuknya investasi yang cukup besar tersebut adalah tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Cukup tinggi laju pertumbuhan penduduk dan kegiatan investasi dalam skala besar di satu sisi memberikan pengaruh terhadap tingginya laju pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain telah menimbulkan suatu kecemburuan social yang tinggi di kalangan masyarakat antara penduduk tempatan dengan penduduk pendatang oleh karena telah terjadi perbedaan yang cukup tajam dalam kemampuan mengelola kesempatan dan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan.

Kecemburuan social yang telah terjadi cukup lama tersebut semakin diperkuat lagi dengan adanya kesewenangan yang dilakukan oleh pendatang dan para pengusaha besar yang mendapat fasilitas dukungan dan perlindungan yang cukup besar pula dari pemerintah kurang mengikuti norma-norma, kaidah dan aturan-aturan baik yang bersifat local maupun nasional dan baik yang bersifat informal maupun formal untuk melakukan berbagai aktifitas terutama dalam pengalihan asset berupa lahan-lahan pertanian masyarakat dan areal hutan yang selama ini merupakan sumber mata pencaharian bagi masyarakat tempatan, untuk dijadikan lahan usaha dalam bentuk perkebunan dan wilayah HPH dengan kurang melibatkan secara aktif penduduk tempatan.

Sehingga pada akhirnya kondisi tersebut diatas pada beberapa lokasi telah menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara masyarakat tempatan dengan masyarakat pendatang dan antara masyarakat tempatan dengan pengusaha. Konflik ini sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas sampai ke akarnya sehingga dikhawatirkan akan muncul kepermukaan sewaktu-waktu dengan eskalasi yang akan semakin meluas dan mendalam apabila tidak sengaja diselesaikan secara tuntas.

Adanya konflik-konflik yang telah terjadi selama ini baik secara vertical maupun horizontal telah mampu dieksploitasi sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan ingin mencari keuntungan pribadi yang sesaat di era reformasi ini dalam bentuk provokasi telah mampu berkembang menjadi suatu tindakan berupa demonstrasi kepada pemerintah, perusahaan, dan kepada pihak-pihak yang diduga oleh masyarakat mempunyai keterkaitan dalam program tersebut. Bahkan di beberapa lokasi tindakan tersebut telah berkembang ke arah anarkhisme dalam bentuk pengambil alihan secara paksa, pembakaran, pengrusakan disejumlah lokasi perkebunan. Kondisi tersebut semakin diperparah lagi dengan adanya upaya provokasi yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk melakukan perlawanan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan kepada masyarakat, sehingga tidak jarang menimbulkan korban yang tidak sedikit di antara ke dua belah pihak.

Kondisi tersebut tentu saja akan memperhatikan berbagai pihak oleh karena dari apapun yang dilakukan dalam bentuk demonstrasi, tindakan anarkhis berupa pengrusakan, pembakaran bahkan penyerangan secara fisik kepada orang perorangan yang pasti akan menimbulkan kerugian baik material maupun immaterial. Hal ini adalah merupakan suatu permasalahan yang tidak mudah untuk diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir mengingat bahwa adanya pluralitas dalam masyarakat baik pluralitas dalam aspek social, ekonomi maupun budaya.

Disamping itu pula sekalipun apa yang dilakukan oleh para pendatang dan pengusaha besar di Kabupaten Rokan Hilir adalah merupakan produk dari kebijakan pada masa lalu, namun hal tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan masih mempunyai landasan hukum yang berlaku pada saat itu dan beberapa yang masih belum dilakukan penyempurnaan pada era desentralisasi saat sekarang. Maka untuk mempertahankan kepercayaan dunia usaha kepada pemerintah, hal tersebut terpaksa harus dipertahankan. Sehingga pada saat sekarang Pemerintah Kabupaten berada dalam posisi yang sulit yakni di satu sisi harus memperhatikan amanat penderitaan rakyatnya, namun disisi lain harus pula mempertahankan eksistensi dari aktifitas Investasi ke daerahnya sebab jika tidak maka akan terjadi pelarian modal (Capital flight) yang pada akhirnya akan merugikan daerahnya sendiri.

2.2.2. Lemahnya Penegakkan Hukum

Salah satu tuntutan yang paling kuat di era reformasi dan demokratisasi ini adalah berupa penegakkan supremasi hukum yang dilakukan secara konsisten, transparan, jujur dan adil oleh berbagai pihak. Hal ini adalah merupakan wujud dari masih adanya keinginan yang kuat dari masyarakat untuk membentuk suatu tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang didasarkan atas dasar hukum yang berlaku. Namun sayang hal ini kurang menjadi perhatian yang berprioritas dan kurang direspon secara sungguh-sungguh oleh pihak-pihak yang terkait dalam upaya penegakan hukum ini.

Upaya penegakan yang telah dilakukan selama ini ditujukan baru sebatas kepada para pelanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat yang berada di kelas menengah ke bawah, sedangkan bagi kelompok masyarakat yang berada pada kelas atas masih belum mampu disentuh oleh hukum karena kemampuannya dalam membeli hukum yang cukup tinggi. Hal tersebut dibuktikan dengan berbagai kasus besar yang melibatkan masyarakat kecil dengan kelas atas yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas bahkan cenderung kasus tersebut dihilangkan secara sistematis, sedangkan kerugian terbesar telah terjadi dikalangan masyarakat.

Disamping itu pula ketidakmampuan para aparat penegak hukum dalam melindungi masyarakat kecil, penindakan secara tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran hukum terutama terhadap hal-hal yang meresahkan masyarakat seperti adanya kegiatan prostitusi terselubung, peredaran obat-obatan terlarang dan minuman keras, perjudian dan berbagai

penyakit masyarakat serta adanya perlakuan yang sangat diskriminatif dalam upaya penegakkan hukum itu sendiri.

Kondisi tersebut telah menjadikan preseden yang tidak baik, yakni berupa berkurangnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para penegak hukum, lembaga peradilan dan kepada hukum itu sendiri. Indikasi ini terlihat dari semakin merebaknya dalam masyarakat sikap main hakim sendiri berbagai kasus yang ditemuinya. Dimana disamping merupakan bentuk pelampiasan dari kekesalannya terhadap sistem penegakkan hukum yang semakin tidak jelas arahnya pada saat sekarang, juga disebabkan oleh karena sudah semakin jenuhnya masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya yang telah diupayakan secara hukum namun menghadapi jalan buntu dan menghadapi " dinding tebal " dari system hukum yang ada untuk melindungi kepentingan pihak ataupun kelompok tertentu. Disamping itu pula telah jenuhnya masyarakat terhadap berbagai bentuk tindakan pelanggaran hukum lainnya yang selama ini selalu mengancamnya.

Sangat disadari bahwa berbagai hal tersebut bukanlah merupakan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi lebih disebabkan oleh karena alasan-alasan yang bersifat klasik, seperti gaji yang masih rendah terbatasnya sarana dan prasarana terbatasnya kemampuan dan jumlah aparat serta berbagai alasan lainnya. Terlepas dari salah atau benarnya dan tepat atau tidaknya alasan-alasannya tersebut paling tidak hal tersebut adalah merupakan cerminan dari adanya upaya para penegak hukum itu sendiri untuk memanfaatkan situasi yang terjadi secara internal di lingkungannya untuk melakukannya berbagai aktifitas yang akan dapat membenarkan tindakan yang sangat merugikan citra kelembagaan hukum itu sendiri dan akan mengaburkan komitmen dari seluruh komponen bangsa untuk melakukan penegakkan supremasi hukum serta akan menggambarkan pula lemahnya etos kerja dari aparat penegakan hukum dalam membangun supremasi hukum yang diidam-idamkan seluruh masyarakat.

Pada saat sekarang keamanan ketenangan kedamaian dan ketertiban masyarakat Kabupaten Rokan Hilir telah semakin terganggu oleh berbagai bentuk aktifitas seperti pengambil alihan dan penetapan status tanah yang masih belum jelas semakin berkembangnya berbagai bentuk penyakit masyarakat (judi prostitusi NARKOBA, dan minuman keras) berbagai bentuk intimidasi dan tekanan bagi pihak luar semakin berkembangnya pungutan liar semakin berkembangnya pungutan liar baik secara terang-terangan maupun tertutup semakin mengengjalanya dengan kuat tindakan KKN dan berbagai tindakan pelanggaran hukum lainnya.

Namun dari keseluruhan bentuk pelanggaran hukum tersebut di atas, belum satu pun secara jelas dan konsisten diselesaikan secara baik oleh para aparat yang terlibat dalam upaya

penegakkan hukum, bahkan terjadinya indikasi keterlibatan oknum aparat dalam permainan tersebut yang pada akhirnya semakin memperkuat keberadaan dari para pelaku tersebut dan semakin memperkuat keberadaan dari para pelaku tersebut dan semakin menyuburkan kehidupan yang bersifat pelanggaran hukum baik hukum formil, maupun hukum adat, kaedah-kaedah kepatutan dalam agama, adapt istiadat dan dalam pergaulan masyarakat.

2.2.3. Lemahnya Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan dan peranan pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang semakin luas. Hal tersebut merupakan wujud dari upaya pemerintah pusat untuk memberikan otonomi yang nyata, luas dan bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Kebijakan dalam rangka desentralisasi ini tentu akan memberikan Implikasi yang luas, dimana penyelenggaraan otonomi daerah tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi saja tentang luasnya kewenangan, tetapi perlu lebih dipahami lagi tentang semakin luas dan beratnya beban tugas serta tanggung jawab pemerintah Kabupaten/Kota tersebut untuk mampu menyelenggarakan pembangunan dan pemerintahan secara baik dan benar (*good governance*), terutama dalam menyikapi perkembangan yang para era globalisasi, transparansi, dan demokratisasi ini sangat dinamis sekali dan meningkat baik intensitas maupun kualitasnya.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di era reformasi yang melahirkan era demokratisasi dan era otonomisasi, dimana tingkat kesadaran politik rakyat yang semakin tinggi. Tuntutan terhadap pembangunan semakin kuat, dan permasalahan daerah semakin berakumulasi, maka Kabupaten Rokan Hilir sebagai daerah yang baru dimekarkan harus mampu meningkatkan kemampuannya dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah, serta meningkatkan intensitas dan perhatian pemerintah kepada masyarakat yang semakin baik dan tinggi.

Setelah 2 tahun dilaksanakannya otonomi secara nyata di Kabupaten Rokan Hilir, perkembangan yang terjadi pada jajaran pemerintah Kabupaten Rokan Hilir masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan kendala yang mengganggu kelancaran jalannya pemberian pelayanan kepada masyarakat melalui regulasi, fasilitasi, dan advokasi dalam berbagai bentuk kebijakan. Beberapa bentuk permasalahan dan kendala tersebut berupa :

- a. Struktur kelembagaan organisasi pemerintahan yang masih belum menerapkan sistem “minim struktur kaya fungsi” sehingga mengakibatkan adanya kesan” pemborosan struktur”.
- b. Pola perumusan berbagai kebijakan masih dipengaruhi oleh nuansa sektoral, pada hal di era otonomi pendekatan kebijakan pembangunan lebih ditekankan pada aspek kewilayahan.
- c. Budaya organisasi yang menunggu petunjuk dari atasan masih terjadi, sehingga banyak langkah-langkah kebijakan yang diambil oleh unit kerja kadang kala menjadi kurang berjalan lancar ketika atas yang ditunggu tidak berada di tempat.
- d. Demikian pula budaya dalam “menjalankan aturan” yang masih secara kental melekat dalam jiwa aparatur pemerintahan telah menjadi hal tersebut sebagai alasan bagi pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan secara kaku. Hal tersebut seyogyanya tidak terjadi serta seharusnya dirubah kearah budaya “ pencapaian Visi” organisasi.

Upaya untuk keluar dari empat permasalahan tersebut diatas harus dilakukan pemberdayaan kelembagaan dan aparatur pemerintahan secara simultan dan sistematis mengingat untuk melakukan perubahan dalam perilaku dan budaya organisasi memerlukan perubahan dalam perilaku dan budaya organisasi memerlukan waktu yang cukup panjang dan komitmen yang kuat serta kesungguhan dari berbagai pihak terutama pucuk pimpinan (Top leader) pada tataran formal maupun informal, para elit, para tokoh dan seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama saling bahu membahu untuk mewujudkannya.

2.2.4. Lambatnya Pemulihan Ekonomi

Krisis ekonomi yang dimulai sejak Juli 1997, sampai saat sekarang masih sangat dirasakan dampaknya oleh masyarakat Kabupaten Rokan Hilir, seperti masih terjadinya kesulitan sejumlah barang kebutuhan pokok terutama bahan bakar minyak (minyak tanah) dan minyak goreng, harga-harga barang-barang yang semakin hari menunjukkan indikasi yang semakin meningkat, harga jual produk-produk pertanian yang tidak stabil , harga pupuk sebagai input pertanian yang juga mengalami kenaikan dan subsidi yang dihilangkan oleh pemerintah dan sebagainya, sehingga semakin lama sangat dirasakan oleh masyarakat bahwa beban hidup mereka semakin berat.

Berbagai bentuk kebijaksanaan pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah dikeluarkan untuk melakukan pemulihan ekonomi seperti adanya intervensi Bank Indonesia untuk menekankan kenaikan nilai kurs US \$ agar nilai mata uang rupiah tidak semakin lemah, namun hal tersebut masih bersifat temporer oleh karena fluktuasi nilai mata uang ini sampai saat sekarang pun masih cukup bervariasi, semakin merosotnya nilai ekspor Indonesia ke luar negeri sebagai akibat dari semakin rendahnya kemampuan nasional dalam memproduksi barang-barang ekspor, disisi lain telah terjadi peningkatan yang luar biasa terhadap impor terutama terhadap barang-barang konsumsi sehingga hal ini semakin menekan Devisa Negara, demikian pula terhadap kebijaksanaan dalam pengendalian harga terhadap sejumlah barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, minyak tanah, gula dan sebagainya melalui kegiatan "operasi pasar" juga belum membuahkan hasil bagi penyediaan barang-barang kebutuhan pokok tersebut secara permanent hal tersebut dibuktikannya masih terjadinya kelangkaan beberapa jenis barang tersebut dan harga yang sulit untuk dikendalikan.

Kegagalan dalam memulihkan beberapa indikator ekonomi tersebut di atas pada masa kurun waktu 4 tahun terakhir ini adalah lebih disebabkan oleh berbagai faktor yang bersifat internal maupun eksternal diantaranya adalah ;

- a. Kurang kuatnya komitmen dari seluruh komponen bangsa dalam menjalankan upaya pemulihan ekonomi secara konsisten dan bersungguh-sungguh, indikasi ini terlihat dari adanya sebagian komponen bangsa tersebut ingin memanfaatkan situasinya untuk melakukan tindakan spekulatif demi keuntungan kelompoknya.
- b. Kebijakan-kebijakan ekonomi baik terutama pada skala nasional masih berorientasi pada kebijakan yang bersifat makro kurang mengarah secara tajam pada sector riil, sementara kebijakan untuk sector riil lebih ditekankan pada peranan daerah. Hal ini mengakibatkan kurang konsistennya antara kebijakan yang ada pada tingkat pusat dengan kebijakan di tingkat daerah, sehingga upaya pemulihan perekonomian di daerah masih sangat tergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
- c. Kemampuan daerah dalam menangani upaya pemulihan ekonomi masih sangat terbatas sekali, terutama dalam hal perumusan kebijakan yang masih banyak kewenangannya di pegang oleh pemerintah pusat seperti untuk distribusi sejumlah barang-barang barang-barang kebutuhan pokok primer maupun sekunder terutama bahan minyak, beras, pupuk untuk pertanian dan sebagainya.
- d. Perekonomian Kabupaten Rokan Hilir masih dipengaruhi oleh kekuatan ekonomi besar terutama pada sub sector perkebunan, sehingga pada tingkat petani posisi tawarnya (

bargaining position) relative sangat lemah akibatnya harga barang-barang pertanian yang dihasilkan masyarakat sangat ditentukan oleh kekuatan ekonomi besar tersebut.

- e. Sekalipun hasil-hasil pertanian dikabupaten Rokan Hilir mempunyai nilai ekonomi yang cukup tinggi di pasar luar negeri dan bersifat strategis oleh karena di jual dengan nilai mata uang US\$, namun manfaat tersebut kurang dirasakan oleh para petani. Kondisi ini sangat bertolak belakang dari yang seharusnya , dimana seyogyanya fluktuasi nilai mata uang US\$ terhadap nilai mata uang rupiah tetapi kenyataan tidak ada pengaruhnya secara signifikan.

Disamping kelima tersebut diatas, maka upaya pemulihan perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir selama ini juga disebabkan oleh karena masih tingginya angka ICOR (incremental Capital Output Ratio) yang sampai saat sekarang masih berkisar 4,53 yang berarti hal tersebut masih menggambarkan adanya in-efisiensi dalam kegiatan investasi dan peranan pemerintah dalam investasi masih relative besar pada hal investasi pemerintah ini lebih diarahkan untuk pembangunan fasilitas public (Publik facilities) dalam rangka pelayanan umum (Public services), sedangkan investasi swasta yang diharapkan untuk memacu kegiatan ekonomi sebahagian besar berada pada sector pertanian , sehingga sangat sulit bagi Kabupaten ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi dengan cepat.

2.2.5. Penanggulangan Krisis dan Prospek Ke Depan

Krisis moneter yang berkepanjangan sejak pertengahan tahun 1997 telah mengakibatkan krisis ini menjadi bersifat multidimensi, sehingga bukan saja telah merusak sendi-sendi perekonomian, tetapi juga telah mampu merubah tatanan ekonomi, social dan politik baik pada skala nasional regional maupun local.

Berbagai kesulitan dihadapi baik oleh Negara pemerintah maupun masyarakat pada masa krisis ini, diantaranya adalah Negara sedang dihadapkan pada kesulitan untuk menutup deficit anggaran sebagai akibat semakin menurunnya penerimaan Negara terutama yang berasal dari ekspor sementara impor masih belum mampu dibatasi oleh karena memang dalam beberapa hal Indonesia masih tergantung pada impor terutama untuk mendukung pengadaan barang kebutuhan pokok dan aktifitas disektor produksi. Sementara itu masyarakat diharapkan pada kesulitan untuk memperoleh sejumlah barang-barang kebutuhan pokoknya karena jumlah yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan riilnya disamping adanya kebocoran-kebocoran dalam supply barang kebutuhan pokok tersebut (terutama

BBM) keluar negeri dan adanya aksi spekulasi yang dilakukan oleh para pedagang kesulitan dalam memikul beban hidup oleh karena biaya hidup yang semakin meningkat sebagai akibat kenaikan harga-harga umum yang kurang dapat dikendalikan sementara penerimaan menjadi berkurang sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh sejumlah industri oleh karena adanya kebijaksanaan rasionalisasi pekerja/pengawal.

Untuk menghadapi berbagai hal tersebut di atas, maka berbagai langkah kebijaksanaan telah diambil oleh pemerintah pusat dengan menggulirkan strategi dengan istilah Jaring Pengamanan Sosial (JPS) dengan empat program yang meliputi: Program Ketahanan Pangan (food security) yang diarahkan untuk menjamin ketersediaan bahan makanan dan terjangkau oleh masyarakat Program Padat Karya dan menciptakan lapangan kerja produktif (employment Creation) yang arahnya untuk mengurangi angka pengangguran sekaligus meandorong usaha produktif Program Perlindungan Sosial (social protection) yang diarahkan untuk mempertahankan akses masyarakat pada fasilitas pelayanan social yang meliputi pelayanan Pendidikan dan Pelayanan kesehatan dan program pemberdayaan ekonomi rakyat melalui pengembangan indistri kecil-menengah (support for small and medium enterprises) yang upayanya dilakukan melalui berbagai pelatihan penyuluhan, bimbingan, bantuan promosi, kemitraan dan bantuan permodalan.

Dari keempat program tersebut maka sebagai implementasinya pemerintah telah melakukan berbagai kegiatan diantaranya adalah operasi pasar (OP), bantuan kesehatan (JPSK-BK), bantuan pendidikan (JPS-BP), pemberdayaan daerah dalam mengatasi dampak krisis ekonomi (PDM-DKE) dan program pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT-AS).

Aktifitas yang dilakukan oleh setiap program kegiatan tersebut juga relative banyak seperti yang dilakukan oleh JPS-Bantuan Pendidikan adalah disamping memberikan beasiswa kepada pelajar juga memberikan bantuan operasional pendidikan pada sekolah-sekolah. Demikian pula untuk program PDM-DKE dimana disamping adanya kegiatan padat karya untuk mengatasi pengangguran sebagai akibat PHK juga memberikan bantuan dana bergulir untuk kegiatan usaha masyarakat secara berkelompok.

Dengan adanya program JPS tersebut telah mampu ikut mengatasi sebagian kesulitan yang dihadapi masyarakat bahkan dalam beberapa hal Pemerintahan Daerah ikut memberikan dukungan melalui APBD-nya walaupun dalam jumlah yang masih sangat terbatas.

Sejalan dengan upaya mengatasi krisis ekonomi yang sampai saat sekarang masih berlanjut, maka langkah-langkah strategis yang telah diambil oleh pemerintah adalah dengan melakukan 4 tahapan yaitu tahap penyelamatan (Rescue) yang diperkirakan memakan waktu

satu sampai dua tahun terhitung sejak tahun 1998/1999. Tahap pemulihan (recovery) yang sifatnya overlap dengan tahapan sebelumnya dan membutuhkan waktu satu sampai dua tahun dan tahap pembangunan (development) yang dapat dimulai kembali apabila seluruh krisis telah dapat ditanggulangi dengan baik.

Apabila dicermati dari keempat tahapan tersebut maka pada saat sekarang upaya penanggulangan krisis ekonomi telah memasuki tahap kedua yakni tahap dimana dilakukannya upaya pemulihan (recovery).

Hal tersebut tampak dari berbagai implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah dengan berupaya untuk melakukan dan menjaga stabilitas ekonomi dengan menekan laju inflasi mengendalikan kurs mata uang asing, menggalang investasi terutama yang berasal dari luar negeri dengan telah mulai melakukan promosi investasi (road show). Mengatasi berbagai macam bentuk distorsi dalam distribusi barang dan sebagainya. Kondisi tersebut adalah merupakan cerminan dan prospektif dari kondisi perekonomian yang secara perlahan telah menuju ke upaya pemulihan sekalipun kondisinya belum seperti pada saat sebelum krisis moneter terjadi

2.2.6. Program Pemulihan Ekonomi

Upaya pemulihan ekonomi harus menjadi prioritas oleh karena beban ekonomi rakyat sudah semakin berat serta sebagai prasyarat pelaksanaan pembangunan yang lebih baik pada masa mendatang. Lambatnya pemulihan ekonomi cenderung akan memicu timbulnya gejolak social yang akan membahayakan proses pemulihan ekonomi itu sendiri.

Upaya pemulihan ekonomi dilakukan secara sinergis dari seluruh komponen pembangunan baik secara horizontal dari seluruh sector pembangunan maupun vertical dengan melibatkan seluruh jajaran pemerintahan kabupaten dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia, Hal ini antara lain harus ditunjukkan dengan menurunnya jumlah penduduk miskin dan semakin kecilnya kesenjangan antar penduduk, dan meningkatnya daya saing.

Mengingat bahwa Kabupaten Rokan Hilir adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Propinsi Riau, maka langkah-langkah strategis untuk melaksanakan pemulihan ekonomi harus cepat mengacu pada arahan GBHN. Pola Dasar Pembangunan Propinsi Riau, dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Rokan Hilir dalam rangka pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

2.2.7. Kenaikan Angka Kemiskinan dan Pengangguran

Dampak dari krisis ekonomi yang sampai saat sekarang masih dirasakan, telah menyebabkan terganggunya kondisi kehidupan masyarakat, terutama dalam hal pendapatan rumah tangganya oleh karena terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), distribusi barang kebutuhan pokok yang kurang lancar sehingga harga menjadi tidak stabil, semakin rendahnya kualitas konsumsi gizi masyarakat sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan gizi terutama pada balita dan ibu hamil, semakin terbatasnya kemampuan masyarakat untuk membiayai pendidikan dan semakin beratnya beban ekonomi rumah tangga sehingga anak-anak yang berada pada usia sekolah terancam putus sekolah oleh karena harus bekerja dan tidak bersekolah karena tidak ada biaya, dan berbagai permasalahan social lainnya yang berimplikasi cukup jelas.

Kondisi sebagaimana tersebut di atas telah semakin memperburuk kondisi perekonomian Kabupaten Rokan Hilir dimana dari pertumbuhan ekonomi sebelum pada masa krisis dapat mencapai 9,00 persen pertahun, namun sejak terjadinya krisis laju pertumbuhan ekonomi yang dicapai hanya sekitar 5,20 persen pertahunnya. Hal ini telah menjadikan distribusi pendapatan menjadi semakin tidak merata dimana 40% penduduk yang berpenghasilan rendah hanya menerima 17,25 persen dari jumlah pendapatan. 40% persen dari jumlah penduduk yang berpenghasilan menengah menerima 30,40 persen dari jumlah pendapatan, sedangkan yang berpendapatan tinggi yaitu 20 persen dari jumlah penduduk menerima 52,35 persen.

Kepincangan yang sangat tinggi tersebut sebagai akibat dari terjadinya krisis ekonomi telah semakin memperbanyak keluarga miskin dimana dari hasil pendataan BKKBN bahwa sampai tahun 2000 jumlah keluarga yang miskin karena alasan ekonomi (Pra Sejahtera dan Sejahtera-1) mencapai 39,40 persen dari jumlah keluarga yang di data sebanyak 77.638 KK.

Dalam rangka untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran adalah dengan membuka kesempatan kerja yang seluas-luasnya serta memberdayakan ekonomi rakyat. Pemberdayaan ekonomi rakyat disamping dapat memperluas dan mengembangkan usaha untuk meningkatkan produksi, juga akan membuka kesempatan kerja yang akan berpengaruh terhadap kurangnya tingkat pengangguran dan akhirnya akan mengurangi jumlah kemiskinan baik kemiskinan relative maupun kemiskinan absolut.

Dalam upaya memperbaiki tatanan structural perekonomian daerah dan sekaligus untuk mengurangi angka kemiskinan dan jangka ketimpangan social ekonomi, pemerintah

telah membuka peluang yang sebesar-besarnya bagi pemberdayaan ekonomi rakyat. Hal ini secara nyata telah diamanatkan dalam Tap MPR 1998 nomor XVI/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi yang juga memberikan arahan yang lebih tegas tentang pemberian prioritas dan bantuan pengembangan ekonomi rakyat yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pemerintah akan membantu mengembangkan dan memberikan prioritas kepada usaha ekonomi lemah;
- b. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi akan memperoleh kesempatan utama dukungan dan perlindungan serta pengembangan;
- c. BUMN dan Usaha Swasta Besar akan didorong untuk bermitra dengan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi;
- d. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi akan diberi akses terhadap pengolahan tanah terutama di bidang pertanian termasuk kehutanan dan perkebunan;
- e. Usaha Kecil Menengah dan Koperasi juga diberi kesempatan untuk mengakses sumber dana dari perbankan dan lembaga keuangan yang lainnya.

Komitmen itu juga tertuang dalam Tap. MPR nomor XV/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang menyebutkan bertanggung jawab transparan terbuka dan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang luas kepada Usaha Kecil Menengah dan koperasi. Masalahnya adalah bagaimana pemerintah dalam menterjemahkan amanat MPR tersebut dalam berbagai bentuk kebijakan baik kebijakan makro maupun sektoral dan bagaimana cara menghindari penyalahgunaan amanat tersebut untuk menghindari kepentingan politik jangka pendek dari pemerintah maupun kepentingan golongan.

Memperhatikan kondisi perkembangan serta berbagi masalah tantangan dan kendala yang dihadapi, maka upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran perlu diarahkan untuk mendorong terjadinya perubahan structural yaitu dengan memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat khususnya yang tergabung dalam masyarakat marginal dalam bentuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi di dalam perekonomian daerah. Perubahan structural ini meliputi proses perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern dari ekonomi lemah ke ekonomi tangguh, dari ekonomi subsistem ke ekonomi pasar dari ketergantungan ke mandirian. Perubahan structural ini mengisyaratkan bahwa langkah-langkah dasar tersebut meliputi pengalokasian sumberdana, penguatan kelembagaan, penguasaan teknologi serta pemberdayaan sumber daya manusia. Sebagai implementasi dari strategi di atas, maka perlu di lakukan beberapa langkah strategis sebagai berikut :

- a. Mengupayakan peluang akses yang lebih besar kepada asset produksi yang paling penting adalah akses kepada sumber dana. Tersedianya injeksi dan yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat digunakan untuk pemupukan modal secara berkesinambungan;
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan dalam perekonomian sangat lemah dalam persaingan yang tidak seimbang keuntungan akan jatuh pada pengusaha besar. Keadaan ini harus diperbaiki. Untuk itu pertama-tama rakyat harus dibantu dengan prasarana dan sarana perhubungan yang akan memperlancar pemasaran produknya. Selain dari itu yang tidak kalah pentingnya adalah memperkuat pola transaksi dan kemitraan Usaha Kecil Menengah dan Koperasi dengan pendekatan kebersamaan melalui wadah koperasi. Dengan membangun kesetiakawanan dan rasa kebersamaan akan menimbulkan kepercayaan dan harga diri dalam menghadapi era keterbukaan ekonomi;
- c. Meningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia;
- d. Kebijakan pembangunan industri haruslah mengarah pada penguatan industri rakyat yang terkait dengan industri dasar. Industri rakyat yang berkembang menjadi industri kecil menengah yang kuat haruslah menjadi tulang punggung ekonomi daerah. Proses industrialisasi haruslah mengarah kepedesaan dengan memanfaatkan potensi setempat yang umumnya agroindustri;
- e. Kebijakan tenagakerjaan yang mendorong tumbuhnya tenaga kerja mandiri sebagai cikal bakal lapisan wirausaha baru yang berkembang menjadi wirausaha kecil dan menengah yang kuat dan saling menunjang.
- f. Pemerataan pembangunan antar daerah desa dan kota mengingat kegiatan ekonomi rakyat tersebar diseluruh wilayah.

BAB 3

VISI, MISI DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

Visi Pembangunan Daerah

Visi Pembangunan Kabupaten Rokan Hilir selama 5 tahun ke depan yang hendak diwujudkan adalah terwujudnya Rokan Hilir sebagai kawasan andalan perekonomian yang berbasis kerakyatan pada tahun 2006.

Misi Pembangunan Daerah

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir maka misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir adalah :

- 1) peningkatan kualitas sumber daya manusia dan aparatur pemerintah yang dilandaskan oleh iman dan taqwa;
- 2) Pemberdayaan ekonomi rakyat;
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana ekonomi dan social;
- 4) Penataan kelembagaan;
- 5) Peningkatan pembangunan seni budaya olah raga dan peningkatan iman dan taqwa;
- 6) Pelaksanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
- 7) Pelaksanaan Otonomi daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999.

3.3 Strategi Kebijakan

Untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan Kabupaten Rokan Hilir maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah :

- a. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah melalui program pendidikan dan latihan yang disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan daerah;
- b. Memberdayakan ekonomi rakyat melalui peningkatan pembangunan pertanian, industri, pariwisata dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien serta menjadikannya sebagai usaha terpadu dan saling menunjang dengan pembangunan sector lain guna meningkatkan pendapatan penduduk terutama penduduk miskin;
- c. Meningkatkan pembangunan prasarana wilayah untuk kelancaran pembangunan serta pengembangan potensi wilayah;

- d. Meningkatkan dan memberdayakan aparatur dan Pemerintahan Daerah Kabupaten;
- e. Melaksanakan Otonomi Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 dan Nomor 25 tahun 1999.

BAB 4

ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS DAERAH

4.1 Umum

Pembangunan daerah diselenggarakan secara bertahap dalam jangka panjang dan jangka menengah lima tahunan, dalam pelaksanaannya mendayagunaan seluruh sumber daya daerah untuk mewujudkan pembangunan Daerah. Dalam melaksanakan pembangunan daerah terutama diperhatikan adalah azas kemandirian, yaitu bahwa pembangunan daerah berlandaskan kepercayaan dalam kemampuan dan kekuatan sendiri serta bersendikan kepribadian bangsa. Azas manfaat menghendaki bahwa segala usaha dan kegiatan pembangunan daerah memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pribadi warga Negara, mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkesinambungan dan berkelanjutan.

Rencana Pembangunan daerah ini bersifat indikatif yang hanya memberikan arahan secara umum terhadap apa yang akan dituju, sasaran yang akan dicapai dan skala prioritas yang akan ditempuh. Oleh karena itu sesuai dengan sifatnya yang indikatif, maka sasaran yang diperkirakan untuk dicapai tidaklah kaku, tetapi akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan keadaan.

4.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah sendi atau azas dari kebijakan yang akan dijalankan selama periode 2001-2005. Oleh karena itu, maka kebijaksanaan pembangunan Kabupaten Rokan Hilir kedepan adalah:

1. Membangun infra struktur untuk memperlancar mobilitas manusia dan barang merupakan hasil pertanian, serta mengembangkan daerah sebagai sentral produksi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui:

- a. Peningkatan ruas jalan ke ibukota kecamatan, dalam rangka membuka isolasi daerah.
 - b. Meningkatkan ruas jalan ke kawasan industri.
 - c. Membangun aksesibilitas wilayah potensial menuju lokasi pengolahan dan pasar.
2. Optimalisasi potensi sumber daya pertanian secara efisien, dengan:
- a. mengembangkan dan meningkatkan produksi dan produktivitas sektor unggulan khususnya perkebunan dan tanaman pangan, dan perikanan sebagai pemasok utama bagi kebutuhan masyarakat ataupun industri dan sebagai komoditi yang kompetitif dalam persaingan pasar global.
 - b. Meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta informasi pasar.
 - c. Memanfaatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan sector pertanian dalam arti luas.
 - d. Mengembangkan dan mengoptimalkan lahan tidur dan lahan terlantar, untuk peningkatan pertanian.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) serta iman dan taqwa (IMTAQ), terutama agar dapat mengisi peluang usaha yang ada, melalui:
- a. Meningkatkan kualitas penyediaan prasarana dan sarana pendidikan yang ada pada jalur sekolah maupun luar sekolah secara memadai agar sejalan dengan pertumbuhan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berwawasan IPTEK dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja.
 - b. Meningkatkan pelayanan kesehatan dan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga kesehatan dan pembinaan gizi keluarga.
 - c. Membina secara intensif terhadap angkatan kerja khususnya tenaga kerja tempatan serta penanggulangan pengangguran dan pemutusan hubungan kerja.
 - d. Mengembangkan usaha kecil, menengah dan koperasi untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
 - e. Mengembangkan aspek social budaya masyarakat dalam rangka membangun dan mengembakan nilai-nilai social baru yang berkenaan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti pengembangan wawasan, etos kerja, dan semangat berkarya.

- f. Meningkatkan pendidikan agama, serta meningkatkan apresiasi kesenian dan budaya daerah, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berwawasan iman dan taqwa (IMTAQ).
4. Mengembangkan industri yang berbasis pertanian dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup:
 - a. Mengembangkan Kawasan-kawasan industri.
 - b. Membangun sarana dan prasarana utilitas yang mendukung kawasan industri.
 - c. Menumbuh kembangkan industri rumah tangga dan kerajinan yang berorientasi pasar.
 - d. Membangun kerjasama dengan daerah Kabupaten/kota lain sebagai peluang pasar bagi produk-produk industri Kabupaten Rokan Hilir.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan:
 - a. Menumbuhkembangkan kelembagaan yang ada di desa, agar dapat berperan aktif dalam pembangunan;
 - b. Melibatkan peran serta aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan serta pengawasan pembangunan;
 - c. Menggerakkan kembali sifat gotong royongan di tengah masyarakat dalam rangka pembangunan di pedesaan.
6. Memberdayakan pemerintah daerah dengan :
 - a. Melaksanakan otonomi secara nyata dan efektif;
 - b. Meningkatkan kualitas aparatur daerah untuk mendorong pemerintahan yang efektif;

4.3. Prioritas Daerah

Berdasarkan analisis terhadap lingkungan internal yang dimiliki dan lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan pembangunan daerah dalam pendapatan visi dan misi, maka Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir untuk periode 2001- 2005 menentukan prioritas pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia baik dari segi moral maupun kemampuan teknis sebagai landasan kekuatan utama yang harus dibangun dalam menunjang seluruh cita-cita yang ingin diwujudkan;

2. Peningkatan system manajemen pemerintahan kearah system manajemen yang transparan, konsisten dan akuntabel untuk mewujudkan citra pemerintahan yang baik (Good Governace);
3. Peningkatan kemampuan aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai factor pendukung keandalan system manajemen pemerintahan yang ingin diwujudkan;
4. Pengembangan ekonomi rakyat kearah system perekonomian yang tangguh berbasis pertanian dan sumber daya local lainnya menuju agrobisnis dan agroindustri secara modern;
5. Peningkatan peran serta masyarakat swasta dan pemerintah dalam menumbuhkembangkan investasi yang dibutuhkan melalui pola kemitraan yang kondusif demi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil- hasilnya dengan cita-cita yang diinginkan;
6. Pembangunan dan penataan lingkungan hidup secara serasi dan seimbang demi terjaganya kelestarian lingkungan yang memberi daya dukung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat yang berkesinambungan.

BAB 5

PROGRAM DAN PRIORITAS LIMA TAHUNAN DAERAH

5.1 BIDANG EKONOMI

5.1.1 Pertanian dan Kehutanan

A. Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. Umum

Kegiatan pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Rokan Hilir cukup potensial, terutama bila dilihat dari luas lahan yang dapat dikembangkan untuk tanaman pangan dan hortikultura. Produksi pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari padi, palawija, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Dalam beberapa tahun terakhir ini kegiatan tanaman pangan dan hortikultura cenderung meningkat terutama bila dilihat dari luas lahan dan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

Selama periode 1999 luas panen tanaman padi sawah dan padi lading masing-masing seluas 27.795 hektar dan 727 hektar, sedangkan produksi padi sawah dan padi lading masing-

masing sebesar 125.841,85 ton dan 1.242,64 ton. Disisi lain produksi palawija yang meliputi jagung sebesar 1.933,32 ton, ketela pohon 7.645,06 ton, ketela rambat 460,84 ton, kacang tanah 114,96 ton, kedelai 1.043,95 ton, dan kacang hijau 10,20 ton. Sedangkan produksi buah-buahan tahun 1999 sebesar 1.236,70 dan produksi sayur-sayuran sebesar 3.872,80 ton.

Tabel 5.1 : Luas panen dan produksi serta produktivitas tanaman Padi, palawija, Buah-buahan dan sayur-sayuran Tahunan 1999.

Komoditi	Panen (Ha)	Produksi (ton)
1. Padi		
a. Padi sawah	27,795	125,841,85
b. Padi Ladang	727	1,242,64
2. Palawija		
a. Jagung	871	1.933,32
b. Ketela rambat	443	7,645,06
c. Ketela rambat	75	460,84
d. Kacang Tanah	97	114,96
e. Kedelai	601	1.043,95
f. Kacang Tanah	10	10.20
3. Buah-Buahan		
a. Mangga	23,84	25.80
b. Rambutan	65,14	65.00
c. Jeruk	15,35	15.80
d. Durian	56,33	76.40
e. Sawo	21,93	20.50
f. Pepaya	6,86	155.40
g. Pisang	96,86	650.00
h. Jambu Biji	21,97	22.30
i. nenas	12,47	211.50
j. Manggis	8,27	21.00
4. Sayur-Sayuran		

a. Sawi	22,00	112.20
b. Tomat	9,00	32.50
c. Bayam	60,00	395.30
d. Kangkung	80,00	424.40
e. Labu Siam	5,00	49.00
f. Terung	96,00	428.80
g. Kacang Panjang	214,00	1504.20
h. Cabe	157,00	374.50
i. Ketimun	58,00	551.90

Sumber: Rokan Hilir dalam angka, 1999

Mengamati tingkat harga pokok-pokok pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Rokan hilir selama beberapa tahun terakhir relative meningkat. Akan tetapi peningkatan harga ini tidak sebanding dengan kenaikan produk pertanian tanaman pangan tidak meningkatkan pendapatan petani walaupun harga produk pertanian tanaman meningkat.

Untuk melihat prospek dan arah kebijaksanaan (strategi) yang akan dibuat pada masa yang akan datang, aspek lingkungan internal dan eksternal dapat dijadikan dasar kajian. Dilihat dari aspek lingkungan internal, kekuatan pertanian tanaman pangan menunjukkan bahwa lahan pertanian tanaman pangan cukup potensial, sumber tenaga kerja manusia secara kuantitas juga cukup tersedia. Namun, sebagian besar budayamasyarakat desa masih berorientasi pada budaya agraris. Sedangkan kelemahan pertanian tanaman pangan adalah konservasi lahan pangan yang potensial menjadi lahan untuk kegiatan non pertanian tanaman pangan, masih terbatasnya kemampuan petani baik dilihat dari manajemen usaha tani, teknologi, finansial maupun wawasannya.

Dari lingkungan eksternal, peluang pertanian tanaman pangan adalah: masih terbukanya peluang pasar untuk produk-produk tanaman pangan, semakin meningkatnya teknologi pertanian tanaman pangan, adanya dukungan pemerintah terhadap pengembangan tanaman pangan. Ancaman pertanian tanaman pangan adalah: semakin besarnya jumlah produk-produk tanaman daerah atau Negara lain yang masuk, dimana produk-produk tanaman daerah atau Negara lain mempunyai daya saing yang lebih kompetitif.

Kegiatan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Rokan Hilir, sebagian besar tampaknya masih mengandalkan system pengairan tadah hujan. Dengan demikian maka produktifitas lahan juga masih rendah, keadaan ini diperburuk lagi oleh teknologi yang digunakan yang masih terbatas, seperti terbatasnya penggunaan input modern (seperti

pupuk, bibit dan pestisida). Disamping itu, pasar untuk produk-produk pertanian tanaman pangan belum dapat bersaing baik di pasar rasional maupun internasional, hal ini disebabkan oleh kualitasnya yang relative rendah serta harga yang relative tinggi.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pembangunan pertanian dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien serta menjadikannya usaha yang terpadu dan saling menunjang dengan pembangunan disektor lain terutama pembangunan industri, pembangunan pedesaan serta peningkatan ekonomi rakyat;
- b. Meningkatkan usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi dan rehabilitasi pertanian secara terpadu disesuaikan dengan kondisi tanah, air, prasarana dan iklim dengan tetap memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Menjadi kawasan andalan produksi padi sebagai kawasan sentral produksi dengan memperhatikan lebih serius aspek penunjang pertanian seperti irigasi dan alat mekanisme pertanian;
- d. Mempertahankan sumber daya lahan potensial untuk pengembangan pertanian tanaman pangan dan sekaligus mengantisipasi pengalihan fungsi lahan tersebut ke non-pangan;
- e. Memberdayakan institusi pertanian yang ada sehingga mampu memberikan pelayanan yang baik kepada petani atau meningkatkan kinerja kelembagaan pertanian.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan diversifikasi pangan dan gizi, bertujuan untuk meningkatkan diversifikasi pangan yang mencakup aspek produksi, ketersediaan dan konsumsi dengan mengutamakan peningkatan ketersediaan dan aksesibilitas serta perbaikan konsumsi pangan di tingkat rumah tangga dalam rangka mencapai skor mutu Pola Pangan Harapan (PPH) yang semakin baik dan berimbang;
- b. Program pengembangan kelembagaan pangan yang bertujuan untuk menyempurnaan dan mengembangkan kelembagaan pangan dalam rangka menjamin peningkatan produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan yang lebih beragam serta meningkatkan efektivitas pelaksanaannya;
- c. Program pengembangan potensi lahan pertanian yang bertujuan untuk lebih mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang masih belum digarap;

- d. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas petani agar dapat mengelola usaha pertanian secara professional;
- e. Program peningkatan ketahanan pangan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kabupaten dalam memenuhi kebutuhannya sendiri terhadap berbagai kebutuhan akan produk-produk pertanian tanaman pangan dalam rangka peningkatan gizi masyarakat;
- f. Program pengembangan agribisnis komoditas pertanian tanaman pangan bertujuan untuk memacu peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada masyarakat pedesaan;
- g. Program pengembangan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan dan profesionalisme aparatur dan petani;
- h. Program pengembangan informasi dan statistic tanaman pangan dan horticultural agar tersedia dan tersusunnya data dan informasi yang akurat tentang kondisi dan potensi tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Program pengembangan system dan usaha pengolahan tanaman pangan dan holikultural yang dapat mendorong terciptanya system dan usaha pengolahan hasil kelembagaan permodalan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil;
- j. Program rehabilitasi prasarana pertanian tanaman pangan dan horticultural;
- k. Program penelitian dan pengembangan usaha pertanian;
- l. Program pembinaan dan peningkatan SDM penyuluh pertanian;

B. Perkebunan

1. Umum

Perkebunan mempunyai kedudukan yang penting di dalam pengembangan pertanian baik ditingkat nasional maupun regional Perkembangan kegiatan perkebunan di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan trend yang meningkat.Hal ini dapat dilihat dari semakin luas nya lahan perkebunan .meningkatnya Hal ini dapat dilihat dari semakin luasnya lahan perkebunan meningkatnya produksi dan semakin beragamnya jenis tanaman perkebunan yang ada di Rokan Hilir.

Tanaman perkebunan yang merupakan tanaman perdagangan yang cukup potensial di daerah ini adalah karet , kelapa sawit , kelapa, kopi, dan coklat. Adapun luas tanaman tersebut masing-masing adalah 38.756 hektar, 122.035 hektar, 5.944 hektar, 1.054 hektar, dan 479 hektar. Adapun produksinya masing-masing sebesar 11.493 ton, 327.473 ton, 2.601 ton, 212 ton dan 134 ton.

Table 5.2 : Luas Panen dan Produksi Perkebunan Rokan Hilir 1999

Komoditi	Panen (Ha)	Produksi (Ton)
1. Karet	38.756	11.493
2. Kelapa Sawit	122.035	327.473
3. Kelapa	5.944	2.061
4. Kopi	1.054	212
5. Coklat	479	134

Sumber : Rokan Hilir Dalam Angka 1999

Dilihat dari lingkungan internal dan eksternal, maka pada lingkungan internal kekuatan tanaman perkebunan adalah semakin besarnya minat masyarakat untuk melakukan kegiatan dalam usaha perkebunan adanya perkebunan besar memberikan polarization effect dalam kegiatan usaha perkebunan rakyat dan semakin beragamnya jenis tanaman perkebunan rakyat sedangkan kelemahan tanaman perkebunan ini khususnya perkebunan rakyat adalah belum effisiennya kegiatan perkebunan rakyat, kualitas produk perkebunannya masih relative rendah dan petani selalu menjadi price taker khususnya dalam penentuan harga produk.

Dari lingkungan eksternal peluang tanaman perkebunan adalah semakin kuatnya dukungan pemerintah terhadap usaha perkebunan rakyat tumbuhnya berbagai industri yang membutuhkan bahan baku dari produk perkebunan semakin luasnya pasar produk perkebunan. Sedangkan ancaman perkebunan rakyat adalah semakin menyempitnya lahan untuk perkebunan rakyat dan untuk beberapa produk perkebunan tertentu pasarnya dikuasai oleh Negara lain.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pembangunan perkebunan guna menggerakkan dan memacu kemampuan petani tempatan, peningkatan ekspor dan peningkatan industri hulu dan hilir dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan pendapatan petani;
- b. Pengendalian dan penataan kembali penggunaan lahan perkebunan besar swasta;
- c. Mendorong pengembangan usaha-usaha kemitraan lahan budidaya perkebunan rakyat sebagai langkah awal untuk memperkuat ekonomi kerakyatan dan sekaligus mempersiapkan lahan-lahan potensial yang dapat didayagunakan lembaga-lembaga masyarakat lainnya;

- d. Mengembangkan komoditi-komoditi perkebunan yang lebih bervariasi terutama komoditi local berdaya saing tinggi;
- e. Meningkatkan peran serta aktif petani sehingga berkemampuan melakukan pengolahan usaha perkebunannya yang dikaitkan dengan agroindustri dan agrobisnis serta memperkuat kelembagaan usaha perkebunan;
- f. Meningkatkan kemampuan SDM perkebunan dalam penerapan dan penguasaan teknologi.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan sarana penunjang dan kelembagaan perkebunan;
- b. Program pembangunan , pengembangan dan pembinaan usaha perkebunan rakyat;
- c. Program pengembangan komoditas perkebunan;
- d. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas petani agar dapat mengelola usaha pertanian perkebunan secara professional;
- e. Program pembinaan dan pengendalian usaha perkebunan besar;
- f. Program rehabilitasi perkebunan rakyat;
- g. Program pembinaan dan peningkatan SDM penyuluh perkebunan;
- h. Program peningkatan pengolahan hasil;
- i. Program penelitian dan identifikasi tanaman perkebunan non-konvensional.

C. PETERNAKAN.

1. Umum

Pembangunan subsektor peternakan ditujukan pada upaya untuk meningkatkan populasi dan produksi ternak dalam usaha memperbaiki gizi masyarakat disamping meningkatkan pendapatan peternak.

Usaha peternakan di Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya adalah usaha peternakan rakyat. Usaha tersebut meliputi sapi potong, kambing, kerbau, dan unggas (ayam ras ,buras dan itik) yang merupakan usaha sambilan berskala kecil. Perkembangan populasi ternak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 : Jumlah Ternak, Ternak yang dipotong, Produksi daging dan Telur di Kabupaten Rokan Hilir tahun 1999

	Banyaknya	Ternak yang		
--	-----------	-------------	--	--

Jenis Ternak	Ternak (Ekor)	Dipotong(Ekor)	Daging	Telur
Sapi	5.027	190	47.926	-
Kerbau	701	120	32.150	-
Kambing/Domba	11.366	3.181	41.952	-
Babi	12.574	12.109	667.535	-
Ayam Ras Petelur	1.011	4.260	-	9.503
Ayam Ras Pedaging	5.497	6.660	22.251	-
Ayam Kampung	522.658	1.019.297	1.106.749	574.924
Itik	22.034	35.993	43.573	207.114

Sumber : Rokan Hilir Dalam Angka 1999

Dengan semakin berkembangnya beberapa wilayah Kabupaten Rokan Hilir terutama untuk perkebunan rakyat dan perkebunan besar, sebagai daerah industri perdagangan dan pariwisata, maka prospek pengembangan peternakan ini cukup memberikan harapan ditambah lagi dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan pendapatan masyarakat, sehingga permintaan terhadap produksi peternakan setiap tahunnya terus meningkat. Dengan demikian maka arah pengembangan peternakan unggas lebih ditekankan pada pola social masyarakat untuk termotivasi dalam usaha ternak unggas dan ketersediaan sumber pakan, sarana pendukung (obat-obatan bila diperlukan) dan mengatasi purna jual/komoditi pasar. Sedangkan untuk pola pengembangan peternakan besar (kerbau, lembu, dan kambing) dapat dilakukan dengan memanfaatkan limbah pertanian dan pemanfaatan lahan bebas (semak, belukar, rumput/ alang-alang) yang dapat dikembangkan pola ekstensifikasi dengan ditambah suplai pakan.

2. Arah Kebijakan

- a. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan gizi masyarakat;
- b. Meningkatkan pembangunan peternakan untuk memenuhi kebutuhan protein hewani yang dikonsumsi masyarakat, pengembangan ekspor dan peningkatan pendapatan peternak;
- c. Mendorong pengembangan usaha petani peternak kecil dalam rangka memperkuat ekonomi kerakyatan;
- d. Meningkatkan pembangunan kawasan sentra produksi dan pembibitan ternak;
- e. Menciptakan iklim investasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan penanaman modal di bidang usaha peternakan secara terpadu;

- f. Mewujudkan pola penyebaran dan pengembangan wilayah peternakan secara terpadu;
- g. Melakukan pembinaan sarana produksi ternak (saprotrak).

3. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan peternakan rakyat terpadu yang bertujuan untuk mewujudkan peternakan berkualitas, sikap mandiri, dan pengelolaannya secara optimal dan berkelanjutan;
- b. Program diversifikasi pangan dan gizi yang bertujuan meningkatkan dan mengembangkan diversifikasi hasil ternak dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat;
- c. Program peningkatan dan pengembangan usaha ternak adalah upaya meningkatkan pengembangan dan produksi peternakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi;
- d. Program pembangunan sumber daya, sarana dan prasarana peternakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas agar terwujudnya sistem informasi dan dukungan prasarana peternakan;
- e. Program pengembangan dan pembinaan agribisnis yang bertujuan untuk memacu peningkatan pendapatan/kesejahteraan peternak dalam pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada masyarakat pedesaan;
- f. Program penjaminan keamanan dan hasil ternak;
- g. Program pembinaan daerah potensial peternakan;
- h. Program pengembangan kawasan produksi peternakan;
- i. Program peningkatan usaha dan industri peternakan;
- j. Program pengembangan pembinaan kelembagaan dan kemitraan;
- k. Program pembinaan dan peningkatan SDM Pembina ternak;
- l. Program penelitian dan pengembangan ternak.

D. PERIKANAN

1. Umum

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil perikanan. Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan yang cukup luas, memegang peranan penting dalam meningkatkan

pendapatan daerah. Disamping itu juga memberikan kontribusi bagi pendapatan para nelayan di Kabupaten.

Program pembangunan usaha perikanan diarahkan pada upaya peningkatan produksi dan peningkatan pendapatan nelayan/petani ikan dalam rangka meningkatkan taraf hidup nelayan/petani ikan, pemenuhan kebutuhan konsumsi ikan masyarakat memperluas kesempatan berusaha dan meningkatkan ekspor.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan daerah yang memiliki potensi untuk berkembangnya produksi dan pemasaran hasil perikanan. Secara historis kabupaten ini merupakan penghasil ikan terbesar khususnya Kecamatan Bangko dan Kecamatan Kubu. Hasil ekspor komoditi ikan yang berasal dari wilayah perairan yang cukup luas, memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan daerah. Disamping itu juga memberikan kontribusi bagi pendapatan para nelayan di Kabupaten Rokan Hilir.

Produksi perikanan di daerah Rokan Hilir sebagian besar berasal dari perikanan laut. Data menunjukkan bahwa dari sejumlah 75.795,9 ton produksi ikan, 73.146,4 ton (96,50%) merupakan perikanan laut, sedangkan sisanya sebesar 2.649,5 ton (3,5%) merupakan perikanan air tawar. Jumlah rumah tangga perikanan laut sebanyak 5.382 rumah tangga perairan umum 1.377 rumah tangga dan budidaya 721 rumah tangga.

Tabel 5.4 : Perkembangan Budidaya Perikanan, Rumah Tangga, Perikanan dan Armada Penangkapan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 1999.

Uraian	Jumlah
1. Budidaya Ikan	
a. Kolam (Ha)	121,7
b. Tambak (Ha)	-
c. Kerambah (Unit)	176
2. Rumah Tangga Perikanan (RTP)	
a. Laut	5.382
b. Perairan Umum	1.377
c. Budidaya Kolam	721
3. Produksi Perikanan	
a. Ikan Laut	73.146,4
b. Ikan Air Tawar	-
4. Armada Pengkapan	

a. Perahu Tanpa Motor (PTM)	454
b. Motor Diesel	1.734
c. Motor Tempel	550

Sumber : Rokan Hilir Dalam Angka 1999

Melihat pada kondisi perikanan Kabupaten Rokan Hilir isu strategis pembangunan perikanan adalah semakin berkurangnya penyediaan sumber daya perikanan belum dimanfaatkannya teknologi maju dalam pengembangan usaha perikanan kurang memadainya penyediaan sarana dan prasarana penunjang usaha perikanan masih banyak nelayan yang tergantung pada tengkulak penyalahgunaan izin daerah operasi dan penggunaan alat tangkap dan kurangnya keterlibatan nelayan dalam proses pemasaran hasil perikanan dan minimnya petugas perikanan di sentral kegiatan perikanan.

2. Arah Kebijakan

- a. meningkatkan pembangunan perikanan dalam kerangka ekspor pengembangan industri pengolahan dan pemanfaatan sumber daya secara efisien dan efektif serta peningkatan pendapatan nelayan;
- b. mengembangkan kegiatan budidaya perikanan baik kolam maupun keramba yang memiliki potensi cukup besar untuk dikembangkan;
- c. Mengembangkan usaha-usaha perikanan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan;
- d. Meningkatkan penganekaragaman produk pengolahan hasil perikanan baik melalui industri skala besar maupun skala rumah tangga.

3. Program Pembangunan.

- a. Program pembangunan usaha perikanan;
- b. Program diversifikasi usaha dan komoditas perikanan;
- c. Program pembinaan dan pengembangan usaha perikanan;
- d. Program pembinaan dan peningkatan SDM pengelola perikanan;
- e. Program penelitian dan pengembangan;
- f. Program pembangunan masyarakat pantai dan pengelolaan sumber daya perikanan;
- g. Program peningkatan sarana dan prasarana perikanan.

E. KEHUTANAN

1. Umum

Perkembangan kehutanan mencakup semua upaya untuk memanfaatkan dan memantapkan fungsi sumber daya alam hutan dan sumber daya alam hayati lainnya serta ekosistemnya, baik sebagai pelindung system penyangga kehidupan dan pelestarian keanekaragaman hayati maupun sumber daya. Pembangunan kehutanan meliputi aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan social, baik dalam hutan Negara maupun disekitar kawasan hutan.

Apa yang dikemukakan diatas ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat sebaiknya, hilang atau berkurangnya tiga fungsi hutan utama yaitu fungsi ekonomi (dalam jangka panjang , fungsi lindung dan fungsi estetike. Gambaran tentang keadaan hutan secara nasional ini tidak berbeda dengan keadaan hutan di Kabupaten Rokan Hilir. Proses hancurnya hutan ini telah dimulai sejak tahun 1967. Eksploitasi hutan secara besar- besaran oleh para pengusaha hutan baik dalam rangka mendapatkan dana segar untuk pembangunan diawal pemerintahan Orde Baru maupun dalam rangka industrilisasi kehutanan.

Secara umum isu strategis pembangunan kehutanan antara lain adalah rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap manfaat hutan terutama tentang pelestarian hutan, lemahnya pengendalian dan pengawasan terhadap kerusakan hutan , pemanfaatan kawasan hutan tidak mengacu pada ketentuan yang berlaku serta kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia kehutanan.

2. Arah Kebijakan

Arah kebijakan kehutanan adalah pemberdayaan ekonomi rakyat terutama di sekitar kawasan hutan melalui kegiatan atau pengembangan fungsi social hutan dan membangun ekonomi kerakyatan melalui redistribusi assets dan mengembalikan property right masyarakat lokal atas pengelolaan hutan.

3. Program Pembangunan

- a. Program perencanaan dan pengembangan kehutanan secara terencana dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- b. Program perlindungan hutan dan pengawasan pengendalian kerusakan hutan;
- c. Program penyelamatan hutan, tanah dan air yang bertujuan untuk memulihkan kondisi hutan (menjaga kelestarian lingkungan dan sekaligus sebagai daerah tangkapan air);

- d. Program lahan rehabilitasi krisis yang bertujuan untuk memulihkan kondisi lahan yang sudah krisis akibat eksploitasi sumber daya hutan;
- e. Program pemantapan kawasan hutan dan upaya peningkatan produktifitas hutan alam;
- f. Program penghijauan kota dalam upaya mewujudkan kota yang asri sebagai paru-paru kota dan daerah tangkapan air.

Sumber Daya Air dan Irigasi

1. Umum

Pendayagunaan sumber daya alam adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dilakukan secara terencana, regional, optimal, bertanggung jawab dan sesuai dengan kemampuan daya dukungannya serta tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup bagi pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian, pembangunan pengairan di Kabupaten Rokan Hilir mencakup segala upaya mengembangkan pemanfaatan, pelestarian dan perlindungan air beserta sumbernya dengan perencanaan yang terpadu dan serasi guna mencapai manfaat sebesar-besarnya dalam memenuhi hajat hidup dan perikehidupan rakyat. Pembangunan bidang pengairan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat dan semakin memudahkan rakyat mendapatkan dan memanfaatkan air untuk keperluan hidupnya. sumber air di Kabupaten Rokan Hilir berasal dari :

- a. Curah hujan langsung yang mencapai 1.143,8-2.710 mm/tahun;
- b. Sumberdaya air yang berasal dari permukaan berupa mata air, sungai danau, waduk/dam serta rawa;
- c. Sumberdaya air yang berasal dari air tanah yang meliputi air tanah dangkal/air tanah bebas/semi artesis dan air dalam/artesis.

Permanfaatan dan pengaturan air beserta sumber-sumbernya meliputi usaha penyediaan dan pengaturan air guna menunjang usaha pemukiman, pembangunan pertanian, industri, pariwisata dan kehutanan, pengaturan penyediaan air minum, air untuk industri dan pencegahan terhadap pencemaran atau pengotoran air serta pengembangan daerah rawa.

Pembangunan pengairan harus dilaksanakan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi dengan sector lainnya, agar diperoleh manfaat yang optimal, Tata guna air dan tata guna tanah serta kehutanan diselenggarakan secara terpadu sehingga menjamin fungsi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dengan berpedoman pada pengertian-pengertian diatas, maka pembangunan pengairan di Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan melalui peningkatan, perluasan dan pembaharuan usaha pengembangan sumber daya air dan upaya pelestarian serta distribusinya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memenuhi kebutuhan air untuk hajat hidup rakyat, untuk itu maka pelaksanaannya harus terpadu dan memperhatikan pembangunan pada sector lainnya. Sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya kesadaran akan kelestarian lingkungan hidup, berkembangnya wilayah dan daerah, serta berkembangnya sector pertanian, perindustrian dan sector ekonomi lainnya semua itu membutuhkan perhatian khusus terutama pada konservasi dan rehabilitasi lahan krisis pemeliharaan wilayah peresapan dan daerah aliran sungai serta sumber air lainnya.

2. Arah Kebijakan

- a. Pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air untuk menunjang ketahanan pangan dan kebutuhan air baku;
- b. Pengamanan sumber daya air dalam rangka melindungi kawasan budidaya (pemukiman, pertanian, industri dan lain-lain);

3. Program Pembangunan

- a. Program pengelolaan air sungai, danau dan sumber air lainnya serta perbaikan dan pengamanan sungai yang bertujuan untuk pengendalian banjir, terutama menyediakan air baku dan perlindungan pemukiman dari bahaya banjir;
- b. Program pengembangan dan konservasi sumber daya air dilakukan diseluruh kecamatan dengan tujuan untuk mengumpulkan data hidrometri, klimatologi serta membentuk sistem pendataan sumber air;
- c. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Program pengembangan dan pengelolaan daerah rawa;
- e. Program penyediaan dan pengelolaan air baku.

Industri

1. Umum

Pembangunan industri di Kabupaten Rokan Hilir dikembangkan melalui pendayagunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia secara efisien. Peranan industri pengolahan di

dalam struktur ekonomi cukup besar, terutama dalam menyerap tenaga kerja. Kegiatan industri pengolahan adalah bagian dari kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi dan atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi.

Pembangunan sector industri diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat dan mempunyai daya tahan dan keunggulan kompetitif. Pembangunan industri diarahkan untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas.

Pembangunan industri diarahkan untuk meningkatkan keunggulan komperatif daerah. Pembangunan industri dikembangkan secara bertahap dan terpadu melalui peningkatan keterkaitan antar industri dan antara industri dengan sector ekonomi lainnya, melalui penciptaan iklim yang lebih kondusif dan pengembangan kawasan industri sesuai dengan pola tata ruang. Industri yang mengolah bahan baku dari hasil pertanian yang didukung oleh komponen dan bahan penolong yang berasal dari sumber daya lokal terus dikembangkan untuk mencapai struktur industri yang efisien dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Perkembangan industri di Kabupaten Rokan Hilir diharapkan mampu mendukung tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat di sisi lain serapan tenaga kerja juga akan memberikan peluang bagi masyarakat setempat misalnya industri perkapalan yang telah lama berkembang memberikan peluang tenaga local dan sampai saat ini masih tetap berjalan. Perkembangan jenis industri di Kabupaten Rokan Hilir sampai dengan tahun 1998 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.5 : Jenis dan Jumlah Industri di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 1994-1998

Jenis Industri	1994	1995	1996	1997	1998
1. Industri rumah tangga, makanan dan minuman	23	29	38	49	49
2. Industri Kecil	2	2	2	3	3
3. Industri Menengah	9	16	19	22	22
4. Industri Besar	-	-	5	4	4

Sumber : Profil Kabupaten Rokan Hilir 2000

Pembangunan industri terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga mampu mendukung pembangunan pertanian di daerah pedesaan. Termasuk industri kecil dan menengah, kerajinan dan industri rumah tangga menjadi usaha yang efisien dan mandiri, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan

semakin berperan dalam penyediaan barang dan jasa baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri.

2. Arah Kebijakan

- a. Mendorong pengembangan industri yang mempunyai keunggulan komperatif terutama yang berbasis keunggulan sumber daya alam khususnya pertanian, kelautan dan perikanan untuk peningkatan devisa maupun kesempatan kerja serta pengembangan ekonomi rakyat;
- b. Mengembangkan infrastruktur dan kemudahan-kemudahan untuk memperbesar peluang investasi;
- c. Mengembangkan industri kecil dan rumah tangga dalam rangka penciptaan lapangan kerja di daerah pedesaan maupun perkotaan serta pengembangan ekonomi kerakyatan;
- d. Mendorong investasi industri besar yang dapat menciptakan keterkaitan dan kemitraan usaha dengan usaha industri kecil dan rumah tangga;
- e. Pengembangan industri yang mempunyai akses ke pasar global dan untuk memberdayakan ekonomi masyarakat terutama yang berada di daerah pedesaan;
- f. Pengembangan kawasan industri dan kegiatan industri yang berteknologi malu dan mempunyai keunggulan komperatif yang mendorong pemanfaatan bahan baku local;
- g. Mengoptimalkan pemanfaatan infrastruktur fisik yang telah ada dan menciptakan kondisi yang kondusif untuk memperbesar peluang investasi di bidang industri;
- h. Menumbuhkembangkan industri kecil dan industri rumah tangga di daerah pedesaan dalam rangka perluasan kesempatan berusaha penciptaan lapangan kerja dan pengembangan potensi ekonomi rakyat dengan memperbesar akses terhadap produksi barang-barang modal teknologi dan informasi pasar.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembinaan kawasan industri adalah dimaksudkan agar kawasan-kawasan industri yang ada dapat terus berkembang sesuai dengan tuntutan pasar dan agar lebih kompetitif serta memiliki nilai keunggulan komperatif;
- b. Program alih teknologi yang dimaksudkan agar adanya proses industrialisasi diikuti oleh adanya proses alih teknologi dari investor kepada masyarakat local;

- c. Program pembinaan dan pengembangan industri rumah tangga/kecil dan menengah yang bertujuan untuk meningkatkan peranan industri rumah tangga/kecil ini dalam perekonomian;
- d. Program pembinaan kemitraan adalah bertujuan untuk meningkatkan hubungan kemitraan atas dasar saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan antara industri kecil-menengah dengan industri besar;
- e. Program peningkatan kemampuan teknologi industri dengan maksud untuk meningkatkan keterampilan dan penerapan teknologi bagi industri rumah tangga dan kecil-menengah dengan penerapan teknologi tepat guna serta mengupayakan penyebarluasan informasi teknologi tepat guna bagi industri rumah tangga kecil dan menengah.

Perdagangan

1. Umum

Perdagangan merupakan sector yang cukup besar peranannya, terutama dalam rangka meningkatkan aktivitas perekonomian daerah, untuk memenuhi konsumsi dalam negeri dan peningkatan ekspor . Kontribusi sector perdagangan dalam PDRB Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan peningkatan, pada tahun 1993 kontribusi perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 83,95 miliar, meningkat pada tahun 1999 menjadi sebesar Rp 244,48 miliar. Sedangkan kontribusi perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 1999 adalah meningkat sebesar 26,98 persen dengan laju pertumbuhan rata-rata 7,83 persen. Tercapainya laju pertumbuhan sector perdagangan sebesar 7,83 persen adalah sebagian besar merupakan sumbangan dari pengusaha kecil, menengah dan koperasi. Usaha kecil yang sebagian besar dalam bentuk informal merupakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga baru yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan telah berpartisipasi dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Permasalahan secara keseluruhan sector perdagangan, terutama yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan adalah kecilnya nilai tambah yang didapat oleh usaha perdagangan kecil kalau dibandingkan dengan usaha perdagangan yang berskala besar. Disamping itu, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, kurangnya modal, belum optimalnya daya saing dan kualitas serta minimnya informasi pasar terutama untuk ekspor.

2. Arah kebijakan

- a. Meningkatkan informasi pasar dan peluang perdagangan antar daerah dan luar negeri.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan peluang perdagangan antar daerah dan luar negeri (Ekspor).
- c. Memperluas jaringan pemasaran produk yang dihasilkan dengan memanfaatkan institusi perdagangan yang telah ada dan kemajuan teknologi Komunikasi dan Informasi.
- d. Mengembangkan dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perdagangan yang telah tersedia untuk meningkatkan aktifitas perdagangan.
- e. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha kecil dan menengah dan pengembangan kewirausahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha untuk usaha kecil dan menengah.

3. Program pembangunan

- a. Program pengembangan kegiatan perdagangan, terutama dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
- b. Program pengembangan kegiatan kewirausahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada di sector perdagangan.
- c. Program pengembangan usaha perdagangan dan industri, bertujuan untuk mengembangkan system pengawasan dan distribusi serta mementapkan pengadaan dan kebutuhan masyarakat lainnya.
- d. Program pengembangan kerjasama perdagangan regional dan internasional, bertujuan untuk mengembangkan kerjasama perdagangan regional dan internasional dalam rangka memperkuat kedudukan rebut tawar, memperluas pasar luar negeri dan mendorong peningkatan ekspor non migas.
- e. Program kelembagaan dan informasi pasar, untuk mengembangkan sistem kelembagaan dan informasi perdagangan dalam mendukung usaha perdagangan yang efisien dan efektif.
- f. Program pengembangan perdagangan dan sistem distribusi.
- g. Program pengembangan usaha dan lembaga perdagangan.
- h. Program pengembangan perdagangan luar negeri.
- i.

Dunia Usaha

1. Umum

Perkembangan perekonomian di Kabupaten Rokan Hilir tidak dapat dilepaskan dengan peranan dunia usaha yang ada, baik dalam skala yang kecil maupun besar. Jumlah pengusaha di Kabupaten Rokan hilir relative banyak yang keberadaannya tersebar ke seluruh wilayah, sekalipun dalam distribusinya kurang menyebar. Jumlah Investasi tahun 1998 sebesar Rp. 832,96 miliar (26,57 %) dari jumlah PDRB harga berlaku.

Sekalipun telah mengalami kemajuan dan perkembangan yang relative pesat terutama sejak berlakunya otonomi daerah , dengan adanya kekayaan sumber daya alam, Kabupaten rokan Hilir memiliki peluang usaha yang besar sehingga menjadikan daerah ini sebagai tujuan utama bagi berbagai kalangan dunia usaha yang ada di dalam dan di luar Kabupaten rokan hilir untuk dapat melakukan kegiatan ekspansi ataupun dalam rangka realokasi usaha di berbagai bidang dan sector produksi. Akibatnya potensi dunia usaha lokal mendapatkan persaingan yang ketat, bahkan dalam beberapa hal tersisih dalam persaingan tersebut. Kabupaten Rokan Hilir masih memiliki sejumlah potensi sumber daya alam yang masih dapat ditingkatkan dan dikembangkan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat nya, namun kemampuan daerah secara totalitas masih dihadapkan pada sejumlah kendala terutama dalam dalam hal permodalan, teknologi, dan kererampilan sumber daya manusianya. Untuk itu pada masa mendatang kegiatan investasi masih sangat diperlukan , terutama yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas`kehidupan masyarakat dan dalam rangka transformasi teknologi yang dapat diadopsi oleh masyarakat tempatan, serta untuk menghadapi persaingan global yang bukan hanya mengandalkan keunggulan komperatif (Comperative advantage) semata tetapi lebih diutamakan pada keunggulan pada keunggulan dalam persaingan (competitive advantage).

2. Arah Kebijakan

- a. Pengembangan usaha ekonomi daerah diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kemampuan baik secara kelembagaan maupun dalam operasionalisasinya serta pengembangan investasi yang mengarah pada sektor-sektor riil dan menyangkut hajat hidup orang banyak.
- b. Meningkatkan prpmosi investasi kedalam dan luar negeri dalam rangka pengelolaan potensi daerah untuk peningkatan nilai tambah daerah dan kesempatan kerja.

3. Program Pembangunan

- a. Program Pengembangan transparansi proses persaingan usaha dan perlindungan konsumen, dengan sasaran utama adalah memperdayakan masyarakat dan pelaku usaha untuk ikut serta, menilai dan memantau proses persaingan usaha secara sehat, mendorong tumbuhnya jiwa kompetisi berusaha secara sehat tanpa merugikan konsumen atau pihak lain, serta memfasilitasi pemahaman masyarakat luas mengenai supremasi hukum dalam pelaksanaan mekanisme pasar.
- b. Program penguatan Institusi Independen penggerak iklim persaingan usaha secara sehat dengan sarasanya adalah terlembaganya mekanisme pengawasan usaha dan penegakkan hukum terhadap usaha yang tidak sehat.
- c. Program penataan institusi penunjang perdagangan barang dan jasa dengan tujuan untuk mengoptimalkan peran lembaga pemberdayaan usaha dan mengurangi ketertinggalan pengetahuan dan kemampuan pelaku usaha dan membuka peluang kerjasama Internasional.
- d. Program Pembinaan usaha kecil untuk mengembangkan usaha kecil secara terkendali dan terarah.
- e. Program pengembangan penanaman modal daerah yang dilaksanakan melalui penyertaan modal pemerintah serta pembinaan dan pengembangan perusahaan daerah;
- f. Program peningkatan promosi dagang dan investasi yang dilaksanakan melalui pembangunan pusat promosi usaha dan investasi serta pembangunan dan pengembangan system data base dan system informasi dan peluang investasi.
- g. Program pengembangan pusat pelayanan administrasi dan perizinan.
- h. Program pengembangan dan pembinaan institusi-institusi sosial masyarakatan, kelompok usaha, koperasi dan BPR.
- i. Program pembangunan sistem manajemen informasi dan promosi daerah.

5.1.6. Koperasi dan Usaha Kecil- Menengah

1. Umum

Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan salah satu unsure penting dalam pengembangan ekonomi. Ekonomi daerah akan tangguh jika pelaku-pelaku ekonomi secara keseluruhan tangguh. Kalau kinerja koperasi dan usaha kecil menengah tidak sesuai yang diharapkan, maka kekuatan ekonomi daerah juga akan rapuh. Untuk itu kekuatan ekonomi akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, apabila kekuatan sinergi kolektif yang

dinaungi oleh koperasi tumbuh dan berkembang. Koperasi dan usaha kecil menengah merupakan bentuk dan jenis usaha yang digolongkan dalam ekonomi kerakyatan karena sifatnya mandiri dan merupakan usaha bersama. Jumlah Koperasi Unit Desa di Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 27 buah, sedangkan Koperasi non KUD 146 buah. Adapun anggota dari masing-masing Koperasi tersebut adalah 9.800 orang dan 10.086 orang.

Beberapa permasalahan strategis pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah antara lain, kondisi koperasi sebagai soko-guru perekonomian masih belum bersaing secara wajar dengan kekuatan ekonomi lainnya persepsi masyarakat dalam memandang koperasi hanya sebagai sebuah lembaga yang memiliki tekanan sosialnya jauh lebih kuat dari pada tekanan ekonominya masih kurangnya perhatian, pembinaan, pengarahan, bimbingan terhadap usaha kecil dan menengah belum adanya lembaga yang secara khusus menangani kegiatan promosi terhadap produk pengusaha kecil dan menengah masih kurangnya jalinan kemitraan antara pengusaha kecil dan menengah dengan pengusaha besar, kurangnya penataan kegiatan usaha kecil dan menengah.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan usaha kecil, menengah dan koperasi dalam rangka pengembangan ekonomi kerakyatan.
- b. Mendorong kemitraan usaha yang saling membutuhkan, saling mendukung dan saling menguntungkan antara usaha ekonomi kuat dengan usaha ekonomi kecil, menengah dan koperasi.
- c. Mendorong pengembangan lembaga-lembaga pembiayaan dan keuangan untuk mendukung usaha ekonomi kecil, menengah, koperasi dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
- d. Mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah sebagai wadah kolektif yang efisien dan efektif sehingga tumbuhnya sinergikolektif kegiatan ekonomi rakyat yang dapat meningkatkan kegiatan –kegiatan produktif yang mempunyai nilai tambah yang tinggi.
- e. Pembinaan pengembangan koperasi dan UKM secara umum bertujuan untuk membantu mempercepat pelaksanaan ekonomi kerakyatan dalam peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi produktif dalam rangka mendorong peningkatan produktifitas, efisiensi usaha, melalui koperasi dan UKM untuk membentuk masyarakat yang tangguh, mandiri berwirausaha.

- g. Memperkuat kerangka dasar koperasi dan UKM sebagai wadah ekonomi rakyat sekaligus mitra kerja usaha lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam mewujudkan perekonomian nasional.

3. Program Pembangunan

- a. Program perluasan dan perkuatan lembaga pendukung usaha kecil, menengah dan koperasi, yang bertujuan untuk memperluas dan memperkuat peran dan fungsi lembaga-lembaga pendukung yang penting baik dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif maupun meningkatkan produktifitas PKMK, terutama pelaku usaha yang masih tertinggal.
- b. Program pengembangan kewirausahaan dan kewirakopersian , bertujuan untuk meningkatkan kemampuan /keterampilan pengusaha kecil dan menengah yang dijiwai semangat kooperatif.
- c. Program pembinaan kerjasama antara usaha ekonomi kuat dengan usaha ekonomi lemah.
- d. Program pembinaan dan pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah , agar lebih terkendali dan terarah.
- e. Program peningkatan kualitas sumber daya manusia.
- f. Program penguatan lembaga pendukung koperasi, usaha kecil dan menengah.

1.7. Tenaga Kerja

1. Umum

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia berada pada semua sektor dan wilayah menuju terbukanya lapangan kerja dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan mutu dan kemampuan serta perlindungan tenaga kerja yang didukung dari pasar kerja yang memadai.

Berdasarkan SUSENAS Riau 2000, jumlah angkatan kerja di Kabupaten Rokan Hilir adalah 143.150 orang, terdiri dari yang masih bekerja 131.698 dan mencari kerja 11.452 orang. Dari jumlah tersebut, angkata kerja laki-laki berjumlah 116.974 orang, sedangkan angkatan kerja perempuan 26.176 orang.

Sesuai dengan dinamika ekonomi yang berkembang di Kabupaten Rokan Hilir jumlah penduduk yang masih bekerja pada berbagai lapangan usaha tahun 2000, sector pertanian menyerap tenaga kerja terbesar sebanyak 95.706, pertambangan dan galian 818 orang, industri 1.636 orang, konstruksi 2.454 orang, perdagangan 25.358 orang, komunikasi dan transportasi 4.090 orang, dan jasa berjumlah 1.636 orang.

Pembangunan sector tenaga kerja sampai dengan tahun 2005, terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga mampu mendukung pembangunan pertanian, industri, perdagangan, perhubungan, pariwisata dan sumber daya lokal lainnya menjadi usaha yang efisien dan mandiri, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerjam dan makin berperan dalam penyediaan barang dan jasa baik untuk pasar dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian antara lain; kualitas tenaga kerja melalui pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah perlu peningkatan agar mereka memiliki daya saing tinggi, perlindungan terhadap hak-hak mereka sebagai tenaga kerja dan sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan beragama harus diperhatikan, kesempatan yang sama bagi tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan dalam memperoleh pekerjaan perlu diperhatikan, pemberian upah yang sesuai dengan standar upah yang berlaku kepada tenaga kerja dan dengan memperhatikan intensitas pekerjaan mereka, dan penciptaan dan peningkatan jaringan kerja dan sistem informasi bursa tenaga kerja antara lembaga pendidikan tenaga kerja, perusahaan penyalur tenaga kerja, dan perusahaan penerima dan pemakai jasa tenaga kerja.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka untuk men ciptakan dan memperluas pemerataan kesempatan kerja serta kualitas dan kemampuan kerja terutama tenaga kerja tempatan.
- b. Perlindungan tenaga kerja yang meliputi peningkatan kesejahteraan, keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial tenaga kerja, dan jaminan-jaminan kerja lainnya.
- c. Membangun Balai Latihan Kerja yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja daerah terutama tenaga kerja tempatan.
- d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas tenaga kerja yang professional melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta permintaan pasar terhadap tenaga kerja baik untuk kebutuhan lokal dan luar negeri.
- e. Mengembangkan potensi tenaga kerja lokal yang belum mendapat kesempatan kerja ataupun berusaha dengan meningkatkan keterampilan, memperluas pengetahuan dan wawasan serta menumbuhkan etos kerja yang tinggi melalui berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan yang khusus diselenggarakan dengan ditunjang oleh sistem permagangan.

- f. Meningkatkan produktivitas kerja, melalui peningkatan perbaikan kesejahteraan tenaga kerja yang terus menerus, terutama dibidang pengupahan, pengembangan karir dan penegakkan atas hak-hak dan kewajiban untuk memperoleh kepastian guna memberikan suasana nyaman, tenang dan tertib dalam bekerja.
- g. Meningkatkan perlindungan bagi tenaga kerja khususnya keselamatan, kesehatan kerja, jaminan sosial dan bentuk perlindungan tenaga kerja dengan mendorong berkembangnya lembaga perlindungan tenaga kerja dan lembaga penjamin kesejahteraan pekerja.

3. Program pembangunan

- a. Program penciptaan dan pengembangan kesempatan kerja, yang bertujuan untuk menerapkan model-model penciptaan lapangan kerja yang relevan bagi pengetahuan dan keterampilan kerja untuk mengisi lowongan pasar kerja.
- b. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, bertujuan untuk mendorong, memasyarakatkan dan meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, yang sekaligus memperluas kesempatan kerja pada usaha kecil, menengah, koperasi dan lembaga mandiri yang diterima oleh masyarakat.
- c. Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan, bertujuan untuk mendorong terbentuknya lembaga tenaga kerja di perusahaan, dan memperluas jangkauan dan kemampuan berunding agar menghasilkan syarat-syarat kerja yang berkualitas, didasarkan atas musyawarah mufakat dan demokratis.
- d. Program pengembangan fasilitas pelatihan dan perlindungan, yang dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas pelatihan kerja bagi calon tenaga kerja maupun untuk meningkatkan pendidikan tenaga andai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
- e. Program pengawasan tenaga kerja, dengan maksud untuk memberikan pengawasan tenaga kerja agar diperlakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Program pembangunan sistim dan balai latihan kerja.
- g. Program penyebaran dan pendayagunaan tenaga kerja
- h. Program pembinaan hubungan industri dan perlindungan tenaga kerja.

5.18. Pertambangan dan Energi

1. Umum

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan mengelompokkan bahan galian tambang kedalam 3 golongan yaitu bahan galian golongan A

(Bahan galian strategis), golongan B (Bahan galian vital), dan golongan C (Bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B). Bahan galian golongan A yang meliputi minyak dan gas bumi, batu bara, timah, bitumen dan bahan galian radioaktif. Bahan galian golongan B yang adalah bauksit, gambut dan emas. Sedangkan galian golongan C adalah granit, batu gamping, pasir kuarsa, kaolin dan lain-lain.

Potensi sumber daya mineral yang cukup besar di Kabupaten Rokan Hilir adalah berupa bahan galian golongan A (Strategis) yang terdiri dari lading minyak bumi seperti yang terdapat di Kecamatan Tanah Putih dan Rimba Melintang.

Dari keseluruhan potensi bahan galian yang ada, ditandai dengan banyaknya bahan galian saja yang baru dieksploitasi. Perkembangan pertambangan umum di Kabupaten Rokan Hilir relative cukup pesat, ditandai dengan banyaknya perusahaan yang bergerak dibidang ini terutama mengusahakan bahan galian C. Peluang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan pada kegiatan pertambangan cukup besar terutama pada kegiatan bahan galian golongan C.

Energi mempunyai peranan yang sangat penting bagi mendukung pembangunan daerah, terutama untuk mendukung sektor-sektor pembangunan lainnya. Untuk itu maka sasaran pembangunan energi yang cukup, dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Potensi pengembanaan energi di Kabupaten Rokan Hilir sebenarnya relative besar, namun untuk perkembangannya dihadapkan kepada aspek pembiayaan investasi. Oleh karenanya pembangunan energi di Kabupaten Rokan Hilir harus dicarikan jalan keluarnya untuk mengatasi permasalahan penyediaan energi yang cepat dan murah, terutama untuk mendukung pengembangan industri serta pemerataannya keseluruh daerah yang membutuhkan energi.

Seiring dengan pertumbuhan pembangunan daerah, maupun pembangunan sektor-sektor maka permintaan akan energi khususnya listrik akan terus meningkat. Demikian juga dalam beberapa tahun ke depan dengan adanya proses transisi masyarakat perdesaan menjadi masyarakat perkotaan akan mendorong kebutuhan energi, yang diperkirakan akan terus meningkat. Walaupun demikian, masyarakat yang masih belum terlayani oleh PLN masih cukup besar, yang dapat dilihat dari jumlah rumah tangga yang masih memanfaatkan lampu petromak sebanyak 15.700 rumah tangga, Pelita 21.980 rumah tangga, dan lainnya sebanyak 785 rumah tangga (SUSENAS Riau, 2000). Dengan semakin meningkatnya pengembangan ekonomi kerakyatan (ekonomi perdesaan) kebutuhan akan energi diperdesaan diperkirakan juga akan semakin meningkat pula.

Permasalahan pembangunan energi / perlistrikan di Kabupaten Rokan Hilir untuk 5 tahun mendatang adalah mengusahakan bagaimana Pemerintah Daerah mampu mengolah dan mengelola potensi energi yang ada untuk pemenuhan kebutuhan listrik khususnya pengembangan industri serta listrik perdesaan, mengingat kebutuhan listrik di Kabupaten Rokan Hilir setiap tahun terus meningkat, baik untuk keperluan rumah tangga maupun untuk kebutuhan industri dan lain-lain.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengoptimalkan penambangan bahan galian golongan C melalui pembinaan terhadap usaha-usaha swasta dalam rangka meningkatkan PAD serta pengawasan dan penertiban kegiatan dengan memperhatikan aspek lingkungan.
- b. Mempercepat penanganan masalah limbah dan polusi akibat usaha pertambangan.
- c. Meningkatkan penelitian untuk pemanfaatan dan pengembangan sumber energi alternative.
- d. Membangun pembangkit tenaga listrik dan meningkatkan distribusinya untuk pembangunan industri, daerah perdesaan maupun daerah perkotaan.
- e. Mengoptimalkan pengolahan beberapa bahan tambang dan galian dengan mempertimbangkan efisiensi serta kelestarian lingkungan dan pembangunan berkesinambungan.
- f. Membuat dan meninjau kembali peraturan izin di bidang pertambangan dan energi yang disesuaikan dengan era otonomi daerah.
- g. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat tempatan untuk ber peran aktif dalam usaha pertambangan dan energi.
- h. Pembangunan energi/kelistrikan diarahkan pada upaya penyediaan sumber energi baik dalam bentuk listrik maupun sumber energi alternative lainnya yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat secara murah, mudah, dan merata ke seluruh wilayah dengan kualitas dan kuantitas yang memadai.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan kelestarian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kegiatan pemanfaatan listrik yang berimbang untuk keperluan industri dan rumah tangga.

- b. Program penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi alternative, dengan berbagai macam kegiatan studi/penelitian dalam rangka pemanfaatan sumber-sumber energi listrik yang efisien dan efektif.
- c. Program perluasan jaringan dan peningkatan kapasitas pembangkit tenaga listrik, terutama untuk daerah perdesaan.
- d. Program pengembangan energi, bertujuan untuk meningkatkan penelitian dan pengembangan sumber-sumber energi baru sebagai sumber energi alternative yang murah dan mudah.
- e. Program pembangunan pertambangan umum
- f. Program pembangunan geologi dan sumber mineral
- g. Program peningkatan kualitas dan kemampuan sumber daya manusia pertambangan dan energi.
- h. Program peningkatan pelayanan masyarakat dibidang pertambangan dan energi.
- i. Program penelitian dan inventarisasi potensi mineral, energi dan air bawah tanah/air permukaan.
- j. Program pembinaan, bimbingan dan pengawasan usaha/kegiatan pertambangan.
- k. Program pembinaan dan pengembangan pertambangan rakyat
- l. Program kemitraan dan keterlibatan potensi masyarakat tempatan pada pengusahaan pertambangan.
- m. Program pemanfaatan lahan bekas tambang untuk sektor lain.

5.1.9 Pariwisata

1. Umum

Pembangunan pariwisata sebagai bagian integral dari pembangunan dibawah ini adalah untuk memacu pembangunan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat. Pembangunan pariwisata diharapkan mampu mendorong transformasi ekonomi yang berdampak luas bagi masyarakat. Pariwisata didaerah ini bergantung pada pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan sektor strategis di masa globalisasi ini.

Pembangunan sektor pariwisata dikembangkan secara bertahap terpadu melalui peningkatan kecekatan antara pariwisata dengan sektor ekonomi lainnya, melalui penciptaan iklim yang kondusif. Pembangunan sektor pariwisata terus ditingkatkan dan dikembangkan sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja.

Dengan letak geografis yang cukup strategis, pariwisata diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan Kabupaten Rokan Hilir, lokasi yang dapat diandalkan antara lain adalah daerah Teluk Berumbun yang dapat dijadikan rest area karena letaknya yang strategis di jalur lintas Sumatera, Desa Rantau Bais sebagai daerah hijau dihampanan sungai, serta pengembangan Tasik Lapangga di Tanah Putih.

Sasaran pembangunan sektor pariwisata adalah menata pariwisata daerah yang menarah pada peningkatan dan perluasan usaha pariwisata sehingga mampu meningkatkan peranan pariwisata dalam menunjang perekonomian. Oleh karena itu tujuan pariwisata diarahkan pada peningkatan kunjungan wisatawan baik dari mancanegara maupun wisatawan domestic, berusaha agar dapat tinggal lebih lama dan meningkatkan jumlah pengeluaran per hari.

Oleh karena itu untuk meningkatkan pembangunan sektor pariwisata perlu diambil langkah yang menjurus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia disektor pariwisata, pendayagunaan sektor pariwisata sehingga dapat memperluas kesempatan kerja dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta merupakan sumber devisa yang sangat strategis. Disamping itu juga ditingkatkan koordinasi antara sektor yang mendukung peningkatan kegiatan pariwisata dan menjaga ketertiban dan keamanan sehingga para wisatawan merasa aman serta terjaminnya kelancaran perhubungan antara lain pengangkutan darat, laut, udara dan telekomunikasi.

Permasalahan pembangunan pariwisata di Kabupaten Rokan Hilir antara lain; kegiatan wisata yang telah berlangsung selama ini, kurang menonjolkan potensi nyata secara komprehensif, seperti kurangnya nuansa budaya, karakter dan sifat yang spesifik dari masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk menuju kedaerah wisata; dan kurangnya promosi ke luar daerah maupun keluar negeri.

2. Arah kebijakan

- a. Meningkatkan pembangunan pariwisata pada pengembangan wisata alam dan budaya.
- b. Meningkatkan pembangunan pariwisata dengan tetap memperhatikan adapt dan budaya lokal, serta dapat menumbuhkan nilai tambah ekonomi dan pendapatan masyarakat.
- c. Meningkatkan pembangunan fasilitas pengembangan kegiatan pariwisata.
- d. Menggali dan mengembangkan potensi sumber daya alam dan sosial budaya untuk dapat dijadikan asset kepariwisataan yang baru, sehingga dapat semakin memperkaya objek

wisata dan menciptakan keterkaitan antara usaha wisata dengan usaha ekonomi masyarakat tempatan.

- e. Meningkatkan kegiatan pemasaran objek wisata melalui promosi wisata baik ke dalam maupun ke luar negeri yang dilakukan secara terarah, terencana dan terpadu dengan memanfaatkan secara optimal kerja sama kepariwisataan regional dan global.
- f. Meningkatkan dan mengembangkan mutu insane dan kelembagaan pariwisata, pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi.
- g. Mengendalikan dan mengawasi dampak negative yang ditimbulkan dan aktifitas kepariwisataan dengan memperkuat jati diri masyarakat sebagai manusia “Kami” yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudaya, berbudi pekerti luhur, serta dengan memperkuat peran kelembagaan sosial lokal.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan informasi dan manajemen wisata, yang bertujuan agar kegiatan kepariwisataan lebih terarah pada pengembangan wisata yang sesuai dengan kondisi, potensi, karakteristik, dan sesuai dengan Rencana Induk Pengembangan PAiwisata Daerah (RIPPDA) yang ada di Kabupaten sendiri.
- b. Program Pemberdayaan sumber daya manusia lokal, bertujuan untuk memberikan kesetaraan antara pekerja pendatang dengan pekerja lokal disektor kepariwisataan.
- c. Program peningkatan kinerja kelembagaan pariwisata, adalah bertujuan agar para pengelola pariwisata baik yang merupakan asosiasi maupun usaha wisata dan usaha jasa wisata agar dapat secara professional mengelola aktifitas kepariwisataan, sehingga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung dan meningkatkan kualitas pelayanan pada wisatawan.
- d. Program pengembangan objek dan daya tarik wisata
- e. Program peningkatan promosi dan pemasaran wisata
- f. Program pembinaan jasa wisata, yang dapat diandalkan sebagai ujung tombak kegiatan kepariwisataan.

5.1.10. Telekomunikasi

1. Umum

Sejalan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dalam bidang telekomunikasi dan informasi, maka kesadaran masyarakat akan pentingnya sarana komunikasi ini menjadi

semakin tinggi. Hal tersebut terlihat dari semakin banyaknya jumlah pengguna jasa telekomunikasi dari jenis alat yang digunakan maupun informasi penggunaannya.

Dari jenis alat yang digunakan saja perkembangannya relative pesat, seperti untuk jenis telekomunikasi tidak bergerak (station) yang sudah banyak digunakan didaerah pedesaan berupa penggunaan satelit dan penggunaan pemancar radio untuk daerah yang tidak terjangkau atau yang jalur kabelnya tidak terjangkau, seperti yang dilakukan baik oleh Telkom maupun Ratelindo. Demikian pula terhadap penggunaan jenis peralatan telekomunikasi lainnya untuk yang bergerak (mobile) yang kompetisinya semakin ketat, seperti dilakukan oleh sejumlah perusahaan telekomunikasi seluler Telkomsel, Komselindo, dan Satelindo.

Disamping itu pada saat sekarang ditelah pula berkembang jasa internet yang dapat melakukan akses secara lintas Negara dengan biaya yang relative murah. Usaha jasa internet yang telah dilakukan oleh sejumlah perusahaan yang berperan sebagai provider, telah pula banyak disambut oleh masyarakat dengan mendirikan sejumlah usaha jasa rental internet dalam bentuk Warnet, Cafenet, dan sebagainya.

Telekomunikasi merupakan sektor yang memiliki peranan penting untuk mendorong perwujudan pembangunan disegala bidang, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yaitu memperoleh dan menyebarkan informasi secara cepat dan tepat sehingga mempunyai kesempatan untuk mengetahui dan mempelajari perkembangan berbagai aspek kehidupan. Penguasaan informasi akan dapat menembus daerah isolasi dalam upaya penyebaran pembangunan dan hasil-hasilnya.

Telekomunikasi merupakan kegiatan pelayanan lalu lintas informasi untuk meningkatkan penyebaran informasi dalam segala aspek kehidupan, selain dari itu juga mempunyai fungsi sosial yaitu menghilangkan isolasi daerah terpencil, dan merupakan alat yang sangat mendukung dmengembangkan potensi daerah kepada seluruh masyarakat. Tujuan pembangunan Telekomunikasi adalah berupaya memberikan pengadaan kebutuhan jasa telekomunikasi yang diperlukan oleh masyarakat dengan memperluas jangkauan dan peningkatan mutu pelayanan, mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat, serta menjamin kelancaran pengiriman dan penerimaan informasi dan data melalui peningkatan penguasaan teknologi informasi.

2. Arah Kebijakan.

- a. Meningkatkan pembangunan telekomunikasi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan globalisasi.
- b. Pembangunan telekomunikasi diarahkan pada upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang lebih, merata, hemat, akurat, dan mudah baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangagan dan pembinaan jasa telekomunikasi.
- b. Program perluasan areal daya tangkap telpon seluler.
- c. Program inventarisasi sarana dan prasarana telekomunikasi daerah.
- d. Program pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi.
- e. Program pembangunan, dan pengembangan jaringan telekomunikasi.
- f. Program peningkatan kuantitas dan kualitas SDM telekomunikasi.
- g. Program pengembangan teknologi.

5.1.11. Transportasi

1. Umum

Pembangunan transportasi bertujuan untuk lebih melancarkan arus barang dan penumpang serta bertambahnya sarana dan prasarana angkutan akibat berkembangnya transportasi sebagai penunjang kegiatan ekonomi rakyat.

Dalam rangka meningkatkan pembangunan sektor transportasi, peranan jalan kolektor dan lokal sangat penting terutama untuk memperlancar pengangkutan barang-barang produksi masyarakat di pedesaan ke daerah pemasaran dengan tertib, lancar, serta kontinyu. Untuk itu peningkatan jalan dan rehabilitasi termasuk jembatan merupakan kegiatan yang diprioritaskan. Kondisi jalan di Kabupaten Rokan Hilir saat ini berupa jalan aspal meliputi jalan Negara 120 Km, jalan propinsi 77 Km dan Jalan Kabupaten 43,70 Km. Adapun jalan batu/beton meliputi jalan propinsi sepanjang 32,50 Km, dan jalan Kabupaten 84,145 Km. Sedangkan kondisi jalan krikil yaitu jalan propinsi sepanjang 40,15 Km, dan kondisi jalan tanah meliputi jalan Negara 120 Km, jalan propinsi 149,650 Km dan jalan kabupaten 1.828.000 Km.

Sarana dan prasarana perhubungan sungai dan laut juga merupakan urat nadi perekonomian daerah. Untuk meningkatkan perekonomian rakyat, prasarana perhubungan

sungai dan laut akan ditingkatkan sedemikian rupa sehingga masalah pemasaran hasil produksi serta pemenuhan bahan-bahan keutuhan pokok masyarakat dapat tersedia secara merata dan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu prasarana dan sarana perhubungan sungai dan laut merupakan sarana yang semakin penting dalam meningkatkan pelayanan pariwisata. Demi aktivitas prasarana pelabuhan, pada tahun 1999 jumlah barang dalam negeri dan luar negeri yang dibongkar di Kabupaten Rokan Hilir mencapai 59.883 ton dan 9.010 ton. Sedangkan penumpang yang turun dan naik masing-masing berjumlah 122.924 orang dan 133.161 orang.

Sasaran pembangunan transportasi adalah menuju terciptanya jaringan transportasi yang mudah, efisien dan mampu mendukung industrialisasi dan pariwisata. Dalam upaya pemerataan pembangunan transportasi harus diarahkan agar semakin menunjang kegiatan ekonomi rakyat, supaya pemerataan dan pembukaan isolasi dan keterbelakangan daerah, sehingga semakin memantapkan sistem ekonomi masyarakat.

Peran pihak swasta dalam pembangunan transportasi perlu didorong melalui penciptaan iklim yang menumbuhkembangkan persaingan yang sehat dan jujur serta saling menguntungkan. Demikian juga pengaruh pembangunan transportasi dapat memperluas kesempatan kerja dengan semakin berkembangnya transportasi seiring dengan itu diharapkan pembangunan transportasi merupakan upaya yang bersifat menyeluruh disemua sektor sehingga mempunyai dampak perluasan dan pemerataan kesempatan kerja. Selain itu pembangunan transportasi diharapkan dapat memperlancar dan meningkatkan ekspor.

2. Arah Kebijakan

- a. Mendorong pembangunan ruas-ruas jalan baru dan meningkatkan rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan darat sesuai dengan tuntutan kebutuhan.
- b. Meningkatkan daya dukung jalan sesuai dengan tuntutan kebutuhan untuk menunjang kelancaran ekspor.
- c. Membangun jaringan jalan baru dalam rangka pemerataan di seluruh Rokan Hilir, terutama yang menghubungkan daerah produksi dengan pusat pemasaran dan pengembangan daerah-daerah tertinggal.
- d. Meningkatkan pembangunan pelabuhan dan dermaga untuk pengembangan ekspor dan aktivitas ekonomi masyarakat.

- e. Membangun kesejahteraan dan ketahanan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan melalui pembangunan dan pengembangan transportasi rakyat.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan dan pembangunan prasarana jalan dan jembatan.
- b. Program pembangunan jalan dan jembatan baru di daerah-daerah yang potensial, strategis, dan cepat berkembang.
- c. Program pengembangan aksesibilitas dan prasarana jalan dan jembatan.
- d. Program pengembangan fasilitas dan pengawasan lalu lintas jalan.
- e. Program peningkatan kualitas aparat serta peningkatan dan pengembangan prasarana dan sarana mobilitas dan tugas-tugas operasional aparat.
- f. Program peningkatan angkutan laut, sungai dan penyebrangan.
- g. Program peningkatan dan pengembangan jalan arteri primer, sekunder dan lokal penghubung pusat produksi ke pusat pemasaran.

5.1.12. Perumahan dan Pemukiman

1. Umum

Perkembangan permukiman dapat terjadi secara alamiah dan terencana yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah baik di kawasan perdesaan maupun perkotaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi, menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman, dan nyaman dan ketersediaan sarana air bersih. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar penyediaan hunian, namun bagi kelompok masyarakat berpenghasilan kecil masalah ketersediaan hunian dan air tidak mungkin hanya dipecahkan oleh masyarakat sendiri.

Permasalahan yang dihadapi pada sektor perumahan dan pemukiman antara lain adalah :

- a. Masih banyaknya perumahan penduduk yang belum memenuhi syarat rumah sehat/rumah layak huni.
- b. Pemukiman penduduk yang terpencar-pencar (jaraknya berjauhan). Sehingga menyebabkan sulit dalam pembinaan dan tata fisik desa tidak teratur, tidak terawat beberapa fasilitas desa, seperti jalan-jalan desa, parit/saluran air, dan sebagainya.

- c. Terbatasnya fasilitas air bersih, penerangan/lampu, perhubungan antar desa dan antar tempat permukiman, serta masih banyaknya masyarakat yang belum mempunyai WC yang memenuhi syarat kesehatan.
- d. Kemampuan masyarakat untuk membangun rumah sehat relative kecil, disebabkan oleh tingkat pendapatan dan kesejahteraan juga tergolong kecil/rendah.
- e. Penyediaan dan pengelolaan sarana air bersih untuk perumahan dan permukiman yang layak huni.

Dalam kerangka itu maka sangat diharapkan peranan sektor swasta untuk mengambil bagian dalam pembangunan perumahan dan permukiman ini. Dilain pihak pemerintah harus dapat mendorong penyediaan ketentuan-ketentuan yang mendukung, seperti kemudahan perizinan, pencadangan areal yang pasti, serta bantuan fasilitas ke dan di daerah permukiman sehingga dapat menurunkan biaya pokok pembangunan perumahan dan permukiman.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengembangkan dan memantapkan sistim penyediaan hunian bagi masyarakat berpendapatan rendah dan miskin yang bertumpu pada keswadayaan masyarakat.
- b. Meningkatkan intitusi pembiayaan perumahan yang bertumpu pada mekanisme pasar primer dan sekunder.
- c. Meningkatkan kapasitas pelayanan jaringan prasarana dan sarana permukiman skala lingkungan, kota, dan wilayah.
- d. Meningkatkan penataan kawasan daalam rangka pengendalian perkembangan dan kualitas permukiman.
- e. Meningkatkan pengelolaan pemanfaatan, pemugaran dan pelestarian kawasan strategis khususnya di daerah perkotaan, perdesaan dan kawasan permukiman tradisional serta mmeningkatkan sarana dan prasarana air bersih.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan sarana dan prasarana permukiman, terutama untuk daerah desa/kota oleh pemerintah maupun swasta.
- b. Program pembinaan dan pengembangan kawasan permukiman, untuk menjaga pelestarian kawasan dan lingkungan alam terutama perdesaan.
- c. Program pengendalian dan pengadaan air bersih, bertujuan meningkatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan kota maupun perdesaan, yang lebih diarahkan pada usaha

pelayanan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di daerah yang padat penduduknya, dan daerah permukiman yang sulit mendapatkan air bersih.

- d. Program peningkatan pemerataan penyediaan air bersih yang dapat menjangkau sampai ke daerah pedesaan, sehingga fasilitas tersebut benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh sebagian besar masyarakat.
- e. Program pembenahan sistem permukiman desa dan kota.

5.1.13. Lingkungan Hidup

1. Umum

Pada beberapa kurun waktu yang lalu telah terjadi peningkatan kegiatan pembangunan pembangunan yang sangat pesat di Kabupaten Rokan Hilir. Peningkatan yang sangat tinggi terjadi pada sektor industri, pertanian/perkebunan, perhubungan dan kehutanan. Berbagai kegiatan tersebut umumnya bersifat ekstraktif dan pengolahan yang memiliki dampak negative terhadap lingkungan sesuai dengan spesifikasi kegiatan tersebut baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

Keadaan ini dapat dilihat dari berbagai kasus seperti kerusakan lingkungan sumber daya tanah dan hutan, dan atau pencemaran air. Sumber-sumber pencemaran udara di Kabupaten Rokan Hilir terutama berasal dari sumber pencemaran tetap (bahan bakar), sumber pencemaran bergerak, industri pengolahan, pembuangan limbah padat, dan sumber alami. Sumber pencemaran air berasal dari kegiatan agroindustri, industri pengolahan, sumber domestik dan sumber-sumber lainnya. Sedangkan sumber limbah padat berasal dari kegiatan pertanian tanaman pangan, perkebunan, pertambangan, industri pengolahan dan kegiatan domestik. Berbagai sumber pencemaran tersebut cukup potensial mencemari lingkungan.

Pembangunan lingkungan hidup dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, merehabilitasi kerusakan lingkungan, serta mengendalikan pencemaran dan meningkatkan kualitas hidup. Adapun permasalahan yang menonjol adalah terganggunya ekodiditim sehingga menimbulkan ketidakseimbangan kehidupan makhluk hidup seperti banjir dan tanah longsor di beberapa tempat akibat dari rusaknya fungsi hutan untuk penyerapan air dari penahan tanah.

Isu perkembangan sektor lingkungan hidup adalah :

- a. Rusaknya ekosistem akibat dari pembangunan yang tidak berorientasi kepada rumah lingkungan
- b. Pembangunan yang ada, sebagian besar belum disertai analisa dampak lingkungan.

- c. Tidak konsistennya pelaksanaan pembangunan sesuai dengan master plan.
- d. Kurangnya pengawasan dan pengendalian dibidang lingkungan yang dapat menimbulkan kerusakan ekosistem.
- e. Belum tertatanya sistem pembuangan limbah.
- f. Kurangnya kesadaran masyarakat dan aparat pemerintah terhadap pelestarian lingkungan.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan rehabilitasi sumber daya alam, berupa hutan, tanah, dan air yang rusak, melalui pendekatan terpadu dan terkoordinasi.
- b. Mendorong pendayagunaan daerah pantai dan wilayah laut dengan tanpa merusak kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.
- c. Mengharuskan secara konsisten pelaksanaan Amdal bagi penanaman modal.
- d. Meningkatkan pendayagunaan daerah pinggiran sungai tanpa harus merusak kualitas dan kelestarian lingkungan hidup.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- b. Program konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Program pengendalian pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan hidup.
- d. Program penataan hukum dan kelembagaan pengelolaan-pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e. Program peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- f. Program inventarisasi dan evaluasi lingkungan hidup.
- g. Program peningkatan kelestarian lingkungan hidup.
- h. Program rehabilitasi sumber daya alam.
- i. Program pengendalian dampak lingkungan.

5.1.14. Kelautan

1. Umum

Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah 8.881.59 Km², yang terdiri dari pulau-pulau dan lautan. Potensi kelautan yang ada di wilayah tersebut sangat besar baik ditinjau

dari sisi pemanfaatannya sebagai prasarana transportasi laut, maupun dari sisi sumber daya yang terkandung dibawah permukaannya seperti terumbu karang, dan berbagai jenis ikan mengingat bahwa wilayah perairan tersebut merupakan selat dan pertemuan arus. Potensi pulau-pulau tersebut berupa pantai yang dapat dikembangkan menjadi wilayah cagar alam seperti Pulau Halang, Pulau Jemur di Kecamatan Kubu, serta Pulau Barkey dan Pedamaran di Kecamatan Bangko. Adapun Pulau Sinaboi di Kecamatan Kubu dapat dikembangkan menjadi pusat pelabuhan dan dermaga.

Aktivitas di wilayah perairan relative padat, terutama sebagai prasarana transportasi laut yang menghubungkan Rokan Hilir dengan daerah-daerah di sekitarnya dan juga dengan Negara luar. Dengan terbukanya akses transportasi laut dari/ke Kabupaten Rokan Hilir, adalah merupakan salah satu faktor pemacu pertumbuhan Rokan Hilir yang pada akhir-akhir ini cukup pesat.

Tuntutan terhadap kebutuhan akan pemanfaatan laut dan pantai untuk berbagai kepentingan akan semakin meningkat terutama untuk kepentingan ekonomi sehingga menjadikan laut semakin lama akan semakin penting dan semakin bernilai ekonomi yang cukup tinggi, terutama untuk keperluan usaha transportasi laut yang intensitas kegiatannya semakin tinggi, budidaya perairan yang semakin menjurus ke laut, penambangan minyak lepas pantai, pasir laut, dan sebagainya.

Oleh karena maka permasalahannya adalah bagaimana mengelola potensi kelautan yang selama masih belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di daerah pesisir dan pantai. Dengan belum adanya satu lembaga yang memiliki tanggung jawab penuh dan jelas atas wilayah laut, maka sulit untuk mencari akar permasalahan yang ada dilaut jika terjadi sesuatu, seperti apabila terjadinya pencemaran dilaut, kerusakan pada ekosistem dilaut (termasuk biota dan terumbu karang). Padatnya arus lalu lintas dilaut akan membawa konsekwensi logis terhadap berbagai hal, seperti tingkat kerawanan kecelakaan laut yang tinggi.

Tantangan pemanfaatan laut untuk kepentingan ekonomi, sangat didominasi oleh mereka yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi tinggi, permodalan yang kuat, dan memiliki akses komunikasi dengan luar negeri serta dengan pihak tertentu, sehingga upaya optimalisasi pemanfaatan potensi kelautan ini belum dapat sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang pantai dan pesisir yang selama ini kehidupan mereka akrab dengan laut, bahkan ekonomi mereka semakin terancam oleh karena potensi laut yang ada untuk kesejahteraan mereka semakin sulit didapat, seperti potensi perikanan laut yang tercemar sehingga sulit untuk melakukan kegiatan penangkapan, budidaya, dan sebagainya.

Teknologi kelautan semakin maju dan berkembang seiring dengan semakin tinggi intensitas kegiatan dilaut. Oleh karena sejauh mana kemampuan pemerintah dan masyarakat untuk dapat mengikuti perkembangannya agar tidak tertinggal dan kehilangan momentum.

Investasi disektor kelautan lebih mahal jika dibandingkan dengan investasi didarat, sementara itu kemampuan pemerintah sangat terbatas. Oleh karenanya sejauh mana kemampuan pemerintah dapat memotivasi dan mendorong masyarakat melakukan investasi kelaut terutama guna peningkatan kesejahteraan yang berada didaerah pantai dan pesisir.

2. Arah Kebijakan

Pembangunan kelautan diarahkan pada upaya optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kelautan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan perikanan, budidaya pantai dan pariwisata.

Dengan berusaha untuk meminimalisasi dampak negative dari pada kegiatan eksploitasi dan eksplorasi laut, pantai, dan pesisir agar tetap terjaga kelestarian sumber daya laut yang ada dan mempertahankan ekosistem laut.

3. Program pembangunan

- a. Program optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan.
- b. Program pemetaan dan inventarisasi potensi kekayaan sumber daya kelautan.
- c. Program pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya pesisir dan kelautan.
- d. Program pelestarian dan konservasi sumber daya daerah pesisir dan kelautan.

5.2. Bidang Kesejahteraan Rakyat, Pendidikan dan Kebudayaan

5.2.1. Pendidikan

1. Umum

Angka partisipasi kasar murid-murid sekolah dasar di Kabupaten Rokan Hilir adalah 124,10 persen, sedangkan angka partisipasi murninya belum dapat digambarkan karena data murid SD yang berusia 7-12 tahun belum memadai. Menurut data keluarga BKKBN Propinsi Riau tahun 2000, anak-anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah sebanyak 46,245 orang.

Pada jenjang SLTP dapat digambarkan sebagai berikut; angka partisipasi dasar (APK) siswa-siswa SLTP adalah 56,56 persen, sedangkan angka partisipasi murni (APK) adalah 87,11 persen (Kandepdiknas Bengkalis, 1999). Angka partisipasi kasarnya lebih rendah daripada angka partisipasi murni. Hal ini arang terjadi, biasanya angka partisipasi lebih tinggi daripada angka partisipasi murni. Kondisi ini juga dapat diartikan bahwa 43,44 persen anak-anak usia 13-15 tahun tidak mengikuti program pendidikan tingkat SLTP.

Guru-guru yang mengajar di SLTP daerah ini memiliki kualifikasi sebagai berikut ; berpendidikan SLTA sebanyak 7,1 persen, berpendidikan D1 sebanyak 17,15 persen, berpendidikan D2 sebanyak 23,43 persen, berpendidikan sarjana muda 8,79 %, berpendidikan D3 sebanyak 10,46 persen, dan berpendidikan S1 sebanyak 33,05 persen. Jika dilihat dari tingkat pendidikan, sebenarnya guru yang berpendidikan SLTA dan D1 sudah tidak layak lagi mengajar di SLTP. Mereka seharusnya dapat meningkatkan kualifikasinya.

Angka partisipasi kasar, siswa-siswa SLTA adalah 69,19 persen, sedangkan angka partisipasi murni adalah 78,96 persen. Kondisi kedua angka partisipasi ini juga sama halnya dengan angka partisipasi siswa SLTP, yaitu lebih tinggi angka partisipasi murni daripada angka partisipasi kasar. Hal ini dapat juga diartikan bahwa terdapat 33,81 persen anak-anak usia 16-18 tahun tidak sekolah.

Kondisi di daerah perdesaan, jumlah peserta didik relative lebih banyak dibandingkan dengan perkotaan, tetapi jumlah guru justru lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah guru diperkotaan. Kondisi seperti ini mengakibatkan tingkat pengetahuan peserta didik juga tidak merata meskipun kurikulum yang digunakan sama. Faktor lain yang juga tidak kalah pentingnya adalah prasarana dan sarana yang tidak memadai dan tidak memenuhi standar pendidikan sehingga proses belajar mengajar tidak dapat berlangsung sebagaimana layaknya pendidikan modern. Jumlah ruang belajar di Rokan Hilir pada saat ini masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah murid atau jumlah murid atau jumlah rombongan belajar sehingga terpaksa dilakukan dengan cara pengulangan penggunaan ruang belajar (Shift).

Berdasarkan kondisi umum diatas, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam pembangunan pendidikan di Rokan Hilir adalah; pembinaan pendidikan usia dini, pembinaan sekolah dasar, pembinaan sekolah luar biasa, pembinaan sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pembinaan Pendidikan Sekolah Luar Sekolah, dan Peningkatan Pembinaan aktivitas Budaya Melayu.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan kualitas serta pemerataan pendidikan, terutama kualitas pendidikan dasar, menengah dan perguruan tinggi.
- b. Mendorong pendidikan yang diselenggarakan dilingkungan keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas manusia dan menumbuhkan sikap santun dan berbudi pekerti tinggi.

- c. Meningkatkan peran serta masyarakat/swasta dalam pembangunan pendidikan terutama pendidikan, kejuruan dan luar sekolah
- d. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan pada tingkat sekolah, dasar, SLTP, SLTA.
- e. Mengembangkan pendidikan kejuruan yang relevan dengan tuntutan kebutuhan pembangunan daerah.
- f. Mengembangkan kurikulum muatan lokal, yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan kebutuhan setempat.

3. Program pengembangan

- a. Program pendidikan Dasar dan Prasekolah, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan daya tampung sehingga menjangkau anak-anak dari seluruh masyarakat, meningkatkan kesamaan memperoleh pendidikan, kualitas pendidikan, dan terselenggaranya manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat.
- b. Program pendidikan menengah dan kejuruan, yang bertujuan untuk memperluas jangkauan dan daya tampung, kesamaan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi sumber daya pendidikan, keadilan dalam pembiayaan, efektifitas pendidikan sesuai dengan kebutuhan, meningkatkan kinerja personel lembaga pendidikan, meningkatkan partisipasi masyarakat dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
- c. Program pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi yang bertujuan untuk melakukan penataan sistem pendidikan tinggi, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan dengan dunia kerja, dan meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan.
- d. Program pembinaan pendidikan non formal, perpustakaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bertujuan untuk menyediakan pelayanan pada masyarakat yang tidak atau belum memperoleh pendidikan formal untuk mengembangkan diri, dan memberikan keterampilan berusaha secara profesional.
- e. Program perencanaan dan pengawasan jaringan kerjasama pendidikan dan pengembangan partisipasi masyarakat dan dunia usaha.
- f. Program penelitian, peningkatan kapasitas dan pengembangan kemampuan sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi.

- g. Program pengembangan sistim, sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah, TK, SD, SLTP, dan SMU/SMK binaan.
- h. Program pengembangan sekolah-sekolah agama dan TP.

5.2.2. Kesejahteraan Sosial

1. Umum

Dalam rangka membangun manusia seutuhnya, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan unsure penting masyarakat madani yang dicita-citakan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, karakteristik masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir yang bersifat heterogen dimana besarnya migrasi yang masuk berasal dari beberapa daerah dengan beragam etnik., pengetahuan maupun keterampilan yang dimiliki. Tingginya migrasi masuk sehingga akan menciptakan kesenjangan tingkat kesejahteraan antara pendatang dengan penduduk lokal. Untuk itu perlu persiapan sumber daya manusia yang cukup berkualitas untuk mengisi kesempatan kerja yang tersedia.

Masalah-masalah sosial yang ada di Rokan hilir tergolong komplit. Ada 17 masalah sosial yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah. Masalah-masalah tersebut adalah ; (1) anak terlantar sebanyak 12.380 orang, (2) anak nakal sebanyak 9.926 orang, (3) Wanita tunasusila sebanyak 597 orang (4) pengemis sebanyak 65 orang. (5) korban penyalahgunaan narkoba sebanyak 23 orang, (6) anak, wanita, dan lanjut usia korban kekerasan sebanyak 3.422 orang, (7) penyandang cacat sebanyak 848 orang, (8) penyandang cacat karena kusta sebanyak 64 orang, (9) bekas narapidana sebanyak 4 orang, (10) lanjut usia terlantar sebanyak 6.209 orang (11) wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 5.427 orang, (12) keluarga fakir miskin sebanyak 4.174 orang, (13) keluarga berumah tidak layak huni sebanyak 5.579 orang, (14) keluarga bermasalah psikologis sebanyak 510, (15) korban bencana alam dan musibah lainnya sebanyak 840 orang, (16) masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana sebanyak 70.221 orang, dan (17) anak balita terlantar sebanyak 1.392 orang.

Gambaran masalah-masalah sosial di atas menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat belum dapat terpenuhi, sehingga masalah tersebut menjadikan dilemma karena sulit diberantas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, dan itu muncul dari masyarakat sendiri. Kemiskinan merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya berbagai masalah kesejahteraan sosial, muncul dalam berbagai bentuk ketidakmampuan pemenuhan kebutuhan dasar.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan usaha perbaikan kesejahteraan sosial melalui optimalisasi pelayanan sosial, bantuan sosial serta terus mendorong peningkatan kesadaran kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial masyarakat untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapi.
- b. Melanjutkan pembinaan dan pengembangan komunikasi masyarakat (suku asli) melalui peningkatan latihan dan mengembangkan budidaya yang telah lama diakrabi maupun budidaya baru.
- c. Meningkatkan kesejahteraan sosial serta tanggung jawab sosial masyarakat, melalui jalinan timbale balik antara pemerintah dengan masyarakat.
- d. Meningkatkan pelayanan rehabilitasi sosial serta memberikan santunan dan pembinaan bagi penyandang masalah sosial.
- e. Menertibkan lokasi-lokasi yang dianggap rawan prostitusi WTS secara terpadu dan berkesinambungan.
- f. Meningkatkan pembinaan organisasi sosial sebagai ujung tombak dalam menggerakkan penanganan masalah sosial terutama pada lapisan bawah.

3. Program pembangunan

- a. Program pengembangan kesejahteraan sosial, bertujuan untuk mewujudkan ketahanan sosial masyarakat melalui peningkatan kesadaran, tanggung jawab dan peran aktif masyarakat termasuk penyandang masalah sosial dalam menangani permasalahan sosial di lingkungannya, dan memperbaiki kualitas hidup serta meningkatkan kesejahteraan.
- b. Program peningkatan kualitas manajemen pelayanan sosial, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pelayanan sosial melalui pengembangan alternative intervensi dibidang kesejahteraan sosial dan peningkatan kemampuan serta penetapan standarisasi dan legislasi pelayanan sosial.
- c. Program pembinaan kesejahteraan sosial dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat kea rah yang lebih baik melalui pengembangan usaha dan modal bagi penyandang masalah sosial maupun penggalanngan dalam suatu wadah atau kelompok usaha bersama.
- d. Program pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap penyandang masalah sosial dan pemulihan kepercayaan penyandang dalam upaya menjadi anggota masyarakat.

- e. Program peningkatan dan pembinaan partisipasi sosial masyarakat (individu, kelompok/organisasi) yang mampu dalam pembinaan pelayanan dan bantuan sosial.
- f. Program penanggulangan bencana alam.
- g. Program peningkatan pelayanan sosial melalui lembaga-lembaga sosial dan PSM.
- h. Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial.
- i. Program pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sosial (PSKS)
- j. Program peningkatan kinerja dan kesejahteraan aparat Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
- k. Program peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana sosial.
- l. Program penertiban lokasi-lokasi tindak kerawanan sosial.

5.2.3. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Remaja.

1. Umum

Pembangunan sumber daya manusia mencakup pengembangan sumber daya insan wanita, anak dan remaja sebagai sumber daya sekaligus subjek pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya wanita, anak dan remaja sangat berpengaruh terhadap upaya pembinaan unsure masyarakat terkecil yaitu keluarga.

Sejalan dengan upaya mencapai tujuan pembangunan di Rokan Hilir agar terciptanya komunitas manusia dan masyarakat yang maju dan mandiri, tenteram, sejahtera lahir dan batin.

Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan, sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan.

Berbagai upaya pembangunan untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan telah dilakukan, namun masih dijumpai berbagai ketimpangan, terutama dalam peluang dan akses terhadap sumber daya pembangunan, kontrol atas pembangunan, serta memperoleh manfaat atas hasil-hasil pembangunan. Ketimpangan ini merupakan masalah ekstral yang sudah lama ada dan berkembang dalam masyarakat terutama disebabkan oleh nilai-nilai budaya.

Beberapa permasalahan dan ketimpangan tersebut antara lain adalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam pendidikan, yang memberikan dampak pada kesulitan bersaing

dalam pasar kerja. Kesehatan dan masalah gizi juga masih memprihatinkan dengan adanya kondisi krisis yang berkepanjangan, yang disebabkan oleh adanya nilai-nilai sosial budaya dalam masyarakat yang kurang kondusif terhadap pola hidup sehat, kesadaran akan perlunya pemeriksaan kesehatan yang teratur, dan prasarana dan sarana kesehatan yang terbatas dan belum merata.

Permasalahan lain adalah masalah pelaksanaan program keluarga berencana yang masih perlu mendapatkan perhatian, karena masih menekankan pada kepentingan pemerintah, yaitu untuk mengendalikankan penduduk dan bukan untuk pengaturan kelahiran demi kesehatan dan hak reproduksi perempuan. Disamping itu dalam pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, perempuan masih belum banyak dilibatkan dalam setiap tahap dan proses pembangunan, terutama perumusan kebijaksanaan pengambilan keputusan.

Dalam mengatasi masalah-masalah sebagaimana diatas, peran pemerintah bersama dengan masyarakat sipil dan lembaga-lembaga yang ada didalam masyarakat, terutama lembaga-lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan sangat besar untuk pemberdayaan perempuan.

Dengan demikian maka tantangan yang dihadapi sangat besar dalam pembangunan pemberdayaan perempuan adalah permasalahan structural yang terutama disebabkan oleh karena nilai-nilai budaya tradisional yang berkembang dalam sistim sosial dan berlaku pada berbagai tingkatan masyarakat, menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kedudukan peran yang berbeda-beda. Serta masih banyaknya kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang belum peka jender yaitu; belum mempertimbangkan perbedaan pengalaman, aspirasi dan kepentingan antara perempuan dan laki-laki serta belum menetapkan kesetaraan dan keadilan jender sebagai sasaran akhir pembangunan.

Sejalan dengan pemberdayaan perempuan, peranan anak dan remaja sebagai ader dan penerus cita-cita perjuangan bangsa sangat menentukan yang tercermin dalam sikap dan kepeloporannya dalam berbuat dan bertingkah laku. Segala permasalahan anak dan remaja yang muncul dewasa ini relative mudah diatasi apabila mereka dibekalkan dengan berbagai disiplin ilmu dan kursus-kursus yang sifatnya positif. Dengan wadah pembekalan yang sedini mungkin akan terciptanya suatu tatanan yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan jiwa anak yang mandiri, kreatif, inovatif dan tanggap akan setiap permasalahan yang mengganggu mental anak dan remaja.

2. Arah Kebijakan

- a. Memberdayakan wanita sebagai mitra sejajar kaum pria, melalui peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pembentukan keluarga sejahtera dan bahagia.
- b. Meningkatkan kemandirian, pengetahuan dan keterampilan serta peran aktif wanita, anak dan remaja dalam pembangunan.
- c. Mewujudkan keluarga beriman dan bertaqwa, sehat, sejahtera dan bahagia dalam masyarakat.
- d. Peningkatan kesadaran dan kepekaan jender, mendorong terwujudnya perilaku yang berkesetaraan, dan perilaku jender untuk seluruh instansi lembaga politik dan hukum.
- e. Perlindungan Tenaga Kerja Wanita (TKW) Pengembangan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kualitas hidup perempuan, bertujuan untuk meningkatkan kedudukan dan peran perempuan sebagai makhluk individu yang merupakan insan dan sumber daya pembangunan.
- b. Program penegakan hukum dan hak azasi manusia bagi perempuan, untuk mendukung terciptanya sistem hukum yang tidak diskriminatif dan berkeadilan jender.
- c. Program penguatan peran masyarakat sipil dan kemampuan kelembagaan, untuk memperkuat peran aktif masyarakat, meningkatkan kapasitas dan kemampuan institusi-institusi pemerintah dalam setiap tahap dan proses pembangunan.
- d. Program peningkatan dan kemandirian perempuan, untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, kebijakan pembangunan, pengkajian dan penyempurnaan hukum dan peraturan perundangan pemberdayaan perempuan.
- e. Program perwujudan keluarga sehat, beriman dan bertaqwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sejahtera dan bahagia serta peningkatan ilmu pengetahuan agama.
- f. Program perlindungan tenaga kerja perempuan untuk mengembangkan hak politik dalam berserikat dan bekerja serta mengurangi diskriminasi dalam pengupahan dan kesempatan kerja.
- g. Program peningkatan pemberdayaan perempuan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Program pengembangan KB nasional dan pembangunan keluarga sejahtera.
- i. Program pengutamaan jender dalam pembangunan pendidikan dan pelatihan.

j. Program pembinaan anak dan remaja.

5.2.4. Pemuda dan Olahraga

1. Umum

Pengembangan pemuda dan olahraga juga dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan kekuatan fisik, kesegaran jasmani, kemandirian, berwiraswastadan peningkatan serta berkemampuan dalam memanfaatkan, membangkitkan dan menguasai IPTEK. Pengembangan ini berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pemuda sebagai insane pelopor dan penggerak pembangunan, serta sebagai sumber daya manusia yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang untuk berperan serta dalam pembangunan.

Kepeloporan dan keperintisan pemuda sebagai pelopor penggerak pembangunan yang didorong dengan pemilihan pemuda pelopor di tingkat daerah dengan menempatkan sarjan sebagai pelopor dan penggerak pembangunan pedesaan (SP3) dan tenaga kerja suka rela terdidik (TKST). Pembinaan pemuda sebagai kader pemimpin dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi kader dan motivator pembangunan yang berasal dari kalangan organisasi kepemudaan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Karang Taruna, Pramuka dan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS), Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Profesi, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Kaderisasi pemuda dalam kehidupan berpolitik, berbangsa dan bernegara telah diwujudkan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan berkembangnya sikap kritis kalangan pemuda dalam kehidupan politik.

Keterampilan pemuda ditingkatkan melalui pelatihan yang dilaksanakan dib alai latihan kerja serta melalui sistem magang pada berbagai perusahaan dan pengembangan kewiraswastaaan dikalangan pemuda dari golongan ekonomi lemah dalm rangka meningkatkan keterampilan kerja, kreativitas, keahlian dan jiwa kewirausahaan sehingga mampu meraih peluang dan berperan produktif dalam pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir. Selain itu maraknya permasalahan yang selama inibanyak dilakukan oleh pemuda tentunya tidak luput dari perhatian Pemerintah Daerah Rokan Hilir sendiri dimana tempat-tempat kegiatan seperti olahraga, pramuka, sanggar/wadah untuk berorganisasi mapun balai kegiatan telah berubah fungsi ataupun hilang. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pusat kegiatan tersebut menyebabkan pemuda berpindah kearah yang mestinya tidak dilakukannya seperti penyalahgunaan obat-obatan terlarang (narkotik, ganja, ekstasi dan

sebagainya), yang pada akhirnya melakukan tindakan kriminalitas. Jika kita kaji kesalahan tidak sepenuhnya dijatuhkan kepada pemuda, dimana tempat-tempat yang dulunya sebagai pemancu sportifitas dan kreatifitas sulit dijumpai baik di Kabupaten, Kecamatan maupun desa-desa yang ada Kabupaten Rokan Hilir.

Kegiatan olahraga juga merupakan salah satu bentuk dari pendidikan jasmani dimana merupakan rangkaian aktivitas jasmani, bermain dan berolahraga, untuk membangun peserta didik yang sehat dan kuat sehingga dapat menghasilkan prestasi Akademik yang tinggi. Selain itu pendidikan jasmani yang dilakukan sejak dini merupakan awal pengembangan prestasi olahrag baik melalui jalur sekolah maupun luar sekolah yang harus dilakukan sejak usia muda.

Pembangunan olahraga selama ini dicerminkan pula dari pembangunan sarana dan prasarana olahraga yang mengalami perkembangan yang sangat cepat yang dipusatkan pada pusat kota. Dalam rangka pembinaan olahraga seharusnya dibangun dan dikembangkan sejumlah fasilitas olahraga dengan mengacu pada standard nasional maupun internasional.

Kegiatan olahraga prestasi terutama dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bersama Induk Organisasi olahraga yang dapat meningkatkan kualitas dan kegiatan serta organisasi keolahragaan. Masyarakat termasuk perusahaan Swasta dan BUMN maupun BUMD banyak berperan dalam pembangunan olahraga melalui pembinaan terhadap olahragawan berprestasi dan berbakat.

Kegiatan olahraga telah berkembang dan mencakup pula bagi para penyandang cacat yang dibina oleh Yayasan Pembinaan Olahraga Cacat (YPOOC) yang kini menjadi Badan Pembina Olahraga (BPOC), olahraga tradisional, pencinta alam, perairan serta kedirgantaraan.

Permasalahan olahraga berfungsi untuk menumbuhkan kesehatan dan kesegaran jasmani masyarakat dalam rangka membangun manusia yang berkualitas dengan menjadikan olahraga sebagai wahana dalam penelusuran bibit untuk membentuk olahragawan berprestasi. Dengan demikian, maka permasalahan yang ada dalam pembangunan olahraga adalah bagaimana meningkatkan dan memperluas olahraga atau permasyarakatan olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat dalam upaya untuk membangun kesehatan dan kesegaran jasmani, mental dan rohani masyarakat serta membentuk dan kepribadian, disiplin dan sportivitas yang tinggi, merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas manusia.

Tantangan yang harus dihadapi adalah bagaimana membangkitkan swadana dan keikutsertaan masyarakat terutama masyarakat pengusaha, untuk turut serta dalam

pembangunan olahraga dalam rangka olahraga prestasi. Disisi lain adalah belum mantapnya koordinasi serta belum berkembangnya sistem pembinaan keolahragaan yang dapat membatasi berkembangnya prestasi olahraga sesuai dengan potensi yang dimiliki selain itu juga tetap harus memperhatikan permasalahan yang dimiliki oleh atlet olahraga baik itu sarana dan prasarana serta juga yang tidak kalah pentingnya masalah gizi para atlet sehingga mereka bias berkompetisi dengan baik. Hal yang penting diharapkan adalah partisipasi pemerintah daerah dalam pemberian kehidupan yang layak bagi para olahragawan yang berprestasi untuk mempertahankan nama baik daerah.

Sisi lain yang juga perlu diperhatikan dalam pembangunan olahraga yang sedang dihadapi adalah: kurangnya pengorganisasian induk organisasi olahraga kurangnya pembinaan dan pelatihan bagi atlet pelatih dan guru olahraga kurangnya penguasaan dan pemberdayaan IPTEK olahraga secara kualitas dan kuantitas dicabang olahraga prestasi rendahnya pengakuan oleh pemerintah dan swasta untuk atlet dan pelatih yang berprestasi serta guru pendidikan jasmani dan kurang terbinaanya olahraga prestasi olahraga tradisional daerah serta olahraga masyarakat.

2. Arah Kebijakan

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan peamuda sebagai potensi sumber daya manusia yang prospektif.
- b. Meningkatkan mutu pemuda dalam kehidupan politik bermasyarakat , bernegara dalam rangka membentuk insan yang berjiwa Pancasila.
- c. Meningkatkan fungsi dan peran organisasi kepemudaan untuk mendukung pembangunan.
- d. Membina dan mengembangkan olahraga yang diarahkan pada peningkatan jenis olahraga prestasi yang potensial mangharumkan nama daerah.
- e. Meningkatkan terus gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat.
- f. Menyediakan sarana dan prasarana olahraga dilingkungan sekolah maupun masyarakat.
- g. Mengembangkan iklim yang kondusif bagi generasi muda dalam mengaktualisasi segenap potensi, bakat dan minat dengan memberikan kesempatan dan kebebasan organisasi.

3. Program Pembangunan

- a. Program kepemudaan dalam rangka pengembangan dan pendayagunaan potensi kepemudaan.
- b. Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda.
- c. Program peningkatan dan pemberdayaan partisipasi pemuda.
- d. Program pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga, bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olahraga bertujuan untuk mewujudkan keserasian kebijakan olahraga diberbagai bidang pembangunan.
- e. Program Pembinaan Pemanduan dan pembibitan olah raga terutama terhadap olah raga tradisional dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pemanduan bakat dan pembibitan olah raga sejak dini termasuk penyandang cacat terutama disekolah.
- f. Program pemasyarakatan olah raga dan kesegaran jasmani bertujuan untuk meningkatkan kesegaran jasmani masyarakat dan pelaksanaan kegiatan olahraga.
- g. Program peningkatan prestasi olahraga bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga termasuk olah raga penyandang cacat.
- h. Program pembangunan dan pengembangan gelanggang remaja olah raga seni dan budaya.

5.2.5. Kesehatan

1. Umum

Pembangunan kesehatan merupakan bagian integral dari pembangunan secara menyeluruh. Peningkatan kesehatan dimaksud untuk mewujudkan bangsa yang maju, mandiri dan sejahtera lahir dan batin. Criteria dari salah satu indicator kaemanadirian tersebut dalam masyarakat memiliki derajat kesehatan yang tinggi dan sehat karena pembangunan manusia sebagai insan harus dilakukan dalam keseluruhan proses kehidupannya.

Proses ini dimulai sejak ibu sampai ke usia produktif dan pencapaian harapan hidup yang maksimal. Selanjutnya pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir Di arahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menuju kesejahteraan dan mempertinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup sehat, perhatian khusus diberikan pada golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah, korban PHK, daerah kumuh baik perkotaan dan pedesaan yang menyebar keseluruh daerah trepencil dan masyarakat yang hidupnya terasing.

Pengelolaan kesehatan yang terpadu perlu dikembangkan agar dapat lebih mendorong peran serta masyarakat, termasuk dunia usaha dalam pembangunan kesehatan.

Pelayanan kesehatan selama ini selalu mengacu kepada perbaikan gizi, penciptaan penurunan angka kematian bayi dan ibu, sisi lain yang perlu terus disosialisasikan adalah kebiasaan masyarakat itu tetap menjaga hidup sehat bersih dan peduli terhadap lingkungan tempat tinggal.

Untuk mewujudkan hal tersebut pelayanan kesehatan dasar seperti Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling dan Posyandu yang telah terbina terus ditingkatkan pelayanannya yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai ditambah dengan jumlah tenaga medis yang mencukupi agar segala permasalahan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir dapat ditangani dengan baik perlu kearsipan dan profesionalisme kerja yang ekstra oleh para medis, sehingga permasalahan berbagai penyakit masyarakat bisa diatasi dengan cepat dan tepat,serta perlu pengontrolan yangn lebih ketat untuk permasalahan obat dan makanan yang beredar dimasyarakat sehingga peredarannya tidak menimbulkan masalah dimasyarakat.

Dalam memberikan pelayanan kesehatan hendaklah selalu berupaya untuk pencegahan dan pemberatan dari berbagai macam penyakit baik menular maupun tidak menular. Penyediaan air bersih, MCK dan sanitasi lingkungan diharapkan telah meancapai ke pelosok dan lapisan masyarakat. Untuk menunjang kebajikan Program kesehatan sudah selayaknya mempunyai PERDA serta perangkat Peraturan daerah lainnya yang menjurus kepada kesehatan. Adapun aspek Pembangunan kesehatan meliputi:

a. Derajat Kesehatan dan Gizi Masyarakat.

Usaha peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Rokan Hilir sudah dilakukan semaksimal mungkin walaupun permasalahan sebenarnya masih terdapat kendala-kendala yang semestinya perlu mendapatkan perhatian yang lebih serius. Tolak ukur selama ini ditandai dengan penurunan tingkat kelahiran kasar (CBR) tingkat kelahiran menurut umur (ASFR), tingkat kelahiran total (TFR), tingkat kematian kasar (CDR), tingkat kematian bayi (IMR), tingkat kematian Balita dan tingkat kematian menurut angka kesakitan tertentu serta meningkatkan usia harapan hidup (UHH) penduduk. Menurut data tahun 1999 menunjukkan bahwa penyebab kematian menurut di rumah sakit persentase tertinggi adalah pada jenis penyakit trauma kapitis sebesar 18,42 persen. Adapun untuk jenis penyakit lainnya dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.6 : Jumlah Kasus dan Penyebab Kematian Menurut Jenis Penyakit Di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 1999

No	Penyebab kematian	Jumlah Kasus	Persentase
1	Trauma kapitis	7	18,42
2	Asthma Bronchiale	6	15,78
3	Decompensasi Cordis	5	13,15
4	Aspeksia Neunatorum	5	13,15
5	Malaria	3	7,89
6	Bayi Prematur	3	7,89
7	BBLR	3	7,89
8	Hipertensi	3	7,89
9	Stroke	2	5,26
10	Febris Convulsi	1	2,63
	Jumlah	38	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Sedangkan untuk penyakit terbanyak yang diderita oleh masyarakat Rokan Hilir yang dihimpun oleh rumah sakit dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.7 : Jumlah Kasus dan Penyebab Kematian terbanyak menurut Jenis Penyakit di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 1999

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kasus	Persentase
1	Gastro Enteritis	81	23,41
2	Malaria	52	15,02
3	Abortus Incompletus	39	11,27
4	Vulnus Laceratum	36	10,40
5	Athma bronchiale	33	9,53
6	Trauma capitis	29	8,38
7	Gastritis	21	6,06
8	Observasi Typoid	20	5,78
9	Hepatitis	19	5,49

10	Appendicitis	16	4,62
	Jumlah	346	100

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir

Dan untuk melihat banyaknya penderita penyakit yang telah berobat kerumah sakit menggunakan rawat jalan dapat dilihat pada tabel.

Tabel 5.8 : Jumlah Kasus dan Penyebab Kematian Yang Telah Berobat Kerumah Sakit Menurut Jenis Penyakit Tahun 1999

No	Penyebab Kematian	Jumlah Kasus	Persentase
1	ISPA	1157	24,56
2	Kehamilan Normal	613	13,01
3	Gastritis	483	10,25
4	Arthritis Reumatik	398	8,45
5	Hipertensi	379	8,04
6	Penyakit Kulit	372	7,89
7	Asthma Bronciale	372	7,89
8	Diare	366	7,77
9	TB. Paru	338	7,17
10	Kehamilan Resiko Tinggi	231	4,90
	Jumlah	4.709	100

2. Kelembagaan dan mutu Pelayanan Kesehatan diharapkan berdiri rumah sakit sehingga mampu meningkatkan dan pengembangan rumah sakit daerah yang layak dengan dilengkapi berbagai fasilitas, serta pengembangan Puskesmas menjadi rawat inap maupun Puskesmas Pembantu disetiap daerah yang jumlah penduduknya padat dan perlu dibangun atau ditingkatkan puskesmas pembantu menjadi puskesmas perawatan dengan maksud pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan tempat tidur agar pelayanan kesehatan tersebut bias seoptimal mungkin dimana ditujukan kepada daerah-daerah atau lokasi yang berjauhan dari rumah sakit sehingga berfungsi untuk merawat pasien dan guna memberikan pertolongan secara cepat dan tepat. Disamping itu peningkatan usah pelayanan kesehatan masyarakat adalah dengan melengkapi mobil unit Puskesmas keliling serta tetap terus mengaktifkan Posyandu, Polindes maupun Bidan desa setiap Kelurahan /Desa, dari data yang ada

menunjukkan jumlah desa yang ada taman Gizi/Posbang/Posyandu dari 5 kecamatan sebanyak 89 unit dan jumlah taman Gizi/Posbang/Posyandu juga dari 5 kecamatan sebanyak 243 unit. Guna mencukupi pelayanan kesehatan telah dibangun 1 buah Rumah Sakit, puskesmas sebanyak 6 buah, Puskesmas Pembantu 51 unit. Dengan meningkatnya sarana kesehatan berarti pelayanan dapat dikatakan semakin membaik. Walaupun tingkat pelayanan kesehatan semakin membaik namun masih dirasakan kekurangannya dan penyebaran tenaga medis belum merata. Data tahun 1999 menunjukkan jumlah para medis yang terdiri dari 3 spesialis, 15 dokter umum dan 6 dokter gigi ditambah 73 bidan dan 151 tenaga lainnya. Sementara itu untuk peserta KB di Kabupaten Rokan Hilir memiliki jumlah Klinik KB pada tahun 1999 sebanyak 10 buah peserta KB baru 10.535 orang dan peserta KB aktif 43.119 orang.

Beberapa permasalahan pembangunan kesehatan di Kabupaten Rokan Hilir antara lain dalam tingginya mobilitas penduduk yang keluar masuk di beberapa daerah di Kabupaten Rokan Hilir, tingginya penularan penyakit menular masyarakat seperti Malaria, demam berdarah, HIV/AIDS, Gizi buruk, penyalahgunaan obat terlarang, tingginya dampak penceraan ekosistem akibat pesatnya pembangunan, kecilnya pendistribusian tenaga pelayanan kesehatan, lemahnya mutu pelayanan kesehatan, tingginya biaya pengobatan bagi masyarakat yang kurang mampu dan lemahnya kesadaran masyarakat arti hidup sehat, lingkungan dan tempat-tempat umum.

2. Arah kebijakan

- a. Meningkatkan pembangunan kesehatan melalui pembinaan bantuan pemerintah serta partisipasi masyarakat terutama pada masyarakat berpenghasilan rendah baik di desa maupun di perkotaan serta masyarakat daerah terpencil dan padat penduduknya.
- b. Meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui peningkatan pembangunan dan kemampuan Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu serta penyediaan tenaga medis maupun penyediaan obat-obatan.
- c. Meningkatkan dan menyebarluaskan penyuluhan kesehatan untuk menghindari adanya penyebaran penyakit baik yang ditularkan maupun yang tidak ditularkan.
- d. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan lingkungan dengan pendekatan paradigma sehat dengan memperhatikan peningkatan kesehatan, pencegahan, penyembuhan dan rehabilitasi sedini mungkin dan mampu sampai usia lanjut.

- e. Meningkatkan dan memelihara mutu lembaga dan pelayanan kesehatan (pemerintah dan swasta) baik berupa sarana dan prasarana.
- f. Meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan, medis dan dokter spesialis dengan 4 dasar (kebidanan, bedah, anak dan kandungan) di setiap Kabupaten/kota.
- g. Penataan dan pembiayaan kesehatan masyarakat dan pemberdayaan sistem dukung masyarakat, sehingga kemandirian masyarakat dalam melaksanakan pola hidup sehat dan pemanfaatan dengan sistem melembaga.
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan sejenisnya.

Program Pembangunan

- a. Program lingkungan sehat, perilaku sehat dan pemberdayaan masyarakat bertujuan mewujudkan lingkungan hidup yang sehat untuk mendukung tumbuh kembangnya anak remaja, memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya penyakit.
- b. Program peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan jumlah, kualitas dan penyebaran tenaga kesehatan dan meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan.
- c. Program perbaikan gizi dalam bentuk penanggulangan gizi (KEP) balita dan bantuan program makanan dan tambahan anak sekolah (PMTAS) dalam rangka meningkatkan intelektualitas dan produktifitas sumberdaya manusia.
- d. Program penanggulangan dan pemberantasan penyakit menular untuk meningkatkan pemerataan dan mutu kesehatan masyarakat.
- e. Program pengawasan obat , makanan, dan bahan berbahaya yang beredar dalam lingkungan masyarakat.
- f. Program pengembangan kebijakan dana manajemen pembangunan kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan sesuai dengan tujuan, kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan.
- g. Program upaya kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas upaya kesehatan yang berhasil guna dan berdaya guna serta terjangkau oleh segenap anggota masyarakat.
- h. Program penyuluhan kesehatan.
- i. Program peningkatan sumber daya kesehatan.

5.2.6. Kebudayaan

1. Umum

Kabupaten Rokan Hilir memiliki keragaman suku dan budaya selain memiliki budaya asli yaitu budaya Melayu. Keragaman suku dan budaya juga merupakan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa karena keberagaman itu merupakan asset daerah yang dapat menghasilkan devisa. Meskipun beragam budaya melayu tetap eksis dan bahkan mulai disadari oleh kaum muda bahwa budaya Melayu memiliki daya tarik tersendiri karena mengandung falsafah hidup orang melayu yang tidak ketinggalan oleh kemajunya zaman. Selain itu penghargaan masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya Melayu merupakan hal yang kondusif bagi perkembangan budaya Melayu.

Tujuan Pembangunan kebudayaan adalah membangun ketahanan budaya daerah yang kokoh, dinamis, kreatif dengan tetap berkepribadian yang berakar pada jati diri bangsa dan berdaya menghadapi pengaruh globalisasi. Sasaran yang akan dicapai adalah terbentuknya rujukan sistem nilai budaya yang berbasis pada warisan nilai luhur guna mendukung keberadaan akan budaya daerah. Isu strategis pembangunan kebudayaan meliputi kualitas kinerja lembaga kebudayaan harus ditingkatkan agar lembaga tersebut proaktif menyuguhkan atraksi-atraksi kebudayaan, khususnya kebudayaan melayu setiap event kebudayaan, peningkatan kerja sama dengan instansi terkait agar dapat menghasilkan produk-produk kebudayaan yang berkualitas dan bernilai tinggi, kerja sama dengan lembaga-lembaga atau biro-biro pariwisata perlu terus ditingkatkan, terutama dalam penyajian atraksi-atraksi kebudayaan, khususnya kebudayaan melayu (lokal) pada acara-acara khusus terutama pada saat kunjungan wisatawan, kesadaran dan kecintaan generasi muda pada kebudayaannya harus ditanamkan sedini mungkin agar dapat kebudayaan tetap terjaga kelestariannya. Warisan kebudayaan lokal, perlu dialih generasikan secara berkesinambungan.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengembangkan nilai budaya daerah yang luhur untuk memperkaya budaya nasional serta dapat menangkal akses penetrasi budaya asing yang negative.
- b. Memelihara dan melestarikan keaslian dan budaya daerah.
- c. Meningkatkan penelitian dan pengembangan kesenian, kebudayaan daerah terutama untuk mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur.

3. Program Pembangunan

- a. Program pelestarian dan pengembangan kedudayaan daerah bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai luhur budaya dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya luhur, keragaman budaya, adaptasi dan tradisi.
- b. Program pembinaan dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan daerah yang bertujuan untuk mengungkapkan, menanamkan dan memasyarakatkan nilai-nilai luhur budaya daerah (lokal) dalam rangka menumbuhkan pemahaman dan penghargaan masyarakat pada budaya masyarakat lainnya, menumbuhkan sikap kritis, mendorong ketahanan budaya dan meningkatkan kualitas budaya dalam masyarakat.
- c. Program pembinaan bahasa dan kesusasteraan dalam rangka pengembangan dan pelestarian bahasa dan sastra Melayu yang maju, modern dan dapat berperan sebagai sarana perekat persatuan dan kesatuan.
- d. Program pembinaan peninggalan sejarah dan permuseuman terutama terhadap sejarah lokal dalam memperkaya khasanah budaya daerah bertujuan untuk mendukung upaya pembinaan kebudayaan Melayu yang berakar kuat pada tradisi dan nilai-nilai kesejarahan dengan tetap memelihara dinamika tinggi serta untuk melestarikan dan memanfaatkan bukti-bukti peninggalan sejarah
- e. Program pembinaan dan pengembangan kesenian daerah (Lokal) yang bertujuan untuk mendorong dan mengembangkan kesenian sebagai ungkapan budaya agar mampu menumbuhkan daya, cipta dan karsa bagi masyarakat, sastrawanda pelaku seni budaya lainnya, selain itu untuk mendorong apresiasi dan kreativitas seni masyarakat, memperluas kesempatan masyarakat menikmati seni dan budaya sehingga dapat memberikan inspirasi dan gairah membangun.
- f. Program inventarisasi dan pembinaan nilai-nilai budaya
- g. Program pengembangan seni dan budaya.
- h. Program pengembangan dan pembinaan kebudayaan, kesusasteraan dan kepastakaan.

5.2.7. Kependudukan Dan Keluarga Berencana

1. Umum

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2000 berjumlah 348.517 jiwa. Dalam jumlah ini terdapat penduduk laki-laki sebanyak 178.069 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 170.448 jiwa. Perbandingan atau sex ratio jumlah penduduk laki-laki dan penduduk perempuan adalah 105,07. dengan kata lain dalam setiap 100 jiwa

penduduk perempuan adalah 105 jiwa penduduk laki-laki Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Bagan Sinembah sebesar 108.540 orang dan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Rimba Melintang sebesar 43.258 jiwa.

Laju pertumbuhan penduduk adalah sebesar 4,07 persen pertahun. Laju pertumbuhan penduduk ini tergolong tinggi , tetapi terbelong rendah jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 1980-1990 yaitu 6,13 persen pertahun. Tingkat pertumbuhan penduduk antara Kecamatan sangat bervariasi dimana pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Bagan Sinembah, Kubu, dan Rimba Melintang masing-masing sebesar 10,31 persen, 10,24 persen, 10,23 persen dan pertumbuhan terendah adalah Kecamatan Bangko sebesar 1,00 persen.

Tingginya pertumbuhan penduduk di Kecamatan Bagan Sinembah bukanlah semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan penduduk alami, akan tetapi merupakan salah satu daerah perkebunan kelapa sawit dan perusahaan industri sehingga menyebabkan terjadinya migrasi. Dan faktor lain juga adalah disebabkan oleh tingginya kelahiran bayi hidup yang tinggi dan dapat juga disebabkan oleh migrasi. Kelahiran bayi hidup di Rokan Hilir pada tahun 1999 adalah 3.634 bayi atau 2.31 per perempuan. Angka kelahiran ini tidak tergolong tinggi jika dibandingkan dengan angka kelahiran total (total fertility rate) nasional yaitu 2,78 per perempuan. Jika dikaitkan dengan pertumbuhan penduduk kelahiran bayi menyumbang 1,03 persen. Persentase menunjukkan bahwa kelahiran bayi bukanlah penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk Rokan Hilir. Dengan demikian penyebab tingginya laju pertumbuhan penduduk adalah migrasi yaitu 3,04 persen.

Meskipun kelahiran bayi bukan penyebab utama tingginya laju pertumbuhan penduduk, tidak ada salahnya diperhatikan juga perkembangan program KB di Rokan Hilir. Jumlah keluarga di Rokan Hilir adalah 77.852 keluarga. Dalam jumlah ini terdapat 61.170 pasangan usia subur (PUS) yang terbagi atas 5.303 (8,67%) pasangan di bawah usia 20 tahun, 23.145 (37,84%) pasangan berusia 20-29 tahun dan 32.122 (42,51%) pasangan berusia 30 tahun ke atas.

Dalam 61.170 PUS tersebut terdapat 33.525 (54,81%) pasangan yang mengikuti program KB. Sisanya yaitu 27.645 (45,19%) pasangan tidak mengikuti program KB dengan berbagai alasan yaitu sedang hamil, ingin anak segera, ingin anak tetapi ditunda, tidak ingin anak lagi. Jumlah pasangan yang tidak mengikuti program KB masih tergolong tinggi. Sebaiknya pada masa-masa yang akan datang akseptor KB perlu ditingkatkan jumlahnya. Mengingat letak Kabupaten Rokan Hilir yang cukup strategis maka permasalahan yang dihadapi antara lain adalah penyebaran penduduk yang tidak merata, permasalahan sosial,

kriminalitas, tingginya pertumbuhan penduduk karena adanya migrasi, permukiman liar dan masalah kependudukan lainnya akan terus tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin tingginya arus mobilitas penduduk yang masih cukup tinggi, pertumbuhan yang tidak seimbang antara jumlah penduduk dengan penyediaan fasilitas pelayanan umum dan fasilitas pelayanan sosial/penduduk yang melakukan migrasi sebahagian besar berkualitas rendah dan tidak ada jaminan diterima bekerja di Kabupaten Rokan Hilir dan ikatan emosional yang kuat bagi penduduk bekerja dan bertempat tinggal di beberapa daerah di kabupaten Rokan Hilir dengan keluarganya ataupun kerabatnya yang berada di daerah asal, sehingga selalu maemberikan informasi yang dapat memotivasi penduduk yang berada di luar Rokan Hilir untuk melakukan migrasi ke beberapa daerah di Rokan Hilir.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengendalikan arus migrasi, persebaran penduduk melalui pelaksanaan dan penerapan peraturan daerah.
- b. Mengendalikan pertumbuhan penduduk, melalui program Keluarga Berencana (KB) Mandiri, menurunkan angka kematian khususnya kematian balita serta mneingkatkan kesejahteraan ibu dan anak srta lanjutusia.
- c. Pemberdayaan wanita sebagai mitra sejajar kaum pria, melalui peningkatan peranan wanita dalam pembangunan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pembentukan keluarga sejahtera dan bahagia.
- d. Meningkatkan upaya kerjasama antar kelembagaan baik pemerintah maupun masyarakat dalam rangka menertibkan arus mobilitas penduduk.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan dan keserasian kebijakan penduduk dengan tujuan untuk mewujudkan keserasian berbagi kebijakn pembangunan kependudukan.
- b. Program kependudukan dalam rangka pengendalian pertumbuhan penduduk.
- c. Program keluarga berencana untuk menuju keluarga sejahtera bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memenuhi permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang lebih berkualitas.
- d. Program pemberdayaan keluarga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan keluarga
- e. Program keluarga berencana.

5.3. Bidang Agama

1. Umum

Pembinaan kehidupan beragama belum terjamin adanya peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan kaepada Tuhan Yang Maaha Esa bagi masyarakat, guna mengarahkan kehidupan beragama dalam hal beramal dan kepentingan bersama, telah tersedianya tempat-tempat beribadah menurut agama yang dianut dari masing-masing pemeluknya.

Merebaknya penyakit sosial dalam masyarakat seta merajalela korupsi dan sejenisnya maupun kriminalitas, penyalahgunaan narkotika psikotropika dan zat adiktif (NAPZA). Menunjukkan masih lemahnya pengawasan dan keimanan masyarakat dalam berbuat penyimpangan perilaku yang melanggar moralitas dan etika merupakan gambaran terjadinya kesenjangan antarperilaku formal kehidupan beragama dengan perilaku kehidupan sehari-hari bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pembinaan kerukunan umat beragama diarahkan kepada peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa serta terpeliharanya kerukunan dan antraumat beragama. Untuk itu perlu peningkatan kesadaran dan peran aktif umat beragama yang saling toleransi serta bertanggung jawabnya sebagai umat manusia dan bersama-sama memperkokoh landasan spiritual, moral dan etika bagi keutuhan bangsa dan Negara maupun terselenggaranya pembangunan nasional khususnya masyarakat yang berada di Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Permasalahan tersebut ada yang datang dari dalam yang kadangkala berbau SARA dan juga factor dari luar seperti modernisasi dan penggunaan berbagai media komunikasi baik cetak maupun elektronika dan teknologi yang semakin canggih. Untuk itu perlu penanganan yng lebih serius dari seluruh komponen baik itu tokoh masyarakat, alim ulama/tokoh agama dan tidak luput dari keasiapan aparat keamanan.

Dari data menunjukkan bahwa teampat peribatan terus bertambah hal ini dapat dilihat pada tahun 1999 terdapat 235 Mesjid, Langgar/surau 389, Mushalla 14 buah, Gereja 48 buah dan 1 buah Vihara.

Nama akhir-akhir ini pada beberapa wilayah muncul sejumlah ketegangan sosial yang mengarah kepada konflik antar masyarakat. Merapuhnya etika moralitas agama turut menciptakan kerawanan dalam kehidupan beragama. Berbagai gejala meliputi misalnya praktek perjudian, perilaku asusila, pengedaran dan pemakaian narkoba dan perilaku permisif yang tak lagi mengindahkan adab kesopanan dan kesantunan. Untuk itu upaya kongkrit

memecahkan akar persoalan mendasar, baik yang langsung maupun tidak langsung berpotensi menciptakan gangguan terhadap kehidupan beragama perlu dilakukan secara seksama dan terus menerus.

Dengan demikian tantangan kehidupan beragama antara lain adalah bagaimana menjamin dan menciptakan suasana iklim yang kondusif untuk pelaksanaan ajaran agama bagi setiap penganutnya dan bagaimana menjaga kelestarian kerukunan hidup sesama pemeluk agama dan antarpeemeluk agama, sehingga penganut agama akan merasa aman dalam melaksanakan peribadatannya.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan pembinaan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja antar umat beragama.
- b. Membina partisipasi antar umat beragama dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam pembangunan.
- c. Meningkatkan pelayanan kehidupan beragama dan penyempurnaan kualitas pelayanan ibadah haji.
- d. Meningkatkan mutu pelayanan agama melalui profesionalisme aparat serta sarana dan prasarana.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan pelayanan kehidupan beragama yang bertujuan untuk memberikan pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadah dan mendorong partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kehidupan beragama.
- b. Program peningkatan pemahaman dan pengalaman agama serta kerukunan hidup umat beragama yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama dan memperkuat dasar-dasar kerukunan hidup beragama serta membangun harmoni sosial dan persatuan.
- c. Program penerangan bimbingan dan kerukunan hidup beragama agar dapat terwujudnya suasana yang damai, tenang, tertib, rukun dan saling menghormati serta menghargai di antara sesama umat beragama.

- d. Program pengembangan kualitas kegiatan keagamaan dalam masyarakat agar semakin meningkatkan dan berkembangnya rasa keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- e. Program peningkatan sarana kehidupan beragama.
- f. Program bimbingan dan penyuluhan keagamaan
- g. Program peningkatan kualitas pendidikan agama yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dan ajaran agama untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan serta pembinaan akhlak mulia dan budi luhur.
- h.
- i. Program pembinaan lembaga-lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan tradisional keagamaan guna memberdayakan dan meningkatkan kapasitas serta kualitas peran serta lembaga keagamaan dalam pembangunan manusia seutuhnya.

5.4. Bidang IPTEK

1. Umum

Ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan tumpuan untuk mencapai kemajuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini berate IPTEK mempercepat lajunya pembangunan daerah. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia baik melalui pendidikan formal dan informal serta pendidikan dan pelatihan akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas pembangunan.

Pembangunan IPTEK dilakukan untuk memajukan tingkat kecerdasan masyarakat, mengembangkan kemampuan bangsa serta ikut mendorong proses pembaharuan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara. Perkembangan IPTEK yang makin pesat, persaingan antar bangsa yang semakin ketat serta dampak arus globalisasi yang makin luas menuntut pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan IPTEK secara lebih tepat, cepat dan cermat serta bertanggung jawab agar mampu memacu pembangunan menuju terwujudnya masyarakat yang mandiri, maju dan sejahtera.

Pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan berbarengan dengan peningkatan dalam penguasaan, pengembangan dan pemanfaatan IPTEK diterapkan dalam kegiatan industri, perdagangan, jasa pariwisata dan bidang-bidang pembangunan lainnya, akan menghasilkan produk yang berdaya saing tinggi yang siap menghadapi persaingan dalam perdagangan besar anggota Negara-negara maju tahun 2010 dan siap bersaing pada perdagangan bebas anggota Negara-negara di kawasan Asia Pasifik pada tahun 2020.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan penguasaan pemanfaatan dan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi dalam semua aspek pembangunan.
- b. Mengupayakan penyebaran dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk mendukung pembangunan sektor industri, pertanian dan pertambangan terutama yang dilaksanakan masyarakat perdesaan.
- c. Meningkatkan peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung penguatan, pedalaman, perluasan dan proses industri.
- d. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memenuhi kebutuhan informasi secara tepat dan terpadu dan memanfaatkan hasil-hasil penelitian untuk peningkatan pembangunan.
- e. Mengusahakan pendirian lembaga-lembaga pendidikan tinggi yang relevan dengan tuntutan pembangunan seperti Akademi, Politeknik dan sebagainya baik oleh pemerintah maupun swasta.
- f. Mengoptimalkan pengembangan sistem informasi untuk memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah secara cepat, tepat, akurat.

3. Program Pembangunan

- a. Program pengembangan sistem informasi agar mudah diakses untuk kepentingan perumusan perencanaan kebijakan dan lebih membuka akses Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Program survey dan pemetaan dalam akurasi data-data dan informasi lapangan tentang kondisi fisik wilayah Rokan Hilir yang telah mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat pesat.
- c. Program pengembangan data dan statistic yang lebih mengarah pada upaya pemutakhiran data dan informasi tentang Kabupaten Rokan Hilir secara keseluruhan dari berbagai aspek
- d. Program pengembangan Telekomunikasi, Multimedia dan Infomatika (TELEMATIKA) bertujuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam bidang tersebut guna mempermudah akses keluar maupun kedalam untuk pengembangan potensi sumber daya di Rokan Hilir.
- e. Program penelitian dan pengembangan (Research and Development) dalam pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berperan sebagai penggerak kemajuan dan perkembangan Kabupaten Rokan Hilir pada masa datang.
- f. Program peningkatan kemampuan penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disejalankan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai

pelaku utama untuk perwujudan percepatan pembangunan daerah dan kemajuan IPTEK itu sendiri.

- g. Program penguatan dan pendalaman struktur industri yang akan mampu mempercepat proses industrialisasi yang akan dapat dijadikan sebagai salah satu tulang punggung perekonomian disamping sektor-sektor ekonomi lainnya yang berbasis kerakyatan.
- h. Program pengembangan jaringan sistem informasi teknologi dan manajemen IPTEK agar mudah diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.
- i. Program pemberdayaan kelembagaan IPTEK agar mampu berperan sebagai wadah pengkaji dan pengembangan IPTEK yang dapat diandalkan.

5.5. Bidang Hukum

1. Umum

Peradilan hukum belum bekerja sebagaimana mestinya. Karena lembaga hukum belum independent. Lembaga-lembaga hukum selama ini menjadi kendaraan politik suatu partai, sehingga sulit menegakkan hukum juga dihadapkan konflik kepentingan. Selalu diperalat dengan maksud mencapai tujuan elite tertentu, baik untuk melawan pemerintah dan mendukung pemerintah. Belum terwujudnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan-aturan yang berkaitan penataan masyarakat yang taat hukum. Untuk penegakkan supremasi hukum tiang keberhasilan adalah stabilitas politik. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan hukum, baik distorsi yang datangnya dari elite hukum, penyelenggara Negara, pemerintahan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Dilain pihak, institusi pemerintah dan Negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terhadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecendrungan yang mengarah anarchis walupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat temporer atau kontekstual

Kelembagaan Hukum yang diakui eksistensinya dalam menegakk supremasi hukum ditengah masyarakat dapat berfungsi sebagai alat control bagi aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pakar dan praktis hukum yang potensial dalam mensikapi penyelenggaraan supremasi hukum yang harus dikembangkan. Reformasi hukum dalam menuju sistem pengawasan yang mantap sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategis pembangunan bidang hukum adalah :

- a. Belum terlaksanakan dengan baik pembinaan hukum guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Supremasi hukum belum terwujud dengan baik terutama menegakkan pemerintah yang bersih dan berwibawa karena terjadinya aparaturnya yang belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi.
- c. Peningkatan kualitas aparaturnya hukum demi tegaknya supremasi hukum oleh pemerintah, karena itu format dan arah pelaksanaan peraturan harus dilaksanakan secara konsekwen oleh pemerintah Kabupaten amat tergantung para penegak hukum yang berkuasa saat ini.
- d. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawas dalam pemerintahan, untuk itu issue yang menonjol adalah peningkatan pemberdayaan sistem hukum mandiri dan netral serta mempunyai integritas yang kuat dan handal dalam mensikapi peradilan yang bermoral bertindak seadil-adilnya.

2. Arah Kebijakan

- a. Mengupayakan pelaksanaan secara konsisten peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menumbuhkan supremasi hukum dan hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan masyarakat.
- b. meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan hak asasi manusia (HAM) melalui pelaksanaan penyuluhan hukum.
- c. Meningkatkan sarana penegakan hukum sesuai dengan kebutuhan.
- d. Meningkatkan pembinaan, penegakkan, pelayanan, dan bantuan hukum kepada masyarakat yang memerlukan dalam rangka pelaksanaan hukum secara konsekwe.
- e. Meningkatkan perangkat peraturan daerah yang dapat menunjang pembangunan
- f. Mengakutualisasikan dan merevisi berbagai bentuk peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi lingkungan yang sangat dinamis.
- g. Mengembangkan dan mensosialisasikan peraturan-peraturan daerah yang mendukung kegiatan pembangunan daerah.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kesadaran hukum kepada masyarakat dan penegakan hukum, termasuk berbagai produk Peraturan Daerah.
- b. Program peningkatan penyuluhan hukum.

- c. Program pembinaan hukum guna mewujudkan demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- d. Program peningkatan partisipasi hukum, untuk mewujudkan kesadaran hukum dan pelayanan hukum yang merata bagi seluruh masyarakat.
- e. Program pemberdayaan sistem hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini.

5.6. Bidang Aparatur, Politik, Keamanan dan Ketertiban

5.6.1. Aparatur Pemerintah

1. Umum

Kelembagaan pemerintah pada umumnya belum dinamis dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat, bahkan selalu ketinggalan dari kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Ada kecenderungan aparatur pemerintah yang dilayani masyarakat bukan melayani masyarakat. Tidak ada ketepatan waktu pelayanan, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru tentang aparatur sebagai pelayanan masyarakat. Penempatan aparatur cenderung tidak sesuai dengan bidang studi atau keahliannya sehingga menimbulkan penyesuaian dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat. Prasarana dan sarana kerja, belum memenuhi kelengkapan sebagai pelayanan masyarakat. Disiplin kerja dan insentif yang memadai sesuai indeks biaya hidup, belum terlaksana dengan baik dan cenderung inkonsistensi sebagai pelayan yang bersih dan mengawasi pembangunan yang berkesinambungan.

Kelembagaan pemerintah yang diakui eksistensi berfungsi sebagai pelayanan terhadap masyarakat. Aparatur pemerintah yang berfungsi sebagai pelayan masyarakat dan mengatur kehidupan masyarakat dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih. Aparatur pemerintah merupakan sumberdaya yang potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan bidang dan tugasnya. Tersedianya prasarana dan sarana kerja terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tugasnya. Reformasi dalam penertiban dan pengawasan aparatur pemerintah Kabupaten yang konsisten sebagai pelayan yang bersih dan mengawasi pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategis pembangunan aparatur pemerintahan adalah :

- a. integritas kelembagaan pemerintah Kabupaten yang mantap dan dinamis dalam mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat serta lebih responsive terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

- b. Aparatur pemerintah Kabupaten yang proaktif dalam melayani masyarakat bukan dilayani masyarakat.
- c. Batas waktu penyelesaian pelayanan, hingga adanya kepastian waktu dan ketepatan pelayanan, sehingga menimbulkan penafsiran yang keliru tentang aparatur yang sebagai pelayan masyarakat.
- d. Penempatan aparatur yang sesuai dengan bidang studi atau keahliannya, sehingga dapat menimbulkan kemudahan dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
- e. Prasarana dan sarana kerja dan kelengkapan sebagai pelayanan masyarakat.
- f. Disiplin kerja dan insentif yang memadai sesuai indeks biaya hidup dan konsistensi sebagai pelayan yang bersih dan berwibawa dalam mengendalikan pembangunan.

2. Arah Kebijakan

- a. meningkatkan kesetiaan dan pengabdian aparatur pemerintah daerah dalam mewujudkan otonomi daerah serta peningkatan pembangunan.
- b. Peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan aparatur agar mampu melaksanakan fungsinya untuk melayani masyarakat.
- c. Peningkatan kesejahteraan aparatur dan kelengkapan prasarana dan sarana aparatur.
- d. Peningkatan penertiban dan pengawasan untuk menciptakan pemerintah yang bersih, efisien, efektif, dan berwibawa.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan pelayanan public untuk meningkatkan kualitas pelayanan umum di berbagai bidang agar lebih cepat, murah, tepat, memuaskan, transparan dan tidak diskriminatif dengan menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pertimbangan efisiensi.
- b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pemerintah, dimaksudkan untuk memberikan kemudahan pada aparatur dalam rangka memberikan pelayanan umum kepada masyarakat maupun dunia usaha.
- c. Program pengembangan sumber daya manusia aparatur, untuk mewujudkan aparatur yang andal dan professional, dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan dengan baik, efisien dan terpadu.
- d. Program penataan kelembagaan, struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan mekanisme perencanaan pembangunan, untuk meningkatkan pendayagunaan aparatur pemerintah secara terencana, bertahap dan terprogram sesuai dengan tuntutan pembangunan.

- e. Program aparatur pemerintah yang bersih dan beribawa, untuk mewujudkan sikap pengabdian yang tinggi dan loyalitas secara ikhlas kepada masyarakat.
- f. Program pendayagunaan sistem dan pelaksanaan pengawas, untuk mendukung peningkatan kinerja aparatur dan mengurangi tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam lingkungan aparatur.
- g. Program penataan kelembagaan dan struktur organisasi tata kerja aparatur pemerintah.
- h. Program penyelenggaraan mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

5.6.2. Politik

1. Umum

Kebebasan mengemukakan pendapat, sudah kebablasan, bahkan cenderung arogansi yang berlebihan, kurang memperhatikan koridor yang harus dipatuhi. Munculnya barisan sakit hati yang terakumulasi, sehingga pengendalian sulit dilakukan. Penjarahan asset Negara dilakukan masyarakat, karena selama ini tidak mendapat kesempatan. Selalu memperlak masyarakat dengan maksud mencapai tujuan elite tertentu, baik untuk melawan pemerintah dan mendukung pemerintah. Masyarakat terombang ambing karena provokator, hal ini lemahnya data dan informasi yang diperoleh masyarakat. Apalagi kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga mudah dipengaruhi karena alasan ekonomi. Belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum terartikulasi dengan sempurna, transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam kehidupan politik, baik distorsi yang datangnya dari elite politik, penyelenggara Negara, pemerintahan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Dilain pihak, institusi pemerintahan dan Negara tidak jarang berada pada posisi yang seolah yang seolah tidak berdaya menghadapi kebebasan yang terhadang melebihi batas kepatutan dan bahkan muncul kecenderungan yang mengarah anarchis walaupun polanya tidak melembaga dan lebih banyak bersifat temporer atau kontekstual.

Kelembagaan partai politik yang diakui eksistensi lembaga partai sebagai penampung aspirasi masyarakat. Partai politik dapat berfungsi sebagai alat control bagi aparatur dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Kader-kader partai yang berpotensi dalam mensikapi penyelenggaraan konstitusional yang harus dikembangkan. Reformasi politik dalam menuju sistem pengawasan yang mantap sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategis pembangunan bidang politik adalah :

- a. Belum terlaksana dengan baik pembinaan politik, guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Pemerintah yang bersih dan berwibawa belum terwujud seperti diharapkan karena terjadinya aparatur yang belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi.
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai elite politik mendapat posisi yang terpendang oleh pemerintah, karena itu format dan arah kemana pembangunan kota ini akan dibawa amat tergantung elite politik yang berkuasa saat ini.
- d. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pembangunan untuk itu issue yang menonjol adalah peningkatan pemberdayaan sistem pengawasan yang mandiri dan netral serta mempunyai integritas yang kuat dan handal dalam pembekalan pengawasan itu sendiri.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan jalannya pemerintahan dan pembangunan agar dapat berjalan efisien, efektif dan transparan.
- b. Menciptakan suasana kehidupan yang demokratis guna menunjang kelancaran pembangunan
- c. mengembangkan dan meningkatkan kemampuan dan kualitas organisasi politik agar lebih mandiri serta berbudi daya sesuai dengan jiwa dan semangat pancasila.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan pembinaan politik terutama dalam menghadapi pelaksanaan Pemilu bertujuan untuk memberikan peran yang lebih efektif kepada organisasi dan masyarakat baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan
- b. program peningkatan pembinaan organisasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban politiknya dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia sebagai elit politik bertujuan untuk menumbuhkembangkan sistem dan mekanisme yang memungkinkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya serta mempunyai kesempatan dan keterlibatan yang semakin luas dan berkualitas dalam proses politik.

- d. Program pemberdayaan pengawasan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pada masyarakat untuk saling berkomunikasi juga untuk mengontrol aktivitas pemerintahan.

5.6.3. Keamanan dan Ketertiban

1. umum

Hasil pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan selama ini telah menunjukkan kemajuan meskipun masih mengandung beberapa kelemahan. Penyalahgunaan peran dan fungsi TNI/POLRI sebagai alat kekuasaan lebih membela pihak yang kuat daripada membela rakyat dalam memperjuangkan demokrasi, keadilan dan kebenaran telah melunturkan kepercayaan rakyat kepada TNI/POLRI sebagai abdi Negara dan pelindung masyarakat.

Di dalam tubuh TNI/POLRI itu sendiri penyalahgunaan yang berlangsung cukup lama, telah mengaburkan sikap dan loyalitas TNI/POLRI. Keadaan ini diperburuk oleh pelaksanaan sosial keamanan TNI/POLRI yang terlalu jauh melebihi proporsi yang sewajarnya. Implikasi dari pada itu, antara lain adalah tidak tepatnya penggunaan dan pembinaan TNI/POLRI sehingga jumlah dan tingkat profesionalisme personil kurang memadai yang di barengi pula keterbatasan kualitas dan kuantitas alat utama sistem senjata beserta sarana pendukungnya.

Dengan ketidacukupannya jumlah dan kualitas kekuatan dan kemampuan TNI/POLRI, makin banyak kuantitas dan kualitas gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tidak dapat teratasi dengan baik sehingga berakibat pada berkurangnya jaminan rasa aman dan ketentraman dikalangan masyarakat. Rasa tidak aman itu dapat ditangkap dari terjadinya perampokan dan jambret dan pembunuhan. Konflik antarsuku, sehingga berdampak negative terhadap kunjungan wisata yang masuk. Disamping itu keberanian masyarakat dengan alasan reformasi selalu mengganggu keamanan masyarakat. Masih kurangnya masyarakat tertatih yang dapat mengendalikan keamanan dalam lingkungan masyarakat.

Kelembagaan TNI/POLRI sebagai lembaga keamanan yang diakui eksistensinya sebagai pelindung masyarakat dari ancaman dari dalam maupun luar negeri. TNI/POLRI berfungsi sebagai alat Negara dalam mewujudkan ketertiban masyarakat. Anggota TNI/POLRI yang potensial dalam mensikapi gangguan dalam mendukung dalam mendukung pemerintahan yang tertib dan aman serta menciptakan kondisi yang kondusif dalam

menciptakan hubungan masyarakat yang harmonis. Reformasi TNI/POLRI menempatkan diri sebagai institusi yang independent kembali kepada basisnya sebagai aparat Negara untuk mengamankan Negara dan daerah dalam mendukung tertib hukum yang mantap sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategi pembangunan keamanan dan ketertiban adalah :

- a. Belum terlaksana dengan baik pembinaan keamanan guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
- b. Menegakkan TNI/POLRI yang bersih dan berwibawa, belum terwujud seperti diharapkan karena banyak anggota TNI/POLRI yang melanggar disiplin dan belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi dalam tubuh TNI/POLRI.
- c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai aparat keamanan, karena ratio aparat dengan jumlah masyarakat yang dilayani sangat terbatas. Namun TNI/POLRI yang mempunyai posisi terpandang di tengah-tengah masyarakat, amat ditentukan oleh aparat keamanan.
- d. Masih lemahnya kelembagaan TNI/POLRI berfungsi sebagai pengamanan masyarakat, untuk itu issue yang menonjol adalah sistem informasi yang cepat, serta mempunyai integritas yang kuat dan handal dalam menangkal kejahatan itu sendiri.

2. Arah Kebijakan

- a. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat
- b. Meningkatkan ketertiban masyarakat melalui peningkatan efektifitas aparat Kabtibmas baik di desa maupun perkotaan.
- c. Meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan setiap masalah ketertiban dan keamanan.
- d. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengatasi masalah ketertiban dan keamanan, melalui pengamanan swakarsa dan lingkungan.

3. Program Pembangunan

- a. Program peningkatan kualitas dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk meningkatkan kemampuan mencegah dan menindak setiap gejala yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

- b. Program pemberdayaan sistem keamanan masyarakat, dalam menghadapi berbagai bentuk, ancaman serta menunjang terciptanya stabilitas yang sehat dan dinamis demi kelangsungan pembangunan dan hasil-hasilnya.
- c. Program peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya alam rangka perwujudan rasa aman, tenang, dan tertib dalam masyarakat.

5.7. Bidang penerangan, informasi dan media massa

1. Umum

Kebebasan mengemukakan pendapat, sudah kebablasan, bahkan cenderung pada arogansi yang berlebihan, kurang memperhatikan koridor yang harus dipatuhi. Munculnya tindakan anarkhis akibat publikasi dan mendorong barisan sakit hati dan dapat mendorong penjarahan asset Negara yang dilakukan masyarakat, karena selama ini tidak mendapat kesempatan. Masyarakat yang belum selektif dengan segala informasi yang dipublikasikan, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam melawan pemerintah dan mendukung pemerintah. Masyarakat terombang-ambing karena ulah provokator, hal ini disebabkan oleh lemahnya data dan informasi yang diperoleh masyarakat. Apalagi kondisi kehidupan ekonomi masyarakat yang lemah, sehingga mudah dipengaruhi karena alasan ekonomi. Belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal. Aspirasi rakyat belum terartikulasi dengan sempurna. Transparan dan konsisten. Distorsi atas aspirasi, kepentingan dan kekuasaan rakyat masih sangat terasa dalam menikmati output publikasi dari penerangan, informasi dan media massa, baik distorsi yang datangnya dari insane penerangan, informasi dan media massa, penyelenggara Negara, pemerintahan maupun kelompok-kelompok kepentingan. Kelembagaan penerangan, informasi dan media massa yang diakui ekstensinya sebagai penampung dan penyalur aspirasi masyarakat. Penerangan, informasi dan media massa dapat berfungsi sebagai alat control bagi aparatur dan tingkah laku masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih,. Insan pembentuk opini masyarakat yang potensial dalam mensikapi penyelenggaraan konstitusional dan kehidupan bernegara yang harus dikembangkan. Reformasi penerangan, informasi dan media massa dalam menuju sistem informasi yang mantap sesuai dengan tuntutan pembangunan yang berkesinambungan.

Isu strategis pembangunan penerangan, informasi dan media massa adalah:

- a. Belum terlaksana dengan baik pembinaan kelembagaan penerangan, informasi dan media massa, guna terwujudnya demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

- b. Insan penerangan, informasi dan media massa belum terwujud seperti yang diharapkan karena terjadinya penerapan insane pers yang bertanggung jawab yang belum mengikuti prinsip-prinsip reformasi.
- c. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia sebagai insane penerangan informasi dan media massa mendapat posisi yang terpandang oleh pemerintah, karena itu format dan arah kemana pembangunan Kabupaten Rokan Hilir ini akan dibawa, amat tergantung insan penerangan. Informasi dan media massa yang berfungsi pembentuk opini masyarakat.
- d. Masih lemahnya lembaga-lembaga yang berfungsi sebagai pengawasan dalam pembangunan, untuk itu isu yang menonjol adalah peningkatan pemberdayaan sistem pengawasan yang mandiri dan netral, serta mempunyai integritas yang kuat dan handal dalam pembekalan pengawasan itu sendiri.

2. Arah kebijakan

- a. Meningkatkan kemampuan dan kegiatan komunikasi, informasi dan media massa dalam mengarahkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- b. Mengoptimalkan penggunaan media komunikasi dan informasi untuk kepentingan pembangunan dan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- c. Meningkatkan jangkauan pelayanan komunikasi, informasi dan media massa.
- d. Mendorong mewujudkan kondisi yang kondusif bagi kehidupan pers dan media massa yang demokratis, bebas, objektif, berimbang, bermoral dan beretika sesuai dengan nilai-nilai budaya masyarakat yang telah tumbuh dan berkembang.
- e. Meningkatkan sistem informasi daerah untuk memnuhi kebutuhan informasi secara tepat, cepat, meluas terpadu.

3. Program Pembangunan

- a. Program pembangunan sistem informasi
- b. Program pembinaan dan pengembangan radio, televise, dan film
- c. Program peningkatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penerangan, informasi, komunikasi, media massa, dan lembaga kewartawanan.
- d. Program pengembangan sarana dan prasarana
- e. Program perluasan informasi pembangunan
- f. Program peningkatan pembinaan dan pengembangan pers.

Asas kelembagaan pemerataan pertumbuhan antar daerah kecamatan, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku secara terbuka dan demokratis, manajemen public yang efektif dan efisien, serta didukung dengan instrument pengelolaan tata ruang, pertanahan, sumber daya alam, dan lingkungan hidup yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan.

Hasil-hasil konkrit pembangunan daerah selama ini diakui memang adalah cukup banyak, namun dengan semakin besarnya tuntutan pembangunan oleh masyarakat, masih banyak hal yang harus disebarluaskan, termasuk kendala dan permasalahan pembangunan yang dihadapi.

Dalam hal pengembangan wilayah, kabupaten Rokan Hilir masih menghadapi berbagai permasalahan, yakni berupa kesenjangan antar wilayah kecamatan. Di samping perbedaan dalam kondisi geografis dan potensi sumber daya yang ada, namun dengan terbatasnya kemampuan, maka mengakibatkan belum optimalnya pemanfaatan keunggulan geografis, agraris, dan maritime sebagai basis ekonomi masyarakat.

Dalam hal pembangunan desa, sebagian besar masyarakat pedesaan masih berada pada pola kehidupan perdesaan yang mengandalkan sumber kehidupan dari pertanian subsisten, atau sebagai buruh tani yang pendapatannya tidak pasti dan rendah. Kehidupan sosial ekonomi masyarakat perdesaan relative tertinggal dibandingkan daerah perkotaan yang disebabkan oleh lapangan kerja dan kegiatan usaha yang tidak kompetitif.

5.5. Bidang Pembangunan Daerah

1. Umum

Kabupaten Rokan Hilir memiliki sumber daya alam yang cukup melimpah, dimana sebahagian potensi sumber daya alam itu telah diolah dan dipergunakan untuk keperluan dalam negeri dan luar negeri (komoditi ekspor). Sekalipun demikian, masih banyak lagi sumber daya alam yang belum dapat dimanfaatkan secara efektif dan optimal. Masalah terbesar dalam pengembangannya, terutama di daerah perairan karena letaknya yang tersebar danb terpecah serta masih terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan dan telekomunikasi.

Pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan desentralisasi pengaturan sumber daya ekonomi dengan mempertimbangkan penerapan pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efektif dan efisien. Di samping itu, pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir juga merupakan

upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihan bagi masyarakat untuk mengembangkan kehidupan sosial-ekonominya dengan lebih baik dan maju.

Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen dan potensi daerah dengan berlandaskan memberikan pendapatan masyarakat yang cukup, kondisi pelayanan pendidikan dan kesehatan yang kurang memadai dan rendahnya tingkat pelayanan prasarana dan sarana. Dalam hal pembangunan perkotaan, masih dihadapkan pada kurangnya kemampuan manajerial dan pembiayaan untuk dapat memberikan pelayanan sosial-ekonomi yang memadai dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu masalah pengangguran, kemiskinan, dan kerawanan sosial tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan yang berdampak pada penurunan ketertiban, keamanan dan kenyamanan hidup masyarakat, jaminan keamanan berusaha dan kelancaran aliran investasi oleh usaha swasta di daerah perkotaan.

Dalam hal permukiman, terlihat bahwa dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi menyebabkan pula meningkatnya kebutuhan penyediaan hunian dan lingkungan pendukungnya secara lebih layak, aman dan nyaman. Meskipun sebagian besar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan tersebut secara swadaya dan didukung oleh pasar penyediaan hunian, namun bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, masalah ketersediaan hunian tidak mungkin hanya dipecahkan oleh masyarakat sendiri.

Dalam hal penataan ruang, terdapat ketidaktepatan rencana dan ketidak tertiban pemanfaatan ruang yang dapat mengurangi efisiensi kegiatan sosial-ekonomi, investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan usaha swasta, dan penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan. Hal tersebut selanjutnya juga dapat memberikan akibat pada menurunnya kualitas kehidupan, produktivitas ekonomi daerah, pendapatan daerah, dan hambatan terhadap kelanjutan pembangunan.

Dalam hal pertanian, pada saat ini masalah yang dihadapi adalah kurangnya kemampuan pemerintah dalam pengelolaan administrasi pertanahan. Untuk menangani proses sertifikasi status tanah, sedangkan dilain pihak peranan pemerintah sangat penting untuk menjamin kelancaran penggunaan dan ketertiban penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan sosial ekonomi dan umum.

Dari semua itu permasalahan, pembangunan daerah Rokan Hilir diatas, sesuai dengan perumusan Pola Dasar pembangunan daerah, maka dapat disimpulkan isu sentral pembangunan daerah, sebagai berikut:

- a. Kesenjangan antar daerah, antarkota dan desa, serta antar golongan masyarakat dalam hal pendapatan.
- b. Kesenjangan pembangunan antar sektor
- c. Kesenjangan pemabangunan fisik dan non fisik.
- d. Permasalahan pemerintah daerah yang semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitas dan harus dapat ditangani secara spesifik oleh pemerintah daerah.

3. Arah kebijakan

a. Pembangunan daerah

- 1) Mengembangkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga politik, lembaga hukum, lembaga adapt, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat serta seluruh potensi masyarakat.
- 2) Mewujudkan perimbangan keuangan antar pusat dengan daerah sesuai dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam yang telah dimanfaatkan selama ini oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan penerimaan dalam negerinya.
- 3) Memberdayakan Dewan perwakilan Rakyat daerah dalam rangka melaksanakan fungsi dan perannya guna mendukung mewujudkan otonomi yang luas.
- 4) Meningkatkan pembinaan terhadap kota-kota yang mengalami perkembangan yang cepat sebagai akibat dari pesatnya kegiatan pembangunan di wilayah tersebut.
- 5) Memberdayakan desa-desa terutama yang berada di daerah terpencil dan sulit dijangkau.

b. Penataan ruang

- 1) Memantapkan sistem perencanaan tata ruang dengan meningkatkan ketersediaan rencana tata ruang wilayah, kawasan perkotaan, kawasan perdesaan dan kawasan khusus yang dilakukan secara tranparan, partisipatif dan sesuai dengan kaidah perencanaan.
- 2) Meningkatkan ketertiban pemanfaatan ruang melalui penyediaan rencana rinci tata ruang dan melengkapinya dengan kebijakan, peraturan-peraturan, dan mekanisme perizinan dalam pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang.
- 3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan penataan ruang melalui pengembangan prosedur dan mekanisme, pengembangan organisasi, permasyarakatan, prionsip penataan ruang,

termasuk mengenai hak dan kewajiban pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

c. Pertanahan

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan sistem informasi pertanahan kepada masyarakat tentang status kepemilikan tanah.
- 2) Meningkatkan pengembangan pertanahan yang serasi dengan rencana dan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan.
- 3) Meningkatkan kapasitas lembaga pengelolaan dan organisasi pertanahan.
- 4) Memberikan kepastian hak atas tanah adat dan ulayat
- 5) Melaksanakan retribusi dan realokasi lahan-lahan yang dikuasai secara berlebihan, tidak memenuhi azas keadilan dan kesamarataan, terlantar, tidak ataupun belum dimanfaatkan, bekas HGU yang dicabut atau sudah habis jangka waktunya untuk menjamin ketersediaan lahan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah untuk kepentingan umum (Public utilities)

4. Program Pembangunan

a. Pembangunan daerah

- 1) Program pembinaan kelembagaan
- 2) Program pembinaan keuangan Daerah
- 3) Program pengembangan Peranan dan Fungsi DPRD
- 4) Program pembinaan perkotaan
- 5) Program pembangunan perdesaan

b. Penataan Ruang

- 1) Program pemantapan sistem perencanaan tata ruang
- 2) Program penataan ruang di daerah perkotaan, perdesaan dan kawasan khusus.
- 3) Program penataan bangunan
- 4) Program pengawasan, pengendalian, dan pembinaan tata bangunan
- 5) Program pengembangan sumber daya manusia
- 6) Prigram pembangunan sarana dan prasarana
- 7) Program peningkatan kapasitas pengelolaan kota

c. Pertanahan

- 1) Program pengembangan sistem konsolidasi tanah

- 2) Program penataan penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan atas tanah yang disesuaikan dengan rencana pemanfaatan ruang, wilayah kawasan.
- 3) Program peningkatan pelayanan pertanahan
- 4) Program pengembangan kapasitas kelembagaan pengelolaan dan pembangunan administrasi pertanahan.

Bab 6

Penutup

Pembangunan Daerah kabupaten Rokan Hilir adalah bagian integral dari upaya pembangunan secara nasional yang pada hakekatnya adalah upaya yang terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah yang handal dan professional untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat dan mengelola sumber daya daerah secara berdaya guna dan berhasil guna bagi kemajuan perekonomian daerah dan kesejahteraan rakyat.

Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan melalui pengembangan otonomi daerah dan desentralisasi pengaturan sumber daya dengan mempertimbangkan penerapan pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja pemerintah daerah yang efektif, efisien dan akuntabel. Disamping itu pembangunan daerah kabupaten Rokan Hilir juga merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat diseluruh daerah sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk memperluas pilihannya dalam mengembangkan kehidupan sosial ekonominya dengan baik dan maju.

Pembangunan daerah Kabupaten Rokan Hilir dilaksanakan secara sinergis oleh seluruh komponen di Kabupaten Rokan Hilir dengan berlandaskan asas keseimbangan pemerintahan pembangunan antar kabupaten/kota, kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, komunikasi dan interaksi lintas pelaku secara terbuka dan demokratis, manajemen public yang efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan dan di dukung oleh instrument pengelolaan tata ruang, pertanian, sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memenuhi kaidah pembangunan berkelanjutan.

Program Pembangunan daerah (PROPEDA) kabupaten Rokan Hilir merupakan dokumen perencanaan manajerial, komprehensif, yang memuat indikasi program-program pembangunan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah sebagaimana diatas.

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) kabupaten Rokan Hilir merupakan pengejawentahan secara operasional dari Pola Dasar Pembangunan daerah Kabupaten Rokan

Hilir, dan disusun berdasarkan analisa situasi daerah dengan memperhatikan aspek-aspek konsistensi, rasional, objektif, serta sinergis secara vertikal dan horizontal.

Program Pembangunan daerah (PROPEDA) ditetapkan dengan Peraturan daerah yang dilaksanakan melalui rencana Strategis (RENSTRA) kabupaten, yang untuk selanjutnya dijabarkan dalam REPETADA dan RAPBD Kabupaten Rokan Hilir kurun waktu 2002-2006.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Rokan Hilir yang disusun melalui PROPEDA ini, sangat tergantung pada peran serta dan partisipasi aktif, masyarakat dengan pemerintah dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir. Dalam kerangka itu, perlu terus dikembangkan kerjasama dan kemitraan yang sinergis antara Pemerintah, DPRD dan masyarakat secara jujur, transparan, adil, demokratis dan penuh tanggung jawab, sehingga hasil-hasil pembangunan daerah benar-benar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan lahir dan batin.